

# KATA SAMBUTAN

**Dr. Made Mangku Pastika, MM**

Gubernur Bali 2008-2018  
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)  
REPUBLIK INDONESIA

# HUTAN LESTARI

Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhi-nya

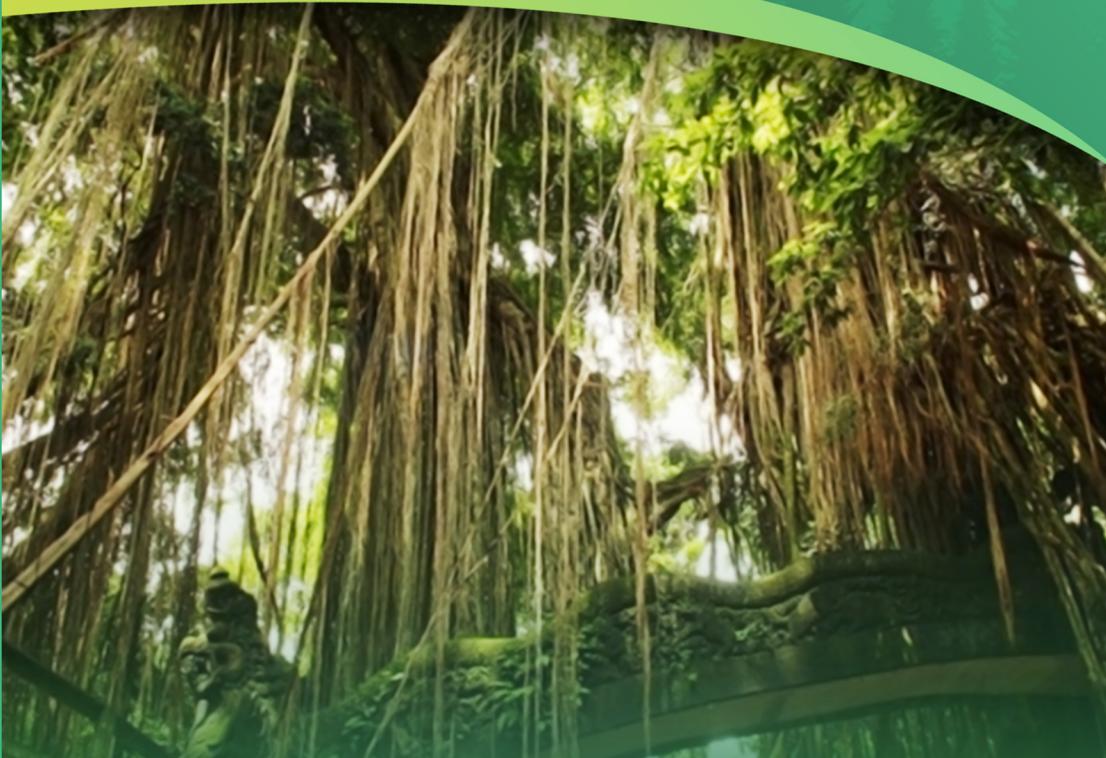
**HUTAN LESTARI**

Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhi-nya

**PUTU KRISNA ADWITYA SANJAYA**

**UNHI PRESS**

**2021**





# HUTAN LESTARI

*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

Oleh

PUTU KRISNA ADWITYA SANJAYA

EDITOR

**Ida Bagus Putu Eka Suadnyana**



**UNHI PRESS**

# HUTAN LESTARI

## *Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

Penulis : **Putu Krisna Adwitya Sanjaya**

ISBN : 978-623-7963-21-9

Editor : **Ida Bagus Putu Eka Suadnyana**

Penyunting : I Wayan Wahyudi

Desain Sampul dan Tata Letak : I Wayan Wahyudi

Penerbit : UNHI Press

Redaksi :

Jl. Sangalangit, Tembau, Penatih, Denpasar -Bali Telp. (0361)

464700/464800 Email : unhipress@unhi.ac.id

Distributor Tunggal :

UNHI Press

Jl. Sangalangit, Tembau Penatih, Denpasar-Bali

Telp. (0361) 464700/464800

Email : unhipress@unhi.ac.id

Cetakan pertama Mei 2021

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

*Matangnyan Prihen tikang bhutahita  
Hayuwa tnu masih ring sarwaprani  
Apan ikang prana ngaranya,  
Ya ika nimittaning kapagehan  
I kang catur warga, nang dharma, artha,  
kama, moksa*

**(Sarasamuccaya, 135)**

“Mari kita usahakan kelestarian alam  
Jangan tidak sayang kepada semua makhluk hidup  
Karena lestariannya alam dan makhluk hidup,  
Menyebabkan terjadinya kita mencapai catur warga yakni dharma,  
artha, kama, moksa ”

*“ Jika musim tanam tidak diganggu maka hasilnya akan lebih dari  
yang bisa dimakan.  
Jika jaring pukat harimau dilarang ditebar di kolam dan danau, maka  
ikan dan kura-kura akan melebihi dari yang bisa dikonsumsi.  
Jika kapak dan gergaji memasuki bukit dan hutan hanya pada saat  
yang tepat, maka kayu akan melebihi dari yang bisa digunakan ”*  
**(Mencius)**

*Om dyauh santir antariksam santih, prthivi santir apah santih,  
Osadhayah santih vanaspatayah santir,  
Visedevah santir Brahman santih,  
Sarvam santih eva santih, sa ma santir edhi,  
Om Shantih Shantih Shantih Om*  
**(Yajur Veda, 36.17)**

“ Ya Tuhan, Semoga damai di Langit, damai di Antariksa, damai di  
Bumi, damai di Air  
Damai di Hutan, damai pada pepohonan, damai dan hanya damai  
Semoga kedamaian datang kepada kami”

**Ku persembahkan untuk :**  
*Ida Sang Hyang Widhi Wasa*  
Kawitan,  
Kedua orang tua dan mertua,  
Istriku Luh Gede Pradnyawati  
Alam & Lingkunganku  
*Krama* Bali  
serta Pembelajar  
dimanapun anda berada ...

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*



**DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA**  
PERWAKILAN PROVINSI BALI  
DR. MADE MANGKU PASTIKA, M.M

**SAMBUTAN**

*Om Swastyastu,*

Saya sangat mengapresiasi atas penerbitan dan peluncuran buku "Hutan Lestari: Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya" yang ditulis oleh Putu Krisna Adwitya Sanjaya, S.F., M.Si. Saya menjadi teringat dengan ungkapan bijak Mahatma Gandhi yang menyatakan "*the earth produces enough for everybody's need, but never enough for anybody's greed*", sesungguhnya bumi cukup untuk memenuhi kebutuhan kita semua, namun tidak cukup untuk memenuhi nafsu segelintir kecil orang yang serakah.

Kenyataan yang tak terbantahkan kalau kehidupan manusia sangat bergantung pada sumber daya alam dan lingkungan. Manusia hidup dan berkembang dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada disekitarnya atau lingkungan yang meliputi: tanah, air, udara, flora, fauna, mikroorganisme, mineral, energi, maupun sebagai sumber pangan, obat-obatan, bahan bangunan, bahan sandang, maupun layanan ekologi lainnya.

Artinya, dibutuhkan kesungguhan dari manusia untuk menyadari posisi ketergantungan ini. Terlebih lagi, di saat jumlah manusia sebagai pengguna sumber daya itu semakin besar jumlahnya. Sangat wajar kalau muncul pertanyaan yang bernada kekhawatiran. Akankah suatu saat dalam waktu tidak lama lagi ketersediaan sumberdaya itu akan semakin menipis, menuju terkuras habis atau bahkan lenyap sama sekali?

Memang ada fakta yang sulit dipungkiri bahwa sejak empat dasa-warsa terakhir, keanekaragaman sumber daya alam telah menurun cepat sekali sebagai akibat dari eksploitasi ekosistem secara berlebihan, terutama ekosistem hutan untuk keuntungan ekonomi jangka pendek. Seandainya hal buruk seperti itu sampai sungguh-sungguh terjadi, akan berarti pula lenyapnya kehidupan di bumi ini.

Oleh karenanya, kalau tidak menginginkan hal itu terjadi, maka setidaknya harus mulai ada kepedulian dan memunculkan rasa tanggung jawab untuk memelihara dan melestarikan sumber daya alam yang ada, sehingga dapat mencegah malapetaka yang mungkin terjadi.

Setidaknya setiap insan mulai memahami dan berupaya menerapkan secara konsisten prinsip dari konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yakni suatu pola pembangunan yang bertujuan untuk mencukupi atau memenuhi kebutuhan generasi masa kini, tanpa membahayakan kemampuan generasi yang akan datang untuk mencukupi atau memenuhi kebutuhannya. Tentunya sangat diharapkan generasi sekarang ini memiliki cara berpikir dan bertindak untuk tidak menghabiskan sumberdaya alam dalam jangka pendek semata.

# HUTAN LESTARI

## *Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

Dengan demikian, dalam setiap langkah pembangunan sebaiknya senantiasa mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya adalah: *pertama*, menjaga keseimbangan antara upaya untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan kemampuan daya dukung ekosistem; *kedua*, senantiasa melakukan upaya peningkatan mutu kehidupan manusia dengan cara melindungi dan memberlanjutkan; *ketiga*, upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan sumber daya alam yang akan dibutuhkan pada masa mendatang; *keempat*, upaya mempertemukan kebutuhan-kebutuhan manusia secara antar generasi.

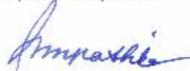
Bali khususnya, sudah dikenal memiliki kearifan lokal berupa nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan pemeliharaan, melindungi dan mengelola sumber daya alam atau lingkungan hidupnya secara lestari. Pelestarian yang dimaksudkan adalah dalam konteks dinamis bukan statis, dimana setiap unsur berperan memberikan fungsi kepada unsur yang lain. Pelestarian dapat diartikan sebagai kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan dari hubungan unsur perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan secara berkelanjutan.

Bahkan salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi Bali saat ini adalah menjaga kelestarian hutan (Wana Kerthi). Artinya, nilai-nilai luhur kearifan lokal untuk mewujudkan Wana Kerthi mesti dapat diterapkan secara konsisten dalam perencanaan pembangunan Bali yang berkelanjutan. Jangan sampai hanya menjadi sekadar jargon untuk dipidatoken atau dibuatkan ritual yang mewah dan besar. Semua tidak akan berarti tanpa penghayatan dan pengamalan dengan kesungguhan.

Akhir kata, Saya berharap Buku ini mampu memberi manfaat kepada siapa saja yang berkomitmen untuk mengawal upaya pelestarian hutan, baik kalangan Pemerintah, sivitas akademika, penggiat Lembaga Swadaya Masyarakat, praktisi ekonomi sumber daya alam dan lingkungan, maupun masyarakat luas lainnya.

*Om, Shanti, Shanti, Shanti, Om.*

Denpasar, 21 April 2021



DR. MADE MANGKU PASTIKA, MM

## KATA PENGANTAR

***“ ... Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah, menulis adalah bekerja untuk keabadian ...”***

(Pramoedya Ananta Toer)

*Angayu Bagya* puja dan puji syukur saya panjatkan karena atas *Asung Kertha Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa* Tuhan Yang Maha Esa, yang dengan rahmat dan karunia-Nyalah telah memberi petunjuk kepada saya untuk dapat menyelesaikan penulisan buku ini. Embrio awal buku ini disusun pada saat saya berhasil memperoleh penelitian hibah Perguruan Tinggi dalam bidang Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan terutama bidang kajian Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang kemudian oleh *reviewer*, rekan sejawat dosen, mahasiswa Srata 1 Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata Universitas Hindu Indonesia mendorong dipublikasikannya buku yang anda baca ini.

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

Sumber daya alam dan lingkungan tidak dapat dilepaskan peranannya sebagai sumber kehidupan serta sumber pendapatan bagi proses pembangunan pada suatu daerah. Pembangunan ekonomi pada hakekatnya merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Indikator yang digunakan untuk mengetahui kondisi perekonomian adalah Produk Domestik Regional Bruto dan pertumbuhan pendapatan per kapita masyarakat di wilayah tersebut. Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan ekonomi masyarakat akan menjadi tekanan terhadap pemanfaatan sumberdaya alam, terlebih dengan adanya pemberian otonomi kepada daerah dalam konteks pengelolaan sumber daya alam dapat menjadi sebuah harapan sekaligus ancaman. Isu lingkungan hidup pernah disentuh dalam konferensi *United Nation Framework Convention on Climate Change* di Nusa Dua, Bali tahun 2007 mengenai kerusakan lingkungan yang terjadi akibat dari industrialisasi yang berorientasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan aspek lingkungan sehingga mengakibatkan iklim dunia menjadi berubah seperti sekarang ini, atau yang disebut dengan *global warming*.

Di Bali seputar penyelamatan lingkungan sudah diwariskan sejak jaman dahulu. Ini terbukti dari adanya ritual khusus pada hari Raya *Tumpek Wariga* setiap *enem sasih* yakni memberi penghormatan pada tumbuh-tumbuhan yang secara langsung merupakan pengejawantahan terhadap kelestarian lingkungan sebagai wujud dari falsafah *Tri Hita Karana* yang juga menjadi pedoman mengenai konsep hubungan antara manusia, alam, serta Tuhan. Hal ini dirasa belumlah cukup

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

mengingat fakta dilapangan kondisi hutan di Provinsi Bali mengalami tekanan akibat gangguan keamanan hutan dengan berkurangnya luas hutan maupun bertambahnya lahan kritis di kawasan hutan.

Buku ini tidak berpretensi untuk mengkaji semua determinan penentu kelestarian hutan di Pulau Bali yang dikenal luas dalam teori Ilmu Ekonomi. Kendati demikian, hampir semua faktor penentu hutan yang lestari secara agregatif yang populer mempengaruhi kelestarian hutan telah dicoba untuk diulas secara tuntas dalam buku ini termasuk juga dengan menggunakan konsepsi ajaran Agama Hindu maupun kearifan seperti *Wana Kerthi, Tri Hita Karana, Tumpek Bubuh, Tumpek Uye* serta mengkorelasikannya dengan determinasi kelestarian hutan di Bali.

Buku ini disusun secara gamblang, lugas yang dirancang dengan kajian teori, studi empiris, *based on research study* dengan pendekatan ilmiah eminen. Sebagai buku teks, buku ini sangat bermanfaat bagi para mahasiswa, akademisi maupun praktisi yang dengan sengaja ditulis menggunakan gaya bahasa yang ringan agar lebih mudah dipahami secara simultan.

Rancangan dan *draft* buku ini telah saya berikan kepada mahasiswa terutama yang mengambil mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro, Makro, Ilmu Alamiah Dasar, Perekonomian Indonesia dan beberapa rekan sejawat. Ternyata materi dalam buku ini disambut dengan gegap gempita oleh para mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut. Input dari para mahasiswa dan kolega dosen tersebut menjadi bahan pertimbangan serius serta masukan yang amat bernilai

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

bagi saya. Para mahasiswa dan rekan sejawat dosen inilah yang dengan penuh semangat mendorong agar buku ini segera dipublikasi. Untuk itu, kepada merekalah saya haturkan beribu terima kasih.

Saya mengucapkan terimakasih yang tulus kepada Dr. Made Mangku Pastika, MM Gubernur Bali Periode 2008-2018 yang saat ini menjabat sebagai anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, yang ditengah kesibukannya menjalankan amanah dan *Swadharmaning Negara* masih menyempatkan diri untuk membaca dan memberi sambutan serta komentar yang konstruktif tentang buku ini. Sambutan dan komentar yang diberikan amat sangat berharga bagi saya, dan tentu juga bagi pembaca sekalian.

Sebuah kreasi sebetulnya cukup sulit untuk diinterpretasikan sebagai upaya satu orang saja, tanpa bantuan orang lain. Demikian pula pada buku ini. Buku ini tidak akan mungkin rampung tanpa ada motivasi yang simultan dan berkelanjutan dari berbagai pihak. Saya menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada rekan sejawat saya di Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata Universitas Hindu Indonesia I Putu Nuratama, SE.,M.Si, Ak., CA dan I Gde Indra Surya Diputra, SE.,M.Si yang telah membantu terkait proses pengumpulan data, mengumpulkan referensi, saran dan koreksi yang diperlukan.

Terimakasih yang mendalam Penulis haturkan kepada Rektor Universitas Hindu Indonesia Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, MS atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk ikut serta meramaikan sumbangsih

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

*ngayah* kepada civitas akademika dan masyarakat melalui kontribusi riil dalam wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi salah satunya penelitian yang mana dapat penulis kejewantahkan melalui publikasi dalam buku ini. Kepada Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata UNHI Dr. I Gusti Ayu Wimba ,MM penulis ucapkan terimakasih atas ijin, dorongan dan motivasi yang diberikan selama proses penyusunan buku ini. Kepada penerbit UNHI Press, saya mengucapkan terima kasih atas kesediannya menerbitkan buku ini. Terima kasih kepada segenap Tim Pengelola UNHI Press yang di komandoi oleh Bapak Dr. I Wayan Wahyudi. S.Si., MSi yang banyak membantu dalam proses penerbitan buku ini sehingga buku ini layak menjadi konsumsi public dan memungkinkannya buku ini sampai ke tangan pembaca sekalian.

Secara terkhusus, saya ingin menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada istri tercinta dr. Luh Gede Pradnyawati, M.Kes yang telah dengan sabar dan selalu mendorong saya untuk selalu berkarya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai dosen maupun juga sebagai bagian parsial dari *krama* nusantara. Ia selalu mengingatkan hasrat untuk menulis buku ini ritatkala saya terhanyut dalam kesibukan mengerjakan pekerjaan yang lain. Dalam kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan *matur suksma* kepada Putu Oka Tirtayasa, SE Ayahandaku yang telah memberikan teladan dan kerangka dasar berpikir logis dalam mengarungi kehidupan menuju kesuksesan baik lahir maupun bathin. Kepada Dr. Made Heny Urmila Dewi, SE.,M.Si, ibunda tercinta, yang telah melahirkan, membesarkan dan selalu memotivasi saya untuk terus

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

berkarya, menulis serta iringan doa yang tanpa henti untuk itu saya menghaturkan *suksma dahat*. Kepada kedua mertuaku, I Ketut Sumarya, SE beserta Ni Putu Martini Dewi, SE., M.Si, saya tak lupa saya haturkan *agunging panuwun* atas doa dan berkah pengestunya.

Saya sangat menyadari bahwa dalam proses penyusunan, analisis maupun penyajian, buku ini masih jauh dari kata paripurna. Tiada gading yang tak retak itulah kata pepatah namun berupaya mencari gading yang tak retak sudah saya upayakan sedemikian rupa. Segala masukan, saran, komentar yang bersifat konstruktif akan sangat saya terima dengan rasa senang hati.

Akhir kata, segala kekurangan maupun kesalahan adalah tanggung jawab saya selaku penulis. Akan tetapi, jikalau terdapat keabsahan dalam buku ini itu semata hanya karena *Asung Kertha Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa*. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian dan mampu menjadi *setetes air bagi samudera ilmu, Astungkara ...*

Br. Buana Shanti Padang Sambian  
Denpasar, 26 Mei 2021  
Penulis,

Putu Krisna Adwitya Sanjaya

## DAFTAR ISI

Sambutan-----	v
Prakata-----	vii
Daftar Isi-----	xiii
Daftar Tabel -----	xvi
Daftar Gambar -----	xvii
<b>BAB I HUTAN ITU -----</b>	<b>1</b>
1.1 Awalan -----	2
1.2 Ekosistem Hutan-----	12
1.3 Kontribusi Sumber Daya Alam -----	14
1.4 Manajemen Sumber Daya Alam dan Hutan -----	18
<b>BAB II EKONOMIKA DAN HUTAN LESTARI -----</b>	<b>30</b>
2.1 Pembangunan Berkelanjutan -----	30
2.2 Produk Domestik Regional Bruto ---	37
2.3 Demografi -----	46
2.4 Desentralisasi -----	52
2.5 Desentralisasi Dalam Konteks Pengelolaan Lingkungan Hidup ----	62
2.6 Nilai Ekonomi Sumber Daya Hutan -	70
2.7 Kebijakan Tarif dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan -----	76
<b>BAB III BALI DAN KELESTARIAN HUTAN</b>	<b>80</b>
3.1 Selayang Pandang Pulau Bali -----	80
3.2 Kehutanan di Pulau Bali-----	84
3.3 Kearifan Ekologi Hindu di Pulau Bali	98

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

3.4	<i>Local Genius</i> -----	106
3.5	<i>Wana Kerthi</i> -----	110
3.6	<i>Tri Hita Karana</i> -----	113

**BAB IV INDIKATOR SOSIAL-EKONOMI**

	<b>PENENTU HUTAN LESTARI</b> -----	118
4.1	Prolog-----	118
4.2	Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Kelestarian Hutan di Provinsi Bali Tahun 1993- 2019-----	124
4.3	Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Kelestarian Hutan di Provinsi Bali Tahun 1993-2019-----	132
4.4	Otonomi Daerah Tidak Berpengaruh Terhadap Kelestarian Hutan di Provinsi Bali Tahun 1993-2019 -----	144
4.5	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Merupakan Determinan Yang Paling Berpengaruh Terhadap Kelestarian Hutan di Provinsi Bali Tahun 1993-2019-----	152

**BAB V EPILOG** ----- 158

5.1	Refleksi-----	158
5.2	Yang Harus Dilakukan -----	163

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

DAFTAR PUSTAKA-----	168
GLOSARIUM -----	178
TENTANG PENULIS-----	191

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Negara UNFCCC ( <i>United Nation Framework Convention on Climate Change</i> ) -----	4
Tabel 1.2	Distribusi Luasan Hutan Dunia -----	7
Tabel 1.3	Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Berbagai Provinsi -----	20
Tabel 3.1	Kerusakan Lahan Hutan di Provinsi Bali--	88
Tabel 3.2	Luas Kawasan Hutan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2018 -----	91
Tabel 4.1	Sepuluh Prinsip Pengelolaan Hutan Lestari FSC -----	120
Tabel 4.2	Hasil Uji Regresi <i>Ordinary Least Square</i> dengan Model Semilog Variabel Kelestarian Hutan dengan masing-masing Variabel Bebas -----	122
Tabel 4.3	Hasil Perhitungan Nilai <i>Standardized of Coefficient Beta</i> -----	152

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hutan yang masih Hijau dan Lestari --	6
Gambar 1.2	Kegiatan konservasi Hutan di Kubu Kabupaten Karangasem.-----	22
Gambar 1.3	Aktifitas mereresik di Hutan kawasan Desa Sidan Kabupaten Gianyar-----	23
Gambar 2.1	Tiga Pilar Pembangunan Berkelanjutan	35
Gambar 2.2	Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Bali Tahun 2015-2019-----	45
Gambar 2.3	Pekembangan Jumlah Penduduk Provinsi Bali Tahun 2015-2019 -----	51
Gambar 3.1	Peta Pulau Bali -----	82
Gambar 3.2	Kawasan Hutan Kintamani-----	96
Gambar 3.3	Kawasan Hutan Melaya -----	96
Gambar 3.4	Kawasan Hutan di daerah Batur, Kintamani Kabupaten Bangli -----	90
Gambar 3.5	Barang Bukti Hasil Pembalakan liar ---	92
Gambar 3.6	Kerusakan Hutan Di Provinsi Bali 2014-2018-----	93
Gambar 3.7	Kekeringan Hutan di Taman Nasional Bali Barat -----	94
Gambar 3.8	Kekeringan Hutan yang meluas di Kawasan Hutan Bali Barat -----	95
Gambar 3.9	Kebakaran hutan di lereng bukit abang Karangasem -----	95
Gambar 3.10	Hutan Mangrove di Kota Denpasar ---	96
Gambar 3.11	Ritualisme -----	99
Gambar 3.12	Pura Pucak Sari-----	100

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

Gambar 3.13	Pura Sabang Daat -----	101
Gambar 3.14	Pura Mekori -----	101
Gambar 3.15	Kawasan Hutan yang masih Lestari di Desa Tenganan Pagringsingan -----	110
Gambar 3.16	Kegiatan Upakara Wana Kertih di Kabupaten Karangasem -----	113
Gambar 4.1	Hipotesis U terbalik Kuznets-----	127
Gambar 5.1	Upaya Konservasi Hutan Bakau di Bali dengan Menggandeng Mega Bintang Sepak Bola Cristiano Ronaldo -----	159
Gambar 5.2	Tata Kelola Hutan Lestari -----	164

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*



# BAB I

## HUTAN ITU ...

### 1.1 Awalan

Sumber daya alam merupakan unsur lingkungan hidup manusia yang sangat penting. Manusia hidup dan berkembang dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada disekitarnya atau lingkungan yang meliputi tanah, air, udara, flora, fauna, mikroorganisme, mineral dan energi. Sumber daya alam dan lingkungan tidak dapat dilepaskan peranannya sebagai sumber kehidupan serta sumber pendapatan bagi proses pembangunan pada suatu negara. Bahkan lebih dari tiga dekade yang lalu, sejak isu lingkungan hidup untuk pertama kali secara resmi menjadi perhatian dunia dalam konferensi internasional yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Stockholm, Swedia pada tahun 1972 hingga yang terakhir adalah UNFCCC (*United Nation Framework Convention on Climate Change*) di Nusa Dua, Badung, Bali pada akhir tahun 2007. Ada kesamaan konferensi tingkat tinggi dunia tersebut membahas mengenai kerusakan lingkungan yang terjadi akibat dari industrialisasi yang berorientasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan aspek lingkungan sehingga mengakibatkan iklim dunia menjadi berubah seperti sekarang ini atau yang disebut dengan pemanasan global (*global warming*).

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

Untuk mencapai tujuan bersama tersebut perlu menekankan bahwa upaya melindungi sistem iklim bumi merupakan kewajiban bersama semua negara, namun kewajiban tersebut dibedakan antara negara maju dan negara berkembang dengan prinsip *common but differentiated responsibilities* (CDR). Prinsip CDR mengacu kepada fakta bahwa permasalahan tertentu dapat mempengaruhi dan dipengaruhi bersama oleh seluruh negara walaupun dalam skala yang berbeda dan oleh karenanya tanggung jawab harus dibedakan dan tingkat kontribusi para negara untuk mengatasi permasalahan tersebut tidak harus setara. Konsep CDR merupakan gabungan dari isu bersama dan isu keadilan. Di sini UNFCCC (*United Nation Framework Convention on Climate Change*) mendorong peran aktif negara maju untuk mengurangi emisinya masing-masing negara-negara tersebut dalam dilihat dalam tabel 1.1 . Negara-negara tersebut di dalam UNFCCC terdiri dari negara anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) ditambah 12 negara Eropa Tengah dan Eropa Timur yang dikategorikan dalam fase transisi ekonomi dari Eropa Tengah dan eropa Timur.

HUTAN LESTARI  
Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya

**Tabel 1.1 Daftar Negara UNFCCC (*United Nation Framework Convention on Climate Change*)**

No	Negara	Target Emisi (% dari Th. 1990)	No	Negara	Target Emisi (% dari Th. 1990)
1	Amerika Serikat	93	21	Latvia*	92
2	Australia	108	22	Liechtenstein	92
3	Austria	92	23	Lithuania*	92
4	Belanda	92	24	Luxemburg	92
5	Belgia	92	25	Monako	92
6	Bulgaria*	92	26	Norwegia	101
7	Denmark	92	27	Perancis	92
8	Estonia	92	28	Polandia	94
9	Rusia*	100	29	Portugal	92
10	Finlandia	92	30	Ceko*	92
11	Hungaria*	94	31	Rumania*	92
12	Inggris Raya	92	32	Selandia Baru	100
13	Irlandia	92	33	Slovenia*	92
14	Islandia	110	34	Slowakia*	92
15	Italia	92	35	Spanyol	92
16	Jepang	94	36	Swedia	92
17	Jerman	92	37	Swiss	92
18	Kanada	94	38	Ukraina*	100
19	Uni Eropa	92	39	Yunani	92
20	Croatia*	95			

Sumber : Maryudi, 2016

Keterangan : \* Negara dalam transisi ekonomi

Ketika pembicaraan tentang adanya pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim dunia, faktor sumber daya alam berupa hutan yang menjadi fokus perhatian untuk mengurangi dampak pemanasan global tersebut. Sedemikian pentingnya keberadaan hutan bagi

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

peradaban umat manusia dan lingkungan. Hutan memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan tahap perkembangan ekonomi, dimana pada zaman dahulu hutan merupakan barang bebas (*free good*). Pada tahap ini hutan berperan sebagai sumber makanan. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, masyarakat mulai mengenal cara bercocok tanam. Pada tahap ini hutan mulai dilihat sebagai sumber faktor produksi yang paling utama bagi pertanian yaitu tanah, dan mulai membuka kawasan hutan untuk tempat bercocok tanam. Pemanfaatan hutan selanjutnya erat hubungannya dengan munculnya industri sebagai dimensi baru dalam kehidupan ekonomi manusia. Hutan tidak lagi semata-mata dipandang sebagai sumber diperolehnya tanah pertanian baru, melainkan sebagai sumber bahan mentah untuk industri.

Dalam konsep pembangunan berkelanjutan disebutkan bahwa pembangunan ekonomi dan sosial haruslah berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan generasi yang akan datang. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) adalah bagaimana memperbaiki kerusakan lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Untuk sebagian orang, pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana mencari jalan untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang, tanpa menghabiskan modal alam (Erlangga, 2005).

## HUTAN LESTARI

### *Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang didalamnya berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam keterikatan alam dengan lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan mempunyai manfaat serta fungsi yang sangat berarti bagi kehidupan manusia. Disamping hasil nyata berupa kayu, fungsi hutan adalah fungsi perlindungan terhadap tanah dan air (*hidrologi*). Hutan juga berfungsi untuk konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya seperti fungsi bank plasma nuftah (genetik asli) keanekaragaman flora dan fauna, jasa lingkungan wisata alam, produsen oksigen, kesegaran udara sehingga hutan di beri sebutan paru-paru dunia.



Gambar 1.1 Hutan yang masih Hijau dan Lestari  
(Sumber : indonesia.go.id)

Hutan yang saat ini merupakan resultan dari evolusi jutaan tahun, terbentuk dari perubahan siklus iklim dingin periode glasial ke iklim hangat interglasial

HUTAN LESTARI  
Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya

10-15 ribu tahun yang lalu membentuk hutan seluas 6 miliar Ha atau sekitar 45 persen dari luas daratan planet bumi (FAO dalam Maryudi, 2016). Selama 10 ribu tahun terakhir, siklus perubahan iklim dan suhu bumi terus mempengaruhi kondisi sumber daya hutan dan aktifitas umat manusia mulai berimplikasi pada pengurangan luas hutan. Sebaran hutan tidaklah merata antar negara yang mana lebih dari 50 persen keseluruhan hutan dunia berada hanya di lima negara yaitu : Rusia, Brazil, Kanada, Amerika Serikat dan China. Dalam tataran global Amerika Serikat merupakan produsen kayu terbesar, sedangkan Kanada merupakan pengeksport kayu terbesar. Luas Hutan Indonesia sendiri hanya sekitar 2 persen dari total luas hutan di dunia. Namun demikian, hutan Indonesia dan hutan-hutan tropika basah di negara lain mempunyai peran penting karena kekayaan alam keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya.

**Tabel 1.2 Distribusi Luasan Hutan Dunia**

No.	Negara	Luas Hutan (x 1000 Ha)	Prosentase	
1	Rusia	809.090	20.06	53.30
2	Brazil	519.522	12.88	
3	Kanada	310.134	7.69	
4	Amerika Serikat	304.022	7.54	
5	China	206.861	5.13	
6	Kongo	154.135	3.82	46.70
7	Indonesia	94.432	2.34	
8	± 200 Negara Lainnya	1.634.864	40.54	
Total Dunia			4.033.060	
		100		

Sumber : *Food and Agriculture Organization, 2011*

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

Disaat eksplanasi terhadap hutan semakin beragam dan kompleks, umat manusia di muka bumi berada dalam era dimana perhatian publik terhadap penghancuran hutan, hilangnya spesies, menurunnya struktur ekologis, fungsi dan kemampuan untuk menyediakan habitat bagi flora dan fauna dan sebagainya. Organisasi lingkungan *World Wide Fund for Nature*, (2004) menyatakan bahwa sekitar 50 persen dari luasan hutan primer telah hilang semenjak ideologi pembangunan ekonomi diperkenalkan setelah perang dunia kedua. Beberapa negara yang dulunya memiliki hutan tropis seperti Bangladesh, El Savador, Benin, Toga, Siera Leone, Haiti dan Srilanka kini hampir tidak memiliki hutan primer sama sekali.

Terkait dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan maupun hutan sebagai paru-paru dunia telah banyak dilakukan oleh beberapa kalangan dengan metode, sistem termasuk kearifan lokal yang dimiliki oleh masing-masing termasuk di Indonesia yang memiliki kuantitas hutan yang masih cukup luas seperti di Bali pada khususnya bahasan seputar penyelamatan lingkungan ternyata sudah diwariskan sejak jaman dahulu. Ini terbukti dari adanya ritual khusus pada hari Raya *Tumpek Wariga* setiap 6 (enam) bulan sekali yang bertujuan untuk peringatan pada tumbuh-tumbuhan yang secara tidak langsung merupakan pengejewantahan terhadap kelestarian lingkungan. Selain itu melalui konsep *Tri Hita Karana* juga menjadi pedoman mengenai konsep hubungan antara manusia, alam serta Tuhan, sehingga di Bali unsur alam atau penyelamatan lingkungan ini sudah digariskan sejak dahulu hingga

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

sekarang *Tri Hita Karana* berasal dari kata *Tri* yang berarti tiga, *Hita* yang berarti kebahagiaan dan *Karana* yang berarti penyebab, dengan demikian *Tri Hita Karana* berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan. Konsep kosmologi *Tri Hita Karana* merupakan falsafah hidup tangguh. Falsafah tersebut memiliki konsep yang dapat melestarikan keanekaragaman budaya dan lingkungan dalam era globalisasi. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) adalah bagaimana memperbaiki kerusakan lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Untuk sebagian orang, pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana mencari jalan untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang, tanpa menghabiskan modal alam. Pembangunan di bidang ekonomi yang berhasil akan berarti meningkatkan kemampuan masyarakat untuk melindungi lingkungannya

Pembangunan di bidang ekonomi yang berhasil akan berarti meningkatkan kemampuan masyarakat untuk melindungi lingkungannya, sehingga pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dapat tercapai dalam proses pembangunan ekonomi. Pembangunan berkelanjutan selalu diasosiasikan dengan pendekatan yang menekankan pada pemberdayaan masyarakat lokal, serta meningkatkan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan dan pembangunan lingkungan. Pertimbangan pendapat ini adalah bahwa masyarakat yang tinggal diwilayah tersebut akan terkena dampak pembangunan sehingga harus mampu mengantisipasi

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

kemungkinan dampak negatifnya. Untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat lokal, diperlukan desentralisasi dan dekonsentrasi proses pengambilan keputusan dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal (daerah).

Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan juga ekonomi masyarakat, menjadi tekanan terhadap pemanfaatan sumberdaya alam semakin meningkat. Peningkatan laju pertumbuhan penduduk akan menuntut ketersediaan pemenuhan alat pemuas dari yang paling mendasar (*basic needs*) sampai yang bersifat eksklusif (*superior*). Peningkatan kebutuhan ini menjadikan manusia dengan berbagai peran dan kapasitas yang dimilikinya memanfaatkan potensi sumber daya alam dan lingkungan sebagai strategi praktis dalam memenuhi kebutuhannya. Motivasi dan teknologi yang dipergunakan dalam eksploitasi sumber daya alam ini akan menjadi kunci seberapa besar tekanan terhadap sumberdaya alam dan lingkungan akan terjadi. Termasuk disini adalah peningkatan terhadap pemanfaatan lahan hutan sebagai tempat membuka lahan pertanian baru serta hasil-hasil hutan sehingga penduduk merupakan aktor utama terhadap keberadaan hutan.

Secara umum banyak kegiatan manusia berhubungan erat dengan hutan baik sebagai sumber air tanah, pertanian, pariwisata dan iklim makro yang sangat mempengaruhi bagi kehidupan manusia. Hal ini sangat berperan besar terhadap kelestarian hutan berupa gangguan keamanan hutan. Manusia merupakan ancaman yang sangat besar bagi kelestarian hutan dan ancaman ini semakin meningkat dengan kondisi sosial,

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

budaya, masyarakat, kondisi lingkungan di sekitar hutan, ekonomi yang semakin parah akibat hancurnya dunia pariwisata Bali dan rasa keamanan wisatawan yang semakin pudar pasca Tragedi Bom Bali I tahun 2002 dan Tragedi Bom Bali II tahun 2005 yang mempengaruhi perekonomian Bali, serta kesadaran masyarakat terhadap fungsi hutan yang masih rendah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 sebagaimana yang telah direvisi ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa nuansa baru bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-Undang ini telah mengubah paradigma lama pelaksanaan otonomi daerah, dari otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab dengan dititikberatkan pada daerah tingkat II menjadi paradigma baru yaitu otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang diletakkan pada daerah kabupaten dan kota.

Otonomi daerah dimaksudkan untuk mendekatkan proses pengambilan keputusan kepada kelompok masyarakat yang paling bawah, dengan memperhatikan ciri khas budaya dan lingkungan setempat, sehingga kebijakan publik dapat lebih diterima dan produktif dalam memenuhi kebutuhan serta rasa keadilan masyarakat akar rumput. Pemberian kewenangan kepada daerah dalam konteks pengelolaan sumber daya alam khususnya hutan dapat menjadi sebuah harapan sekaligus ancaman. Harapan ini bertumpu pada asumsi bahwa pemerintah daerahlah yang lebih mengetahui kondisi lapangan dan lebih peka terhadap masalah lingkungan. Selain itu orang daerah tidak mungkin akan

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

mengorbankan lingkungan hidupnya sendiri (apalagi berlaku adanya kontrol yang kuat dari rakyat). Di sisi lain otonomi daerah akan menjadi ancaman bagi kelestarian lingkungan hidup apabila anggapan diatas tidak dilaksanakan dengan penuh komitmen dan rasa tanggung jawab akan sumber daya alam dan lingkungan.

Sebagai salah satu kekuatan utama pembangunan, maka hutan perlu di jaga keberadaannya, ditingkatkan potensi, mutu, jumlah dan kualitasnya. Hal ini dimaksudkan agar sumber daya hutan dapat menjadi subyek dan obyek pembangunan dalam artian dapat mendukung dan berperan pada penyelenggaraan pembangunan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

## **1.2 Ekosistem Hutan**

Ekosistem merupakan dasar fungsional yang meruapakan lingkungan bagi makhluk hidup maupun benda-benda mati yang masing-masing berkontribusi dalam menentukan sifat-sifat anggotanya dan keduanya diperlukan untuk menjaga kelestarian hidup di bumi (Simon, 2008). Ekosistem mempunyai dua komponen, yakni komponen *autotrophic* dan komponen *heterotrophic*. Komponen *autotrophic* adalah makhluk hidup yang mampu menangkap energi matahari dan mengolah sendiri makanan dari susbtansi anorganik sederhana, sedangkan komponen *heterotrophic* adalah makhluk hidup yang menggunakan, mengatur kembali dan mendekomposisi material yang sudah jadi yang dihasilkan oleh komponen *autotrophic*.

Secara garis besar, ekosistem yang terdapat di permukaan bumi ini dapat dibedakan antara ekosistem

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

perairan dan ekosistem daratan. Ekosistem daratan dapat digolongkan menurut jenis makhluk hidup yang menjadi objek studi. Dari sudut ini antara lain dikenal adanya ekosistem ekologi dan ekosistem manusia. Hutan sebagai salah satu bentuk ekosistem daratan, dapat dibedakan antara : 1) substansi abiotik, baik berupa bahan dasar organik maupun anorganik seperti tanah dan batuan induk, 2) produsen yakni semua jenis vegetasi yang bersifat *autotrophic* , 3) konsumen makro dan semua jenis binatang dan 4) dekomposer yaitu semua keluarga jamur dan bakteri.

Setiap ekosistem, baik ekosistem sosial maupun ekologi, dapat dianalisis melalui struktur, fungsi dan dinamikanya. Struktur ekosistem menggambarkan pola saling berkaitan diantara komponen yang membentuk ekosistem tersebut. Komponen ekosistem adalah tanah, air dan makhluk hidup yang berada di dalamnya.

Hutan merupakan ekosistem yang terbentuk oleh adanya asosiasi antara masyarakat tumbuh-tumbuhan dan masyarakat binatang yang hidup di dalamnya yang luasnya sedemikian rupa sehingga dapat menciptakan iklim mikro yang khas. Karena merupakan asosiasi, maka antara anggota masyarakatnya terjadi saling interaksi, saling memerlukan sampai batas-batas tertentu juga ada saling mengorbankan kepentingan individu untuk kepentingan bersama. Namun demikian, di lain pihak antara anggota masyarakat yang menyusun hutan juga terjadi persaingan untuk mempertahankan hidup.

Ekosistem hutan bersifat responsif terhadap perubahan iklim, aktifitas geomorfologi yang mengubah fisiografi dan tanah serta menciptakan evolusi untuk

perubahan flora maupun fauna. Klasifikasi ekosistem hutan dapat beraneka ragam bergantung pada tujuan untuk membuat klasifikasi tersebut.

### **1.3 Kontribusi Sumber Daya Alam**

Kontribusi sumber daya alam dalam pembangunan perekonomian hingga dekade 1930-an, lazimnya diterangkan bahwa *regres* suatu perekonomian maupun adanya peluang untuk dapat berkembang bagi suatu masyarakat dapat dilihat dari sedikit banyaknya sumber-sumber alam yang ada di daerah tersebut. Hingga saat ini masih ada yang mengatakan bahwa suatu Negara mengalami suatu kemiskinan adalah karena tidak cukupnya sumber-sumber alam yang dimilikinya. Memang benar karena terbatasnya tingkat penciptaan di Negara yang tingkat pendapatannya masih rendah disebabkan karena masih terbatasnya sumber alam yang tersedia baik secara kualitas maupun kuantitas. Tanpa adanya sumber alam yang minimum maka tidak banyak harapan untuk *men-drive* laju perkembangan struktur perekonomian. Alam dan sekitarnya membatasi kemungkinan usaha-usaha manusia untuk hidup dan mencapai sesuatu, tetapi kuantitas dan kualitas sumber-sumber alam rill yang dimiliki oleh suatu Negara atau suatu wilayah itu lebih merupakan hasil daripada sebab perkembangan perekonomian (Irawan & Suparmoko, 2002).

Tersedianya sumber daya alam itu sendiri tidaklah cukup untuk mengadakan perubahan perekonomian dan juga tidak adanya atau kelangkaan sumber daya alam itu sendiri bukan merupakan sebab dan halangan untuk

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

mencapai progress ekonomi. Peranan relatif dari sumber alam dalam perkembangan perekonomian memiliki *trend* untuk turun bila perekonomian itu semakin berkembang. Dengan naiknya *income*, maka *marginal propencity to consume* pada sumber-sumber alam akan tampak berkurang, lagi pula input dari *factor* produksi per satuan output untuk sumber-sumber alam akan menurun pula. Turunnya kontribusi penting dari sumber-sumber alam terutama yang berhubungan dengan *income elasticity of demand* yang relatif rendah terhadap *return* pertanian dan adanya restorasi dalam fungsi produksi yang disebabkan oleh kemajuan teknik yang baik dan juga oleh karena adanya pengelolaan sumber daya tanah yang lebih efisien.

Secara relatif kontribusi sumber daya alam memang akan semakin mengecil, tetapi bila diperhatikan bahwa semakin maju suatu perekonomian secara mutlak kuantitas dan varian sumber daya alam yang diolah sehingga berubah dari sumber daya alam yang potensial menjadi sumber daya alam yang riil sifatnya. Karena secara fakta akan timbul banyak kekhawatiran berhubung dengan semakin majunya perekonomian dan pembangunan ekonomi banyak sumber daya alam yang harus diolah sehingga akan mengurangi sumber daya alam yang ada, khususnya sumber daya alam yang bersifat tidak dapat diperbaharui demikian juga sumber daya alam yang dapat diperbarui akan semakin sulit didapat. Walaupun tidak segera habis bila dipakai terus menerus tetapi bila penggunaannya tidak hati-hati maka sumber daya jenis ini pun akan menjadi langka juga. Apabila sumber daya alam menjadi langka lantas

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan maupun pembangunan ekonomi itu sendiri? Sebenarnya mengenai varian dan kuantitas sumber daya alam dalam suatu Negara boleh dikatakan masih merupakan penaksiran saja (Irawan & Suparmoko, 2002). Oleh karena itu diperlukan survei dan inventarisasi sumber – sumber alam termasuk melibatkan para ahli untuk menjawab hal tersebut.

Secara jamak dikatakan bahwa perbedaan antara Negara-negara yang sudah maju dan Negara yang masih rendah incomenya tidaklah terletak pada ketersediaan sumber daya alam, akan tetapi terletak pada tingkat penggunaan sumber-sumber daya yang ada. Tidak tersedianya suatu material yang *urgent* dalam suatu daerah akan dapat diatasi oleh Negara-negara itu oleh penduduknya atau orang-orangnya yang bersifat kreatif dalam beradaptasi dengan alam sekitarnya. Apabila penduduknya telah mengembangkan kecakapan – kecakapan dan bakat-baktnya dan bila dalam adaptasi diri dengan alam sekitarnya itu bersifat agresif dan penuh fantasi, maka mereka akan menemukan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan mereka di lautan yang kemudian dapat membentuk kapal dagang yang progresif.

Istilah sumber daya alam tidak menunjukkan suatu zat atau senyawa maupun barang sesuatu yang ada dalam alam sekitar, tetapi menunjukkan fungsi-fungsinya di dalam memuaskan kebutuhan tertentu bagi manusia. Jadi persepsi sumber daya alam merefleksikan penafsiran manusia dalam korelasinya dengan kebutuhan-kebutuhannya. Oleh karena itu sumber daya alam tidak

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

hanya mencakup tanah, air, mineral, lingkungan hidup termasuk juga sumber daya hutan.

Urgensi sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan tidak hanya tergantung pada korelasinya yang kompleks. Korelasi ini juga dipengaruhi oleh tingkat kemudahan sumber daya alam itu diambil dan juga oleh keadaan pada waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Dengan demikian, keadaan alam yang membaik disuatu daerah tertentu yang belum tereksplorir belum dikatakan merupakan sumber – sumber alam jikalau fasilitas-fasilitas pengangkutan atau hotel-hotel belum tersedia bagi para pelancong yang mungkin sekali tertarik pada keadaan alam di daerah tersebut.

Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya (Alam & Hajawa, 2007). Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam dan *zone* inti serta *zone* rimba pada taman nasional. Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Sementara itu manfaat yang dapat diberikan oleh hutan lindung terutama adalah kontribusinya dalam fungsi hidrologi, sebagai perlindungan kawasan di bawahnya dari bahaya banjir dan erosi, walaupun disisi lain dapat dimanfaatkan hasil hutan non kayu yang dihasilkan oleh hutan lindung dan jasa lingkungan.

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

Penilaian ekonomi terhadap sumber daya hutan didasarkan atas manfaat yang dapat disumbangkan baik manfaat langsung maupun manfaat tidak langsung. Sumber daya hutan dapat dinilai berdasarkan :

- 1) Nilai penggunaan yang meliputi nilai penggunaan langsung misalnya hasil hutan kayu dan nilai hasil hutan non kayu dan nilai penggunaan tak langsung serta penggunaan pilihan
- 2) Nilai tanpa penggunaan yang meliputi nilai pewarisan dan nilai keberadaan

#### **1.4 Manajemen Sumber Daya Alam dan Hutan**

Hutan yang pada umumnya berada di pegunungan menjadi sumber pasokan air untuk keperluan hidup makhluk hidup yang ada di bumi ini, oleh karena itu sangat penting sekali keberadaan dan fungsi dari pada hutan itu sehingga perlu dikelola dengan tepat guna. Terkait dengan pembangunan kehutanan, kebijakan pemerintah di sektor kehutanan telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kehutanan 2006-2025. Dalam kaitan itu pula dimungkinkan instansi Kementerian Kehutanan melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Koordinator Perekonomian dalam merumuskan kebijakan di daerah. Kementerian Kehutanan dan Kementerian Dalam Negeri menyepakati pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Tertang dalam surat keputusan atau peraturan Menteri tentang pembentukan institusi KPH, yang dianggap cukup baik untuk mewujudkan

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

hutan yang lestari berbasis masyarakat dan lingkungan yaitu (Siagian, 2015) :

- 1) Peraturan perundangan : (a) Permenhut No. P.6/Menhut-II/2010 tentang Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP, (b) Rancangan peraturan bersama antara Menteri Kehutanan dan Menteri Dalam Negeri tentang Organisasi KPH, yang telah disampaikan Mendagri ke MenPAN RB melalui surat No. 061./4206/ sj TANGGAL 30 November 2009, telah ditanggapi oleh MenPAN RB melalui surat No. B/858/M.PAN-RB/4/2010 tanggal 13 April 2010. Namuntanggapan Kementerian PAN RB tersebut menyarankan bahwa Organisasi KPH berbentuk UPTD dan (c) Surat Menteri Kehutanan kepada Menko Perekonomian melalui surat No. S.254/Menhut-VII/2010 tanggal 20 Mei 2010, untuk memfasilitasi pertemuan antara Kementerian Dlam Negeri, Kementerian Kehutanandan Kementerian PAN RB, untuk mencaro solusi terbaik dan optimal bagi Organisasi KPH.
- 2) Surat Menhut kepada Para Gubernur/Bupati/Walikota seluruh Indonesia No. 272/Menhut-VII/2010 tanggal 8 Juni 2010, penegasan kepada Kepala Pemerintahan di Daerah untuk mendorong percepatan pembangunan KPH.
- 3) Penyiapan kelembagaan melalui pendekatan KPH Persiapan (KPHP) berupa KPH model yang telah dirintis sejak tahun 2007. Yang mana rintisan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) DI BERBAGAI Provinsi dapat disajikan pada tabel 1.1 beikut :

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

**Tabel 1.3 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Berbagai Provinsi**

No.	Provinsi	Lokasi KPH Model yang telah dirintis
1	Kalimantan Selatan	KPHP Unit IV Kabupaten Banjar
2	Lampung	KPHP Way Terusan Register 47, Lampung Tengah
3	Kalimantan Barat	KPHP Model Sintang, Kabupaten Sintang
4	Kalimantan Selatan	KPHP Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru
5	Sulawesi Selatan	KPHL Tana Toraja, Kabupaten Tana Totaja
6	Bali	KPHL Bali Barat Kabupaten Jembrana, Buleleng dan Tabanan
7	Nusa Tenggara Barat	KPHL Rinjani Barat, Kabupaten Lombok Barat
8	Aceh	KPHP Pocut Meurah Intan, Aceh Besar dan Pidie
9	Sumatra Utara	KPHP Mandailing Natal
10	Bengkulu	KPHP Muko-Muko, Bengkulu
11	Bangka Belitung	KPHL Bangka Tengah, Bangka Belitung
12	Kalimantan Timur	KPHP Tarakan, Kalimantan Timur
13	Gorontalo	KPHL III Pohuwato, Gorontalo
14	Sulawesi Utara	KPHP Poigar, Bolaang Mangondow dan Minahasa Selatan
15	Sulawesi Barat	KPHP Budong-lebbo, Kabupaten Mamuju
16	Sulawesi Tenggara	KPHP Unit III, Kabupaten Buton
17	Maluku	KPHP Sapalewa, Kabupaten Maluku Tengah
18	Sumatra Barat	KPH Kuantan, Kabupaten Sawahlunto-Sijunjung
19	Riau	KPHP Tasik Besar Serkap, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak
20	Kepulauan Riau	KPHL Karimun, Kabupaten Karimun
21	Jambi	KPHL Sungai Bram Hitam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat
22	Sumatra Selatan	KPHP Lakitan Kabupaten, Musi Rawas KPHP Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin
23	Kalimantan Tengah	KPHP Gunung Bondang, Kabupaten Murung Raya
24	Nusa Tenggara Timur	KPHP Rote Ndao, Kabupaten Rote-Ndao
25	Sulawesi Tengah	KPHP Unit V Dampelas Tinombo, Kabupaten Parigi
26	Papua	KPHP Yapen, Kabupaten Yapen Waropen
27	Papua Barat	KPHP Sorong, Kabupaten Sorong
28	Maluku Utara	KPHP Halmahera Tengah

Sumber : Dirjen KPH, Dephut 2010

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

Beberapa aktifitas yang mendasari kajian tentang pengelolaan dan pengembangan sumber daya alam diantaranya adalah konservasi, dilipisi dan persediaan. Konservasi sebagai penggunaan sumber daya alam untuk kebaikan secara maksimal, dalam kuantitas yang terbanyak dan untuk jangka waktu yang lama (Suparmoko, 2016). Lebih dari itu konservasi diartikan sebagai pengembangan dan perlindungan terhadap sumber daya alam. Konservasi juga merupakan suatu upaya untuk melakukan kegiatan preventif eksploitasi alam secara radikal sehingga dalam jangka panjang sumber daya alam tetap tersedia. Tindakan-tindakan konservasi dapat berupa : 1) melakukan perencanaan terhadap pengambilan sumber daya alam dengan pengambilan secara terbatas, 2) mengusahakan eksploitasi sumber daya alam secara efisien yakni dengan limbah sesedikit mungkin, 3) mengembangkan sumber daya alam alternatif sehingga sumber daya alam yang *limited* secara kuantitas dapat disubstitusikan dengan sumber daya alam lain yang sejenis, 4) menggunakan unsur-unsur teknologi yang sesuai dalam mengeksploitasi sumber daya alam agar dapat menghemat penggunaan sumber daya tersebut agar tidak merusak lingkungan dan 5) mengurangi, membatasi dan mengatasi pencemaran lingkungan.

Tindakan konservasi ini sangat perlu dilakukan khususnya bagi sumber daya alam yang sifatnya tidak dapat pulih dengan sendirinya. Tindakan konservasi bagi sumber daya alam yang pulih dapat dilakukan dengan lebih hati-hati, misalnya untuk konservasi hutan dapat

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

dilakukan dengan berbagai sistem tebang pilih, reboisasi dan penghijauan.



Gambar 1.2 Kegiatan konservasi Hutan di Kubu  
Kabupaten Karangasem.  
(Sumber : BPDAS & Hutan Lindung Unda Anyar- Bali)

Deplisi merupakan cara pengambilan sumber daya alam secara besar-besaran, yang biasanya demi memenuhi kebutuhan akan bahan mentah. Dalam proses pembangunan yang mengejar tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pelaksana justru mengarah kepada pengurusan isi alam sehingga terasa kurang adanya penghargaan terhadap sumber daya alam yang ada. Bagi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui deplisi berarti pengurusan sumber daya yang ada, sedangkan sumber daya alam yang pulih, deplisi walaupun dapat diimbangi dengan kegiatan konservasi, namun dampaknya terhadap lingkungan hidup masih akan tetap membekas dan membutuhkan waktu yang lama untuk

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

pemulihannya. Contoh penenbangan hutan secara masif, hal ini dapat menyebabkan adanya erosi, tetapi usaha penghijauan hanya dapat dilakukan dalam durasi waktu yang lama untuk memulihkan kesuburan tanah seperti sedia kala. Sesungguhnya kepunahan sumber daya alam pada dasarnya dapat disebabkan oleh masyarakat kapitalis yang bekerja untuk memaksimalkan profit, sehingga mereka ini berusaha untuk menggali sumber daya alam sebanyak mungkin dalam jangka waktu tertentu. Selain itu yang dapat menyebabkan kepunahan sumber daya alam adalah kelompok miskin yang terpaksa menguras sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang subsisten karena kemiskinannya tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan yang sesungguhnya adalah tempat mereka sendiri menumpang hidup.



Gambar 1.3 Aktifitas mereresik di Hutan kawasan Desa Sidan Kabupaten Gianyar (Sumber : BPDAS & Hutan Lindung Unda Anyar – Bali)

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

*Reserve* atau cadangan sumber daya alam merupakan sumber daya alam yang telah diketahui dan bersifat ekonomis. Meskipun secara teoritis sumber daya alam telah ditemukan, tetapi karena belum dapat diidentifikasi secara geologis dan belum diketahui penggunaannya serta masih berlimpah ruah adanya, maka ini belum tergolong dalam persediaan. Dengan kata lain sumber daya alam itu baru diketahui persediaanya setelah menjadi kepentingan manusia (Suparmoko, 2016).

Pengelolaan sumber daya alam hutan yang baik adalah dengan menempatkan kelestarian hutan sebagai landasan utamanya mengingat hal ini sangat terkait dengan kehidupan sosial dan ekosistem hutan itu sendiri yang harus terkelola sesuai dengan kondisi fisik wilayah maupun tuntutan sosial ekonomi masyarakat hal ini sering disebut dengan istilah pengelolaan sumber daya hutan (*forest resource management*) Simon (2008).

Walaupun strategi kehutanan sosial telah lama didengungkan, namun secara operasional bentuk pengelolaan sumber daya alam hutan masih belum mampu mempunyai sistem yang mantap. Tujuan penerapan sistem pengelolaan hutan yang beragam bentuk adalah untuk memaksimalkan produktifitas tiap jengkal kawasan hutan disesuaikan dengan kondisi tanah dan lahan serta faktor lingkungan setempat yang mempengaruhinya. Sebagai upaya untuk mengeliminasi kesenjangan dalam mengakses manfaat pembangunan hutan bagi masyarakat dilakukan langkah program kehutanan sosial yang berorientasi pada pelestarian

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

hutan dengan tujuan memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama yang hidup disekitar hutan (Usman, 2010).

Selain hal diatas pengelolaan dan pengembangan sumber daya alam hutan juga dapat dilakukan secara kolaboratif. Dalam perspektif sejarah, model pengelolaan hutan kolaboratif yang mulai dikembangkan di Kanada memiliki tujuan untuk mengikutsertakan semua peserta kolaborasi secara aktif dengan hak dan kewajiban untuk membangun hutan lestari. Sebuah kawasan hutan digolongkan sebagai hutan lestari apabila faktor-faktor sosial dan ekologi diperhitungkan. Faktor sosial berkaitan dengan kondisi masyarakat lokal, dimana program kolaborasi diimplementasikan. Masyarakat dengan pola pengetahuan dan kebiasaan lingkungan yang bersifat memelihara dan mencegah kerusakan secara tradisional. Faktor ekologi menjadi penting karena pertimbangan arif masyarakat tentang bagaimana menjaga keseimbangan ekologis, kapasitas adaptasi yang berkaitan dengan perubahan dan ketidakpastian.

Salah satu faktor penting dalam hubungannya dengan hutan lestari yang diupayakan melalui program kolaborasi antara berbagai pihak adalah faktor produksi. Faktor produksi sering menjadi kontra produktif dengan faktor sosial, faktor ekologi sebab dimensi produksi mengutamakan aspek pemanfaatan sumber daya hutan yang tersedia baik untuk kepentingan para kolaborator, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat disekitar dan di dalam hutan. Pola pemikiran pengelolaan hutan berkesinambungan yang mengikutsertakan berbagai pihak ini dengan mengadopsi aspek sosial,

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

ekonomi, ekologi terinspirasi oleh konsep pengembangan hutan kemasyarakatan yang dikemukakan oleh Westboy tahun 1968 (Haba, 2015).

Program kolaboratif bertujuan untuk mengikutsertakan berbagai pihak dalam merencanakan, mengelola dan mengevaluasi sebuah program secara bersama-sama. Prinsip kolaborasi di sektor kehutanan dapat meliputi enam kewenangan masing-masing yaitu :

- 1) Program kolaborasi mewajibkan kebersamaan para pihak yang memiliki bidang tugas dan yang sama dengan bidang tugas yang diemban. Para kolaborator berasal dari berbagai sektor usaha yang memiliki program kerja dan tujuan organisasi yang selaras dengan pemerintah atau pemilik program dan kebersamaan visi misi itu diintegrasikan dalam sebuah program utama sesuai dengan maksud kerjasama itu dilakukan.
- 2) Agar program kolaborasi dapat dilakukan dengan baik dan benar serta sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, maka eksistensi dan status para pihak haruslah setara.
- 3) Aspek penting dalam pola kolaborasi di sektor kehutanan adalah dibutuhkannya keterbukaan. Salah satu hambatan yang mencederai program kolaborasi di sektor kehutanan salah satunya adalah ketertutupan pihak pengambil inisiatif yang berada dibawah ikalatan kolaborasi.
- 4) Kemitraan dalam program kolaborasi secara ideal mengindikasikan dan mengharuskan adanya unsur kebersamaan.

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

- 5) Tanggungjawab adalah bagian penting dari sebuah organisasi, dimana semua elemen organisasi dan individual terlibat didalamnya. Berhasil atau tidaknya suatu program kolaborasi karena kurang atau tidak adanya tanggungjawab antar pihak terutama pemerintah yang menginisiasi program tersebut. Tanggungjawab disini melingkupi : komitmen dan sikap yang konsisten untuk menjaga perjanjian kerjasama yang telah disepakati (misalkan : isu keuangan, keberlanjutan dukungan dan lain sebagainya).
- 6) Tujuan penting dari kolaborasi disektor kehutanan adalah mensejahterakan masyarakat di dalam dan disekitar hutan. Pola sentralistik yang cukup lama, diadopsi dan diaktualisasikan dalam program nasional pembangunan masyarakat desa hutan. Model sentralistik (*top down*) sejatinya telah mencederai nilai kreatifitas masyarakat dan membuat masyarakat bersikap pasif dan menerima program-program dari luar tanpa ikut memikirkan dan merencanakannya. Reorientasi pendekatan yang berpola kolaboratif yang partisipatif (*bottom up*) lebih mampu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggunakan segala potensinya dan konsep pemberdayaan memiliki landasan sosial yang kuat, sebab masyarakat merasa memiliki, bertanggung jawab dan aktif berpartisipasi dalam program-program pemberdayaan yang dilakukan di wilayah mereka (Haba, 2015).

Disadari bahwa masalah-masalah sosial ekonomi masyarakat kini merupakan prasyarat dasar tercapainya

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

kelestarian pengelolaan hutan, bagaimanapun baiknya penerapan aspek teknis pengelolaan hutan, apabila masalah sosial tidak terkelola dengan baik maka semuanya tidak akan ada artinya, mengingat seluruh hasil kerja pengaturan kelestarian hutan berdasar teori silvikultur sebaik apapun kualitasnya akan ditentukan oleh besarnya tingkat gangguan dan jaminan keamanan hutan yang diberikan oleh masyarakat (Usman, 2010).

Cita-cita ideal membangun hutan lestari sehingga hutan yang masih utuh, atau hutan yang telah digarap memberikan manfaat, tidak dapat dikerjakan oleh pemerintah sendiri, tetapi mesti mengikutsertakan berbagai pihak yang berkompeten di bidangnya. Program kolaborasi atau manajemen kolaborasi dinamakan juga partisipasi atau program bersama masyarakat di sektor kehutanan. Pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan adalah sebuah prinsip yang terkesan mudah dibicarakan tetapi cukup sulit untuk dikejawantahkan. Ada empat elemen dasar dari pengelolaan sumber daya alam, yaitu pertama adalah integritas fungsi ekologi yang berkelanjutan, kedua adalah sumber daya manusia yang berkelanjutan dan adil menggunakan sumber daya alam, ketiga yakni manajemen pengelolaan sumber daya alam yang terpadu dan yang keempat adalah informasi serta partisipasi yang adil bagi pemangku kepentingan (Barber dalam Ridho *et al.* 2015).

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*



## BAB II

# EKONOMIKA DAN HUTAN LESTARI

### **2.1 Pembangunan Berkelanjutan**

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam melaksanakan pembangunan nasional perlu memperhatikan tiga pilar pembangunan berkelanjutan secara seimbang, hal ini sesuai dengan hasil Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup yang diadakan di Stockholom, Swedia pada tahun 1972 dan suatu Deklarasi Lingkungan Hidup Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992 yang menyepakati prinsip dalam pengambilan keputusan pembangunan harus memperhatikan dimensi lingkungan dan manusia serta KTT Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg, Afrika Selatan pada tahun 2002 yang membahas dan mengatasi kemerosotan lingkungan hidup.

Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya adalah merupakan strategi pembangunan yang

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

memberikan semacam ambang batas (limit) pada laju atau proses Bergeraknya pemanfaatan ekosistem alamiah serta sumber daya alam dan lingkungan yang ada didalamnya. Ambang batas ini tidaklah bersifat mutlak atau kaku (*absolute*), melainkan merupakan batas yang luwes dan dinamis (*flexible*) yang bergantung pada kondisi teknologi dan sosial ekonomi masyarakat sehingga paham tentang pemanfaatan sumber daya alam, serta kemampuan biosfer untuk menerima dampak kegiatan manusia. Dengan kata lain, adalah suatu strategi pemanfaatan ekosistem alamiah sedemikian rupa, sehingga kapasitas fungsionalnya untuk memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia tidak rusak.

Ada dua hal yang menjadi prinsip pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, pertama adalah bagaimana kita mampu mengelola sumber daya alam yang dapat diperbaharui dengan memperhatikan ambang batas regenerasinya dan kedua adalah bagaimana kita mampu mengelola sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dengan memperhatikan potensi substitusinya dan ambang batas penyerapan limbah yang dihasilkan dalam proses produksi. Pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) membutuhkan perhatian yang jauh lebih besar pada masalah sosial budaya dan ekonomi yang timbul secara bersamaan dengan masalah kerusakan lahan dan media lingkungan sebagai wadah sumber daya alam.

Konsep pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam serta sumber daya manusia,

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

dengan menyerasikan sumber alam dengan manusia dalam pembangunan (Salim, 2020). Secara konseptual, pembangunan berkelanjutan sebagai transformasi progresif terhadap struktur sosial, ekonomi, politik. Hal tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kepentingannya tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang.

Tujuan pembangunan berkelanjutan, Tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) menjadi agenda internasional. SDGs disusun oleh PBB dengan melibatkan 194 negara, *civil society*, dan berbagai pelaku ekonomi seluruh dunia. Agenda tersebut untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. Terdapat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu: 1) Tanpa kemiskinan, mengentaskan segala bentuk kemiskinan di seluruh tempat. 2) Tanpa kelaparan, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan. 3) Kehidupan sehat dan sejahtera, menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia. 4) Pendidikan berkualitas, memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. 5) Kesetaraan gender, mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. 6) Air bersih dan sanitasi layak, menjamin akses air dan sanitasi untuk semua. 7) Energi bersih dan terjangkau, memastikan akses energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan, dan modern. 8) Pekerjaan

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

layak dan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, serta lapangan pekerjaan yang layak untuk semua. 9) Industri, inovasi dan infrastruktur, membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan, dan mendorong inovasi. 10) Berkurangnya kesenjangan, mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara. 11) Kota dan komunikasi berkelanjutan, membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan. 12) Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, memastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan. 13) Penanganan perubahan iklim, mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya. 14) Ekosistem laut, perlindungan dan penggunaan samudra, laut, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. 15) Ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan kepunahan keragaman hayati 16) Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif. 17) Kemitraan untuk mencapai tujuan, menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan.

Tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan upaya sinkronisasi, integrasi serta memberikan bobot yang seimbang antara tiga aspek pembangunan, yakni aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup (ekologi). Ketiga aspek tersebut harus terkait satu sama lain dan tidak saling dipertentangkan. Menempatkan aspek ekonomi semata sebagai sasaran utama pertumbuhan ekonomi dalam konsep pembangunan

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

adalah sebuah langkah keliru, sebab konsep ini dapat mengakibatkan kerugian yang sangat mahal di sisi sosial budaya dan lingkungan hidup. Dengan demikian pendekatan pembangunan perlu dilakukan secara holistik dan integratif antar tiga aspek pembangunan tadi. Namun sebenarnya memperhatikan aspek sosial budaya dan lingkungan hidup secara lebih serius adalah jauh lebih penting (dengan tanpa melupakan aspek ekonomi), sebab kedua aspek tersebut dapat lebih menjamin kelestarian aspek ekonomi.

Konsep pembangunan berkelanjutan memberikan implikasi adanya batas. Bukan batas *absolute*, akan tetapi batas yang ditentukan oleh tingkat masyarakat dan organisasi *social* mengenai sumber daya alam serta kemampuan biosfer menyerap berbagai pengaruh dari aktivitas manusia. Teknologi dan organisasi dapat dikelola dan ditingkatkan guna member jalan bagi era baru pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan dengan memenuhi kebutuhan dasar serta menyediakan kesempatan untuk memenuhi keinginan agar memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Dengan demikian strategi pembangunan berkelanjutan bertujuan mengembangkan keselarasan baik antar umat manusia maupun antara manusia dengan alam. Keselarasan tersebut tentunya tidak bersifat tetap, melainkan merupakan suatu proses yang dinamis. Proses pemanfaatan sumber daya, arah investasi, orientasi pengembangan teknologi, serta perubahan kelembagaan, diselenggarakan secara konsisten dengan kebutuhan masa kini dan masa depan. Oleh karena itulah dalam pembangunan berkelanjutan, proses

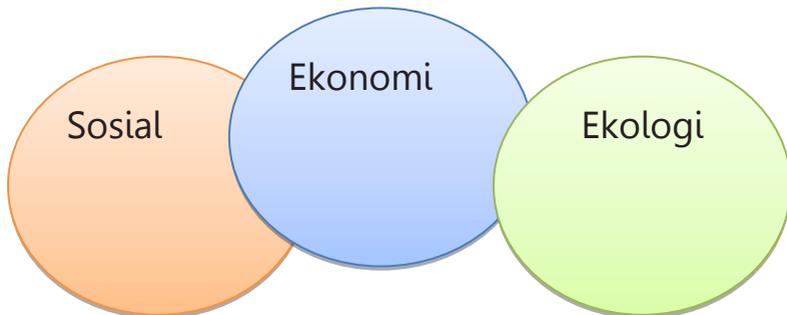
HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

pembangunan ekonomi harus disesuaikan dengan kondisi penduduk serta sumber daya alam dan lingkungan. Momentum pembangunan berkelanjutan terus bergulir sampai diselenggarakannya *United Nations Conference om Environmental and Development* (UNCED) di Rio de Janeiro pada Tahun 1992 yang menyoroti diskursus pembangunan berkelanjutan sebagai berikut :

- 1) Penegakan keterbatasan sumber daya alam
- 2) Kesetaraan manfaat antar generasi
- 3) Masalah lingkungan global dapat dipecahkan lewat koordinasi antara aktor publik dan aktor privat
- 4) Manajemen konservasi dan penggunaan sumber daya alam tidak dipandang saling bertolak belakang
- 5) Munculnya perhatian akan partisipasi publik, kesetaraan global dan transfer teknologi dari negara maju ke ke nagara berkembang

Dari UNCED, mulai muncul kepaahaman bahwa pembangunan berkelanjutan harus ditopang oleh tiga pilar utama yaitu : ekonomi, sosial dan ekologi.seperti tertuang dalam gambar 2.1 berikut :

**Gambar 2.1 Tiga Pilar Pembangunan Berkelanjutan**



HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

Kebijakan pembangunan berkelanjutan haruslah berwawasan lingkungan. Paradigma pembangunan yang adil dalam ketidakmerataan merupakan konsekuensi yang dipetik dari reformasi politik Indonesia tahun 1998, dimana daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah menuntut hak otonomi yang lebih luas dan memperoleh bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam. Argumentasi yang dibangun adalah tidak adil bila daerah penghasil sumber daya alam diberikan dana bagi hasil dengan jumlah yang hampir sama dengan daerah lain yang miskin sumber daya alam. Oleh karena itu daerah penghasil sumber daya alam menginginkan perhitungan pembagian dana bagi hasil secara lebih proporsional. Pemerintah merespon tuntutan daerah dengan mengeluarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan terakhir diganti lagi melalui undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, beberapa kebijakan perlu didorong untuk dirumuskan, diundangkan dan dikejawantahkan. Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijakan yang mendorong adanya insentif fiskal bagi daerah yang mengelola sumber alamnya dengan baik dan lestari (Nurfatriani, 2015) , diantaranya:

- 1) Dana Alokasi Khusus Konservasi harus lebih terarah dan terukur

- 2) Insentif dan disinsentif dalam dana perimbangan
- 3) Dana kompensasi jasa lingkungan

Adanya dana kompensasi jasa lingkungan akan mengubah nilai potensi menjadi arus kas yang dapat diimplementasikan dalam perhitungan PDB/PDRB hijau. Penerapan ini membutuhkan dukungan regulasi yang memadai karena menyangkut kewenangan pemerintahan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam yang lebih akuntabel serta formulasi dana perimbangan pemerintah pusat dan daerah yang menyinkronkan mekanisme insentif dan disinsentif, serta dana kompensasi jasa lingkungan agar daerah tidak hanya memfokuskan pada profit ekonomi jangka pendek sehingga mengakibatkan eksploitasi sumber daya alam secara masif tanpa mempedulikan kelestarian sumber daya alam.

## **2.2 Produk Domestik Regional Bruto**

Indikator penting untuk dapat mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam kurun waktu tertentu ialah menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto, dapat menggunakan atas dasar harga berlaku ataupun atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan output per kapita dalam jangka yang panjang, penekanannya ialah pada tiga aspek yakni proses, output per kapita, serta jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses, bukan hanya gambaran ekonomi sesaat. Pembangunan daerah serta pembangunan sektoral harus dilaksanakan sejalan agar pembangunan sektoral yang berada di daerah-daerah dapat berjalan sesuai dengan potensi serta prioritas daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dan jasa dalam suatu wilayah, menerapkan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto sendiri dapat diartikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (BPS, 2016).

Sebagai salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian daerah setiap tahunnya ialah data Produk Domestik Regional Bruto (BPS, 2016). Dari data PDRB ini berguna untuk : a) PDRB atas dasar harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB yang besar akan menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, ini berlaku sebaliknya, b) PDRB atas dasar harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun, c) Dalam distribusi PDRB atas dasar harga berlaku berdasarkan lapangan usaha menunjukkan struktur ekonomi atau peranan setiap lapangan usaha dalam suatu daerah. Lapangan usaha sendiri memiliki peran besar dalam menunjukkan basis ekonomi suatu daerah, d) Dalam PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk, e) Dalam PDRB per kapita atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan yang nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah.

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Untuk menghitung PDRB ada tiga metode perhitungan yang biasa digunakan, yaitu:

- 1) Dari segi produksi, PDRB merupakan jumlah nilai produk barang-barang dan jasa akhir yang dihasilkan unit-unit produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini secara garis besar dikelompokkan menjadi sembilan lapangan usaha yaitu : 1. Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan. 2. Pertambangan dan Penggalan. 3. Industri Pengolahan. 4. Listrik, Gas dan Air Bersih. 5. Bangunan. 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran. 7. Pengangkutan dan Komunikasi. 8. Lembaga Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan. 9. Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah.
- 2) Dari segi pendapatan. PDRB adalah jumlah barang dan jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan. Selain variabel-variabel tersebut, penyusutan pajak tidak langsung dan subsidi merupakan bagian yang harus diperhitungkan dalam penyusunan PDRB melalui pendekatan pendapatan ini.

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

- 3) Dari segi pengeluaran, PDRB merupakan jumlah pengeluaran yang dilakukan untuk konsumsi rumah tangga, lembaga sosial swasta yang mencari keuntungan, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTDB), perubahan stok dan ekspor netto.

Setiap daerah dalam melaksanakan pembangunannya mengharapkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan pemerataan, sehingga akan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Dalam melaksanakan pembangunan, daerah sebaiknya lebih memperhatikan keunggulan-keunggulan dan karakteristik setiap daerah tersebut. Partisipasi masyarakat di daerah dalam pembangunan akan dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Peningkatan pendapatan per kapita akan mendorong peningkatan daya beli masyarakat sehingga masyarakat akan memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan hidup secara layak serta mendorong aktivitas ekonomi dan pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Salah satu teori yang sering dirujuk untuk menjelaskan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan dalam konteks pembangunan makro ekonomi adalah konsep *trickle down effect* (cepat atau lambat distribusi pendapatan akan semakin membaik seiring dengan semakin tingginya pendapatan per kapita). Dalam konsep tersebut pembangunan diibaratkan sebagai wahana mengisi bak penampungan air diatas menara. Air meruapakan simbol dari kesejahteraan atau Produk Domestik Bruto / Produk Domestik Regional Bruto yang diciptakan oleh dunia

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

usaha dalam aktifitas pembangunan (Krisna, 2020). Para pelaku usaha yang menggerakkan roda perekonomian dan dala skala nasional/regional akan terakumulasi menghasilkan peningkatan nilai PDB/PDRB. Dalam konteks pengisian air di bak penampungan ini pemerintah berperan sebagai regulator agar proses pengisian air dalam bak penampungan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan distribusinya adil/merata. Seiring dengan waktu kegiatan pembangunan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang direpresentasikan dengan kenaikan nilai PDB/PDRB yang diidentikkan dengan semakin penuhnya air dalam bak penampungan tersebut. Proses pengisian air tentu memerlukan waktu yang secara teoritis para pelaku usaha/ekonomi sebagai pihak yang mengisi bak air adalah pihak yang paling awal memiliki akses paling mudah untuk menikmati kue kesejahteraan yang disimbolkan dengan akses terhadap air. Aparatur pemerintah sebagai regulator tentu juga dapat mencicipi pembagian air yang dikumpulkan oleh dunia usaha karena memperoleh akses terhadap bak penampungan air tersebut (Ridho, *et al* 2015).

Tidak semua kelompok masyarakat memiliki akses, keterampilan, kewenangan maupun kemampuan untuk mengakses air kesejahteraan di bak penampungan. Kelompok-kelompok marginal biasanya hanya dapat menunggu bak penampungan air itu penuh sehingga mereka dapat mengais tumpahan air yang menetes ke bawah. Masalahnya untuk mengisi air di bak penampungan bisa sampai penuh itu sangat memerlukan waktu yang tidak sebentar. Ironisnya, ketika air

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

kesejahteraan di bak penampungan menjelang penuh sering kali kelompok masyarakat termiskin sudah tidak lagi kuat menunggu. Dalam kondisi seperti ini revolusi sering kali dianggap sebagai solusi karena dengan merobohkan bak penampungan maka air akan dapat tumpah dan sesaat mereka dapat melepas dahaga. Dalam revolusi, sering kali peran pemerintah sebagai regulator sangat lemah dan bahkan tidak berfungsi sehingga yang terjadi adalah perambahan, penjarahan dan penguasaan secara ilegal terhadap sumber-sumber ekonomi. Perlu digaris bawahi bahwasannya program-program untuk pemerataan pembangunan untuk memangkas kesenjangan kesejahteraan pada umumnya akan memperlambat pertumbuhan ekonomi dan mengakibatkan semakin lamanya air kesejahteraan dapat memenuhi bak penampungan air yang artinya tumpahan air yang meluap atau *trickle down effect* semakin lama terjadi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam suatu tahun tertentu. Semakin tinggi nilai PDRB suatu daerah maka semakin banyak barang sumber daya yang diperlukan dalam proses produksi yang pada gilirannya akan mengurangi tersedianya sumber daya alam yang ada di dalam bumi karena barang sumberdaya itu harus diambil dari tempat persediaan (*stock*) sumber daya alam. Menurut I Wayan Tjatera (2008) untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan memerlukan suplai sumberdaya, sementara pada saat yang sama harus mengupayakan kelestarian fisik, yang identik

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

dengan keberlanjutan ketersediaan sumberdaya, baik yang dapat diperbaharui (*renewable resources*), maupun sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui (*non renewable resources*).

Jadi dengan semakin pesatnya pembangunan ekonomi di negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia, karena merasa tertinggal dari negara lain, dan ingin menghilangkan adanya kemiskinan di negara tersebut, maka akan berarti semakin banyak barang sumberdaya yang diambil dari dalam bumi dan semakin sedikitlah jumlah persediaan sumberdaya alam tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan ada hubungan yang positif antara jumlah dan kuantitas barang sumberdaya dan PDRB, tetapi sebaliknya ada hubungan yang negatif antara PDRB dan tersedianya sumber daya alam yang ada di dalam bumi. Disamping itu dengan pembangunan ekonomi yang cepat dan diikuti dengan pembangunan pabrik, akan tercipta pula pencemaran lingkungan yang semakin membahayakan kehidupan manusia.

Oleh karena itu, perlu diingat bahwa dengan adanya pembangunan yang sangat cepat diseluruh sektor, apabila tidak berhati-hati, maka pembangunan itu akan dapat segera mengurangi sumber daya alam yang ada dinegara yang bersangkutan, hal ini dikarenakan barang sumber daya yang diperlukan bagi proses pembangunan memiliki jumlah yang terbatas, sehingga hal ini akan berdampak pula pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi lebih lanjut.

Sumber daya hutan merupakan salah satu kekuatan utama pembangunan. Pengertian pembangunan selama tiga dekade yang lalu adalah

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

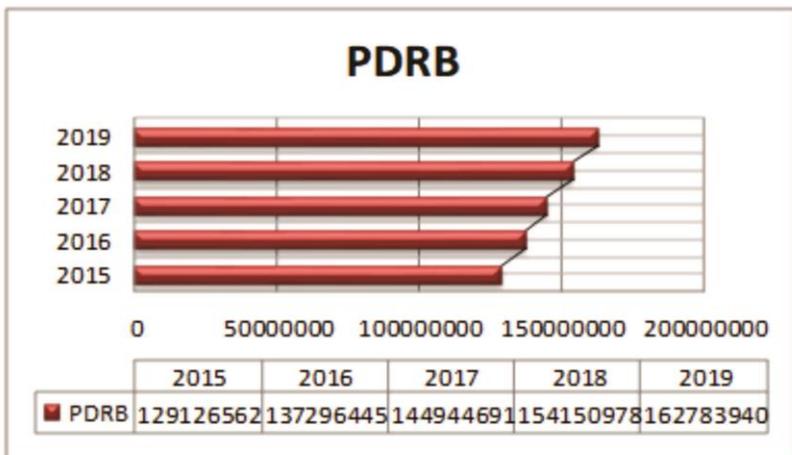
kemampuan ekonomi nasional yang lebih memfokuskan pada jumlah (kuantitas) produksi dengan penggunaan sumber-sumber salah satunya adalah sumber daya hutan. Keberhasilan dari perspektif ini dilihat dari tingginya angka Produk Domestik Bruto (PDB). Sejak awal berdirinya negara Republik Indonesia, pengelolaan sumber daya alam, termasuk sumber daya hutan tidak dapat dilepaskan dari cara pandang dan pola pikir para penyelenggara terhadap sumber daya tersebut.

Para penyelenggara negara selalu memandang sumber daya alam, termasuk hutan sebagai sumber yang dikuasai oleh pemerintahan pusat sebagai representasi dari negara. Cara pandang tersebut tidak lepas dari penafsiran terhadap Undang Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 (Warsito dalam Anwar, 2002). Di Indonesia, terutama sejak akhir tahun 1960-an, hutan dianggap sebagai sumber daya alam yang dapat dikuras karena nilai ekonominya yang tinggi (Ramli R, dan Ahmad M, dalam Anwar, 2001). Pada periode tersebut kebutuhan akan modal, devisa negara dan lapangan pekerjaan membuat pemerintahan pusat berniat untuk mengoptimalkan sumber daya hutan, dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang pokok-pokok pengelolaan hutan yang menitikberatkan pada produksi kayu dan industri perkayuan. Dimana kebijakan tersebut tidak lepas dari paradigma pertumbuhan (*growth*) dalam menetapkan kebijakan pembangunan perekonomian makro Indonesia guna mengatasi kondisi ekonomi yang rapuh sejak 1965 (Anwar, 2001).

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Bali mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 1998 terjadi penurunan pada PDRB Provinsi Bali dari tahun sebelumnya. Ini dikarenakan pada saat tahun tersebut Indonesia mengalami krisis ekonomi dan pergantian kekuasaan Presiden Soeharto sehingga berpengaruh pula terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk juga pertumbuhan ekonomi Bali. Namun pada tahun selanjutnya secara umum PDRB Provinsi Bali mengalami peningkatan setiap tahun. Gambar 2.1 memvisualisasikan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Bali dalam 5 tahun terakhir.

**Gambar 2.2 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Bali Tahun 2015-2019**



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Pada tahun 2015, PDRB Provinsi Bali mengalami perkembangan yang cukup pesat dari periode tahun sebelumnya, jika pada tahun 2014 perkembangan sebesar Rp 121.787.547,723,04 maka pada tahun 2015 perkembangan PDRB Bali sebesar Rp 129.126.562,218,27 atau sebesar 6.02 persen. Lonjakan peningkatan PDRB Provinsi Bali tertinggi dicapai pada Tahun 2018 yakni sebesar 6.35 persen atau mengalami peningkatan sejumlah Rp 9.206.286,91.

### **2.3 Demografi**

Konsep kependudukan sesuai dengan yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik baik pada saat Sensus Penduduk (SP) maupun Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Seperti apa yang dinyatakan oleh Jusnianto (2007), ada dua cara pencacahan penduduk pada saat Sensus Penduduk yaitu melalui cara pencacahan *de jure* yaitu mencacah responden menurut tempat tinggalnya, dimana cara ini digunakan untuk mencacah sebagian besar penduduk Indonesia yang mempunyai tempat tinggal tetap. Kedua melalui cara pencacahan *de facto* yaitu mencacah responden menurut tempat responden ditemui oleh petugas pada waktu pencacahan, dan cara ini digunakan untuk mencacah mereka yang karena sifat pekerjaan atau sebab-sebab lainnya tidak mempunyai tempat tinggal tetap misalnya para pelaut, tuna wisma, maupun suku-suku terasing.

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

Faktor kependudukan yang paling mempengaruhi hutan dan lingkungan adalah kepadatan, tingkat pertumbuhan penduduk dan komposisi penduduk. Tingkat kepadatan penduduk akan mempengaruhi fasilitas sosial yang perlu disediakan dan mempengaruhi pula beban pencemaran limbah domestik yang perlu ditanggung. Tingkat pertumbuhan penduduk mempengaruhi tingkat pertumbuhan kebutuhan pokok akan sandang, pangan, dan papan, dengan demikian mempengaruhi tingkat produksi yang pada gilirannya mempengaruhi pemanfaatan sumber daya hutan, konversi hutan, dan pencemaran yang berkaitan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Penduduk mempunyai peranan penting dalam pembangunan suatu daerah. Semakin banyak jumlah penduduk maka dapat dikatakan bahwa semakin banyak pula potensi-potensi yang dapat dikembangkan ataupun yang dapat digunakan untuk pembangunan wilayah. Karena sumber daya manusia merupakan komponen pembangunan yang penting disamping sumber daya alam dan teknologi (Mantra, 2003), akan tetapi pada kenyataannya bahwa penambahan penduduk kerap kali lebih banyak membawa permasalahan daripada membawa solusi terhadap pembangunan.

Komposisi penduduk akan mempengaruhi pola konsumsi penduduk. Dengan demikian dinamika kependudukan sangat terkait dengan kualitas hidup yang mencakup kesejahteraan fisik, kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan spiritual. Pada gilirannya permintaan atau kebutuhan akan kualitas hidup akan mempengaruhi

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

pola konsumsi dan pemanfaatan sumberdaya hutan dikaitkan dengan kebutuhan produksi.

Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk semakin banyak diperlukan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan penduduk tersebut. Peningkatan jumlah barang dan jasa dengan sendirinya memerlukan lebih banyak barang sumber daya sebagai salah satu faktor produksi yang akan diolah bersama faktor-faktor produksi lainnya. Pertumbuhan penduduk yang tinggi juga dapat mengakibatkan pengurangan sumber daya hutan karena pemanfaatan areal hutan untuk permukiman.

Di pulau Jawa, faktor pertumbuhan penduduk dan peningkatan permintaan hasil perkebunan yang pesat, serta mempengaruhi dan membentuk pola pemanfaatan hutan. Di luar pulau Jawa kedua faktor tersebut juga berlaku, namun faktor meningkatnya permintaan kayu tropis, sangat menentukan perkembangan pemanfaatan hutan di daerah ini. Selama 200 tahun terakhir, hutan di Indonesia telah berperan sebagai sumber bahan mentah industri, dan akan lebih menonjol untuk 10 hingga 20 tahun kedepan (Prabowo dan Reksohadiprodjo, 1985).

Hubungan antara jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, barang sumber daya alam dan lingkungan dapat dilukiskan dengan berkembangnya jumlah penduduk, perekonomian harus lebih banyak menyediakan barang dan jasa demi mempertahankan atau mempertinggi taraf hidup suatu bangsa. Namun peningkatan produksi barang dan jasa akan menuntut lebih banyak produksi barang sumberdaya alam semakin menjadi menipis. Disamping itu pencemaran lingkungan

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

semakin semakin meningkat pula dengan semakin meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi. Jadi dengan pembangunan ekonomi yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi akan terjadi pula dua macam akibat yaitu disatu pihak memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia berupa semakin tersedianya barang dan jasa dalam perekonomian dan dilain pihak berdampak negatif bagi kehidupan manusia yang berupa pencemaran lingkungan dan menipisnya persediaan sumberdaya alam. Oleh karena itu pembangunan ekonomi haruslah bersifat pembangunan yang berwawasan lingkungan atau pembangunan yang berkelanjutan dan tidak menguras sumber daya alam (Suparmoko, 2016).

Bali sebagai sebuah ekosistem pulau memiliki daya tampung terbatas terhadap penduduk. Dengan luas wilayah 563.286 hektar, idealnya *Pulau Seribu Pura* ini dihuni penduduk sekitar 2,5 juta jiwa. Namun, jumlah penduduk Bali saat ini sudah di atas 4.336.900 juta jiwa (BPS, 2019). Idealnya daya tampung Bali terhadap penduduk per satu kilometer persegi adalah 400 jiwa. Saat ini satu kilometer persegi, penduduknya sudah hampir mencapai 750 jiwa. Dari segi daya tampung penduduk, Bali sudah *over capacity*. Bahkan Ibu Kota Provinsi Bali yakni Kota Denpasar sebagai barometer Bali memiliki penduduk yang sangat padat, yaitu 1 Km<sup>2</sup> penghuninya sampai 7412 jiwa pada tahun 2019. Dikhawatirkan laju pertumbuhan penduduk yang tidak di rem justru akan berefek negatif pada alam dan lingkungan Bali. Tekanan terhadap sumber daya manusia

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

dan lingkungan akan makin bertambah besar. Akibatnya penduduk miskin dan pengangguran juga meningkat.

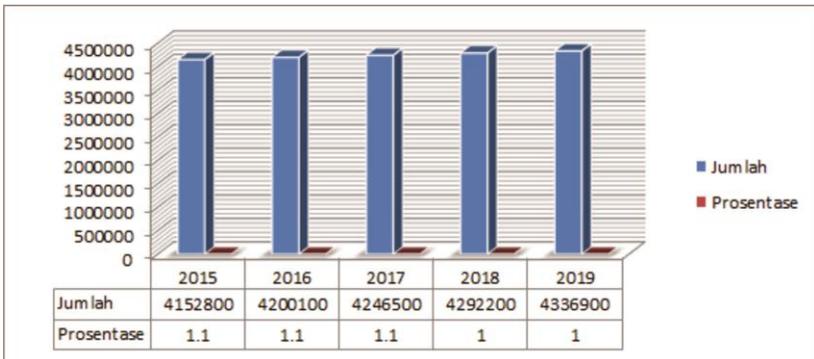
Pembangunan yang cenderung *urban bias* akan mendorong urbanisasi yang sangat cepat di Indonesia. Pada era Tahun 2010 sebanyak 49,8 persen penduduk Indonesia berada di perkotaan dan diperkirakan tahun 2035 jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan mencapai 66,6 persen yang mana salah satu provinsi di Indonesia yang mengalami tingkat urbanisasi yang sangat cepat adalah Provinsi Bali (Krisna, 2018). Tahun 2010 jumlah penduduk Bali yang tinggal di perkotaan mencapai 60.2 persen dan diprediksi tahun 2035 akan meningkat menjadi 81.2 persen (Badan Pusat Statistik, 2016). Urbanisasi yang sangat masif akan memperluas kesenjangan pembangunan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Hal itu dapat terlihat dari rasio persentase penduduk miskin di pedesaan jauh lebih tinggi dari perkotaan, bulan September 2016 persentase penduduk miskin di pedesaan mencapai 13.96 persen dan di perkotaan sebesar 7.73 persen, sedangkan pada bulan September 2017 jumlah penduduk miskin di perkotaan adalah 10.27 juta jiwa atau sekitar 7.26 persen dan di pedesaan sebesar 13.47 persen atau sebanyak 26.58 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2018).

Perkembangan Penduduk Bali dalam 5 Tahun Terakhir mengalami pertumbuhan yang cukup rendah yakni sebesar 1 persen dalam 5 tahun terakhir, dimana pada tahun 2019 merupakan jumlah penduduk tertinggi yakni sebesar 4.336.900 jiwa sedangkan yang terendah pada tahun 2015 yakni sebesar 4.152.800 Jiwa dan diprediksi akan terus mengalami peningkatan secara

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

gradual. Tahun 2025 sebesar 4.6 Juta Jiwa, Tahun 2030 sebesar 4.8 juta jiwa dan 2035 sebesar 4.9 juta jiwa (Databoks, 2020). Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi Bali tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Gambar 2.2 Berikut,

**Gambar 2.3** Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi Bali Tahun 2015-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan juga ekonomi masyarakat, menjadikan tekanan terhadap pemanfaatan sumber daya alam semakin meningkat. Peningkatan laju pertumbuhan penduduk akan menuntut ketersediaan pemenuhan alat pemuas dari yang paling mendasar (*basic needs*) sampai ke yang bersifat eksklusif (*superior*). Peningkatan kebutuhan ini menjadikan manusia dengan berbagai peran dan kapasitas yang dimilikinya memanfaatkan potensi sumber daya alam dan

lingkungan sebagai strategi praktis dalam memenuhi kebutuhannya. Motivasi dan teknologi yang dipergunakan dalam eksploitasi sumber daya alam ini akan menjadi kunci seberapa besar tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan akan terjadi. Termasuk disini adalah peningkatan terhadap pemanfaatan lahan hutan sebagai tempat membuka lahan pertanian baru serta hasil-hasil hutan sehingga penduduk merupakan aktor utama terhadap keberadaan hutan.

## **2.4 Desentralisasi**

Otonomi daerah atau desentralisasi yang diimplementasikan per 1 Januari 2001 telah memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dan para pelaku ekonomi daerah di dalam mengelola pembangunan daerah (Rudy, 2017). Tuntutan otonomi daerah tersebut muncul karena proses pembangunan di Indonesia sebelumnya telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan pembangunan antara wilayah di Pulau Jawa dan luar Jawa serta antara Indonesia Barat dengan Indonesia Timur. Kesenjangan tersebut terjadi karena adanya ketidakmerataan dalam alokasi investasi antar wilayah yang berpengaruh dalam memicu dan memacu ketidakseimbangan dalam pertumbuhan antar wilayah (Waluyo, 2007). Oleh karena itu, pelaksanaan otonomi daerah merupakan momen yang tepat untuk memberi peran yang lebih besar kepada pemerintah dan pelaku ekonomi daerah dalam mengelola pembangunan di daerah (Badrudin, 2011).

Menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa Republik

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

Indonesia menganut asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberi kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengimplementasikan otonomi daerah. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menjadi landasan yang kuat bagi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan republik Indonesia sebagai pondasi yang kuat untuk melaksanakan otonomi daerah.

Otonomi adalah kebebasan untuk membuat keputusan sendiri dengan tetap menghormati perundang-undangan. Otonomi adalah wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri dengan mematuhi aturan Undang- undang, selain itu otonomi dapat diterjemahkan sebagai berikut: 1) kepentingan sekelompok penduduk yang berdiam dalam suatu lingkungan wilayah tertentu yang mencakup mengatur, mengurus, dan mengendalikan, dan mengembangkan berbagai hal yang perlu bagi kehidupan penduduk. 2) Komponen utama pengertian otonomi, yaitu komponen wewenang dan menetapkan dan melaksanakan kebijakan sebagai komponen yang mengacu pada konsep pemerintahan yang diperoleh dari pemerintahan pusat melalui desentralisasi wewenang dan wewenang tersebut merupakan wewenang formal dan komponen kemandirian sebagai komponen yang mengacu pada

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

kata oleh dari dan untuk rakyat yang bisa dilihat dari kemandirian daerah tersebut dari sisi pendapatan yang dihasilkan baik dari pendapatan asli daerahnya (PAD) Yang relatif besar di dibandingkan bentuk dana alokasi umum (DAK) serta dana yang lain.

Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.32 Tahun 2004 sebagaimana diperbarharui melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan.

Otonomi daerah dimaksudkan untuk mendekatkan proses pengambilan keputusan kepada kelompok masyarakat yang paling bawah, dengan memperhatikan ciri khas budaya dan lingkungan setempat, sehingga kebijakan publik dapat lebih diterima dan produktif dalam memenuhi kebutuhan serta rasa keadilan masyarakat akar rumput. Adapun tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk mengembangkan mekanisme demokrasi di tingkat daerah dalam bentuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah setempat maupun untuk mendukung kebijaksanaan politik nasional dalam era reformasi saat ini. Adapun lima variabel sebagai faktor pokok untuk mengukur kemampuan suatu daerah untuk berotonomi adalah: a) Kemampuan keuangan daerah, nilainya ditentukan oleh berapa besar peranan pendapatan asli daerah terhadap jumlah total pembiayaan daerah. b) Mengangkut kemampuan

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

aparatur berapa rasio jumlah pegawai terhadap jumlah penduduk. c) Partisipasi masyarakat yang menyangkut berbagai macam pelayanan. d) Variabel ekonomi di daerah dengan mengukur indikator nilai rata-rata pendapatan perkapita dalam lima tahun terakhir. e) Variabel demografi, pendapatan penduduk, pertumbuhan penduduk, dan lain-lain. Otonomi daerah dapat dipandang sebagai cara untuk mewujudkan secara nyata penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, dan berwibawa guna mewujudkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan otonomi daerah juga merupakan keterikatan yang kuat antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya disamping menumbuh kembangkan semangat kebersamaan dalam simpul Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di samping itu penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip – prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Provinsi merupakan daerah otonom dan sekaligus wilayah administrasi sebagai pelaksana kewenangan pemerintah pusat yang didelegasikan kepada gubernur.

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan disemua bidang pemerintahan yaitu perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kecuali bidang luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama serta kewenangan lainnya yang akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Kewenanganotonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan daerah dalam bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Kewenangan otonomi yang bertanggungjawab adalah perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewajiban kepada daerah dalam mencapai tujuan dari dilaksanakannya otonomi daerah. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah tersebut maka daerah diberi kewenagan untuk menggali sumber keuangan daerah sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta antara provinsi dan kabupaten/kota sebagai prasyarat dalam system pemerintahan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Anantara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sumber pendanaan dalam pelaksanaan desentralisasi daerah terdiri dari Pendapatan

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain lain yang sah. Berdasarkan sumber pendanaan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan di daerah menjadi lebih lancar dengan tidak mengabaikan distribusi pendapatan antar wilayah yang timpang seperti masa lalu (Carson, 2002).

Otonomi dianggap lebih jauh demokratis dibandingkan sistem yang terpusat, bahkan lebih menjamin adanya pluralitas (tidak menggunakan pendekatan yang seragam seperti pada masa Orde Baru), karena menghindari dominasi suatu kekuasaan berdasarkan budaya atau agama atau kepercayaan (ideologi) tertentu. Dengan otonomi maka daerah diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan kebijakan sendiri sesuai dengan kebutuhannya.

Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) (2003) dalam bidang lingkungan hidup, otonomi daerah berarti :

- 1) Menyesuaikan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dengan ekosistem setempat.
- 2) Menghormati kearifan tradisional yang sudah dikembangkan masyarakat didalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara lestari.
- 3) Tidak berdasarkan batas administratif, tetapi berdasarkan batas ekologi (*bioecoregion*).
- 4) Meningkatkan kemampuan daya dukung lingkungan setempat dan bukan menghancurkan daya dukung ekosistem dengan eksploitasi yang melewati daya dukung.

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

- 5) Pelibatan secara aktif masyarakat adat dan penduduk setempat sebagai pihak yang paling berkepentingan (menentukan) dalam pembuatan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dalam pelaksanaan pembangunan di era otonomi daerah, pengelolaan lingkungan hidup tetap mengacu pada Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan juga Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah serta Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dalam melaksanakan kewenangannya diatur dengan Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. Dalam pengelolaan lingkungan hidup pemerintah provinsi mempunyai 6 (enam) kewenangan terutama menangani lintas kabupaten atau kota, sehingga titik berat penanganan pengelolaan lingkungan hidup ada di kabupaten atau kota. Dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri No.045/560 tanggal 24 Mei 2002 tentang pengakuan kewenangan atau positif *list* dimana terdapat 79 (tujuh puluh sembilan) kewenangan dalam bidang lingkungan.

Pengelolaan lingkungan termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijaksanaan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup kemantapan kelembagaan, sumber

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

daya manusia dan kemitraan lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundangan, informasi serta pendanaan. Sifat keterkaitan (*interdependensi*) dan keseluruhan (*holistik*) dari esensi lingkungan telah membawa konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi terintegrasi dan menjadi roh dan bersenyawa dengan seluruh pelaksanaan pembangunan sektor dan daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom, dalam bidang lingkungan hidup memberikan pengakuan politis melalui transfer otoritas dari pemerintah pusat kepada daerah :

- 1) Meletakkan daerah pada posisi penting dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- 2) Memerlukan prakarsa lokal dalam mendesain kebijakan.
- 3) Membangun hubungan interdependensi antar daerah.
- 4) Menetapkan pendekatan kewilayahan.

Dapat dikatakan bahwa konsekuensi pelaksanaan Undang-Undang No.23 Tahun 2014, pengelolaan lingkungan hidup titik tekannya ada di daerah, maka kebijakan nasional dalam bidang lingkungan hidup secara eksplisit ProPenas merumuskan program yang disebut sebagai pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Program itu mencakup :

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

1) Program Pengembangan dan Peningkatan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan untuk memperoleh dan menyebarkan informasi yang lengkap mengenai potensi dan produktivitas sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui inventarisasi dan evaluasi, serta penguatan sistem informasi. Sasaran yang ingin di capai melalui program ini adalah tersedia dan teraksesnya informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, baik berupa infrastruktur data spasial, nilai dan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup oleh masyarakat luas di setiap daerah.

2) Program Peningkatan Efektivitas Pengelolaan, Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam

Tujuan dari program ini adalah menjaga keseimbangan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup berupa hutan, laut, air, udara dan mineral. Sasaran yang akan dicapai dalam program ini adalah termanfaatkannya sumber daya alam untuk mendukung kebutuhan bahan baku industri secara efisien dan berkelanjutan. Sasaran lain pada program ini adalah terlindunginya kawasan-kawasan konservasi dari kerusakan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali dan eksploitatif.

3) Program Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah kerusakan dan atau pencemaran lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, serta kegiatan industri dan transportasi. Sasaran program ini adalah tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat adalah tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sesuai dengan baku mutu lingkungan yang ditetapkan.

- 4) Program Penataan Kelembagaan dan Penegakan Hukum, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan untuk mengembangkan kelembagaan, menata sistem hukum, perangkat hukum dan kebijakan, serta menegakkan hukum untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang efektif dan berkeadilan. Sasaran program ini adalah tersedianya kelembagaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang kuat dengan didukung oleh perangkat hukum dan perundangan serta terlaksananya upaya penegakan hukum secara adil dan konsisten.

- 5) Program Peningkatan Peranan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan peranan dan kepedulian pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan

sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Sasaran program ini adalah tersedianya sarana bagi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sejak proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan.

## **2.5 Desentralisasi Dalam Konteks Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Penyebab utama kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup adalah manusia. Hal ini berkaitan erat dengan cara pandang manusia dalam memandang dirinya, alam, dan tempat manusia dalam keseluruhan ekosistem. Kekeliruan tersebut dapat dilakukan oleh manusia, baik dalam kapasitas sebagai pribadi, kelompok, bahkan oleh pemerintah melalui berbagai keputusan, kebijakan, maupun izin yang dikeluarkannya tanpa memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan.

Otonomi daerah dimaksudkan untuk mendekatkan pengambilan keputusan kepada para pelaku dan pemanfaat lingkungan. Dengan demikian akan memberi peluang tercapainya kualitas keputusan menjadi lebih baik, karena pihak-pihak yang berkompeten turut dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan salah satu syarat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, yakni partisipasi, demokrasi, dan kesempatan menentukan nasib sendiri. Kita telah memperoleh pengalaman bahwa di era Orde Baru dengan keputusan-keputusan terpusat (sentralistik) bukan saja mengakibatkan keputusan itu tidak tepat

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

sasaran dan merusak tata ruang, tetapi juga menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Tidak kurang proyek lahan sejuta hektar di Kalimantan Selatan sebagai proyek daerah yang diputuskan di pusat, mengalami kegagalan dan sulit untuk dikonservasi kembali. Masyarakat dihadapkan pula pada pengelolaan hutan melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) tanpa kontrol yang optimal dari pemerintah sehingga yang terjadi adalah eksploitasi dan penggundulan hutan secara besar-besaran, dengan segala dampak ikutan lainnya berupa banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran silih berganti.

Realitas sosial juga menunjukkan bahwa sebagai akibat penangkapan ikan menggunakan bom ikan, potassium, dan zat-zat beracun lainnya, telah mengakibatkan kehancuran biota laut dan ekosistemnya. Di Bali, mencuatnya kasus reklamasi Padanggalak pada akhir berkuasanya Orde Baru merupakan pula contoh konkret pengambilan keputusan terpusat (sentralistik) oleh Gubernur Provinsi Bali waktu itu tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat, karena itu berakhir dengan kegagalan. Selain itu di era Orde Baru, lingkungan hidup diperlakukan sebagai komoditas dalam mendongkrak Produk Domestik Bruto (PDB) dengan berbagai peraturan yang belum menyelaraskan diri dengan Undang-Undang No.4 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Semuanya itu telah menjadi spirit pengelolaan sumber daya alam dalam konteks pertumbuhan ekonomi, dan bukan dalam konteks pelestarian daya dukung lingkungan. Cara pandang dan

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

kondisi tersebut sesungguhnya ingin diubah dalam era otonomi daerah ini, melalui pemberian wewenang di bidang lingkungan hidup secara desentralisasi kepada provinsi, kabupaten, dan kota sesuai dengan ketentuan Pasal 9, Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah berdasarkan Pasal 13 ayat (1) jo dan Pasal 14 ayat (1) jo Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Arus politik desentralisasi mendominasi wacana politik pembangunan di daerah diwarnai tarik menarik kepentingan atas pengelolaan sumber daya alam antara pusat dan daerah maupun antar berbagai kelompok kepentingan. Di sektor kehutanan, rencana pembentukan dan pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai lembaga pengelola hutan di tingkat tapak, tidak hadir dalam ruang politik yang masih kosong melainkan harus dapat mengisi ruas model institusi penelolan hutan yang memungkinkan dalam format politik pembangunan daerah (Ridho, 2015).

Keputusan politik untuk menyerahkan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, hanya dapat terlaksana dengan baik jika pemerintah daerah memiliki kapasitas yang memadai dalam pengelolaan *administrative*, fiskal dan politik (Inman dan Rubinfield 1997 *dalam* Litvack *et al.* 1998). Dampak dari relokasi kekuasaan dalam pengertian otonomi daerah tidak hanya dilaksanakan melalui fungsi konsultasi tugas-tugas pusat yang dilaksanakan oleh aparatur didaerah, melainkan transfer kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan atau entitas di daerah.

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

Politik desentralisasi di Indonesia dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan terakhir diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan salah satu pijakan penting dalam perubahan system pemerintahan di Indonesia. Secara konseptual, kebijakan desentralisasi yang menjadi elemen implementasi otonomi daerah merupakan sistem pemerintahan yang lebih menghargai partisipasi, kemandirian, kesejahteraan sosial, demokratisme dan pemberdayaan masyarakat. Konsep desentralisasi dipandang lebih menjamin cita-cita penegakan asas – asas demokrasi yang menjunjung pluralitas, transparansi, akuntabilitas dan berbasis pada kemampuan lokal. Selain itu, kebijakan desentralisasi juga menjadi *platform* bagi pelaksanaan politik pembangunan yang adil dan mensejahterakan melalui sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan adanya kebijakan desentralisasi yang mencakup empat (4) hal (Fisher *et al*, 2000) :

- a. Pelaksanaan urusan kehutanan diberikan kepada kantor pusat yang berkedudukan di daerah
- b. Pelaksanaan urusan didelegasikan kepada otoritas daerah
- c. Kewenangan diberikan kepada otoritas pemerintahan di daerah atau kepada kelompok masyarakat lokal, dan
- d. Kewenangan pengelolaan hutan diberikan kepada individu atau perusahaan

maka kerusakan sumber daya alam diharapkan dapat diminimalkan karena pergeseran politik ekonomi

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

pengelolaan sumber daya alam ke daerah akan menambah rasa tanggung jawab dan rasa memiliki entitas lokal terhadap sumber daya alam di wilayahnya (Marwa, *et al.* 2010).

Dalam konteks mengatasi permasalahan pergeseran politik ekonomi, diharapkan konsep kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dapat diformulasikan secara tepat dan terarah (Nurrochmat *et al.* 2012). Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga berpotensi mengubah atau menggeser kewenangan alokasi sumber daya hutan terutama hasil hutan kayu dari kabupaten/kota ke provinsi (Nurrochmat *et al.* 2015).

Desentralisasi adalah salah satu pemikiran baru dalam sistem tata kelola kehutanan. Ada tiga tujuan yang ingin dicapai dari desentralisasi tata kelola hutan (Glueck, 1999) yakni : *Pertama*, meningkatkan rasionalitas kebijakan kehutanan; *kedua*, menjamin tercapainya kebijakan kehutanan dalam jangka panjang; *ketiga*, mengimplementasikan kerja sama dan saling pengertian yang lebih baik di antara berbagai pihak yang berkepentingan.

Kerinduan daerah untuk mendapatkan domain politik dan ekonomi yang lebih besar banyak terpenuhi dengan dikeluarkannya Undang – Undang Pemerintahan Daerah yang membuka jalan terlaksananya otonomi daerah, sebagai perwujudan dari pelaksanaan sistem desentralisasi dalam skala yang cukup luas. Dengan dimulainya otonomi daerah, pada tataran nasional telah terjadi pergeseran redenifisi hubungan eksekutif, legislatif dan yudikatif di dalam sistem pemerintahan. Penerapan sistem desentralisasi diharapkan dapat

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

membangun hubungan tata institusi yang lebih proporsional dan konstruktif dalam praktik kenegaraan.

Derasnya tuntutan terhadap implementasi otonomi daerah yang seluas-luasnya, sebenarnya adalah titik kulminasi kegundahan daerah terhadap pelaksanaan pemikiran pembangunan adil dan merata yang selama tiga puluh dua tahun dipatok sebagai falsafah pembangunan Orde Baru. Dalam implementasinya, pemikiran ini hanya menjadi alat legitimasi atas dominasi pemerintah pusat terhadap distribusi dan alokasi sumber – sumber ekonomi. Fakta ini sungguh mencederai rasa keadilan masyarakat lokal. Realitas pembangunan yang sentralistik sejatinya tidak lebih dari monopoli pusat atas penyedotan sumber daya alam dan mengalirnya arus kapital ke pusat pemerintahan. Praktik pembangunan bernafaskan keadilan dan pemerataan yang manipulatif dan diskriminatif akan melahirkan tuntutan pemikiran pembangunan yang baru yakni pembangunan yang adil dan proporsional. Sudah sewajarnya jika masyarakat lokal dan daerah penghasil sumber daya alam termasuk hutan memperoleh distribusi manfaat terbesar dari penegelolaan sumber daya ekonomi yang dimilikinya (Purwandari dan Nurrochmat, 2006). Hal tersebut dapat dimaknai bahwa perhatian terhadap aspirasi daerah yang berkeadilan harus menjadi dasar pondasi pemerintah di dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan yang lebih proporsional dan partisipatif termasuk memformulasikan konsep kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Pada umumnya ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam kebijakan desentralisasi pengelolaan sumber daya alam diantaranya :

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

- 1) Memperbaiki rantai pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumber daya alam
- 2) Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam
- 3) Mengurangi biaya transaksi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam
- 4) Mempekecil kesenjangan pelayanan dan kebutuhan dalam rangka optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam
- 5) Menghargai pengetahuan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam
- 6) Meningkatkan koordinasi sektoral dalam pengelolaan sumber daya alam, dan
- 7) Memberikan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam

Pada kenyataannya tidak seluruh tujuan yang diharapkan dari adanya kebijakan desentralisasi sumber daya alam dapat terwujud. Beberapa hal yang perlu disaripatkan sebagai suatu diskursus dari praktik desentralisasi pengelolaan sumber daya alam antara lain :

- 1) Keunggulan desentralisasi yang banyak diucapkan dalam pustaka tidak selalu ditemukan secara faktual pada tatanan empiris
- 2) Desentralisasi tidak dapat sepenuhnya dijadikan jaminan bagi masyarakat lokal untuk mendapatkan lebih banyak profit dan lebih berkomitmen dalam menjaga sumber daya alam
- 3) Desentralisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan bukan formula yang ajaib untuk menyelesaikan segenap problematika

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

- 4) Kepentingan daerah terhadap sumber daya alam sering non linier dengan kepentingan nasional
- 5) Desentralisasi sering memicu konflik vertikal maupun horizontal terkait batasan kewenangan atas pengelolaan kepentingan nasional

Pengembangan kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) wajib mempertimbangkan *trend* pergeseran *locus* politik ke daerah yang berjalan seiring dengan menurunnya legitimasi pemerintah pusat. Penurunan kredibilitas ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari akibat dari : pertama, pola pengaturan politik pada masa Orde Baru yang dianggap melakukan marginalisasi, tidak hanya pada warga Negara dalam hubungan tata Negara, melainkan juga pada masyarakat lokal. Kedua, terjadinya fragmentasi yang luas pada semua arena institusi kenegaraan di era pasca - Orde Baru akibat tajamnya rivalitas antar aktor-aktor politik. *Loss of Legitimacy* dari Negara akan menghasilkan sinisme dan anti kepercayaan yang meluas pada Negara dan institusi kenegaraannya, hal ini adalah catatan penting yang harus diberi perhatian dalam formulasi kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) agar nantinya lembaga yang terbentuk benar-benar memiliki legitimasi dan efektifitas dalam mencapai tujuan.

Kemauan politik di era otonomi daerah yang bertujuan menghapus keputusan-keputusan di bidang lingkungan hidup yang bersifat sentralistik, justru mewarisi dan melanjutkan keadaan yang sama. Kedekatan jarak secara fisik geografis antara pengambil keputusan di tingkat Kabupaten maupun Kota dengan rakyat, tidak pula diikuti dengan langkah membangun

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

komunikasi, transparansi dan partisipasi masyarakat secara optimal. Oleh karena itu, desentralisasi tidak serta merta memberikan jaminan bagi kelestarian lingkungan hidup. Hal ini berkaitan erat dengan berbagai faktor kriminogen bagi kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Pertama, visi lingkungan dan orientasi para pengambil keputusan. Jika visinya lemah dan orientasi pembangunan semata-mata untuk pendapatan asli daerah (PAD), besar kemungkinannya lingkungan akan menjadi korban seperti yang terjadi pada era Orde Baru yang sentralistik tersebut. Kedua, tergantung pada kemauan dan itikad baik para pengambil keputusan apakah bersedia dan mampu memberikan ruang yang transparan bagi pengambilan keputusan yang harus mengikutsertakan pihak-pihak terkait termasuk masyarakat. Ketiga, ada tidaknya koordinasi sebagai katakuni dalam pengelolaan lingkungan hidup di era reformasi sekarang ini. Karena itu setiap kebijakan atau peraturan yang akan diterbitkan hendaknya sejak dini mengikutsertakan stakeholders dan disusun secara transparan (Sudharto P. Hadi, 2002). Keempat, kemauan pemerintah untuk membangun *good governance* yang menyediakan ruang kondusif dan sekaligus dinamis bagi akuntabilitas publik atau kontrol sosial masyarakat terhadap kebijakan di bidang lingkungan hidup.

## **2.6 Nilai Ekonomi Sumber Daya Hutan**

Kuantifikasi nilai ekonomi dari sumber daya hutan diperlukan sebagai salah satu bahan referensi yang sangat urgen di dalam menentukan pilihan

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

pembangunan. Mengingat sumber daya alam memiliki beragam fungsi maka untuk melakukan valuasi ekonomi sumber daya alam diperlukan pengetahuan mengenai fungsi sumber daya alam dan lingkungan secara menyeluruh.

Kuantifikasi atau valuasi ekonomi dapat diartikan sebagai daya untuk memberikan nilai numerikal terhadap output yang dihasilkan oleh sumber daya alam dan lingkungan baik atas dasar nilai pasar ataupun nilai non pasar. Dengan demikian labelisasi ekonomi sumber daya merupakan suatu alat ekonomi yang menggunakan teknik penilaian tertentu untuk memprediksi atau menganalisis nilai uang dari output yang diberikan oleh sumber daya alam dan lingkungan itu sendiri (Usman & Abdi, 2010). Pengertian atas konsep ini memungkinkan para pengambil kebijakan untuk dapat menentukan penggunaan yang paling efektif dan efisien terhadap sumber alam dan lingkungan. Mengingat penilaian terhadap ekonomi sumber daya alam dan lingkungan antara lain dapat dipergunakan untuk memperlihatkan korelasi antara konservasi sumber daya alam dan pembangunan ekonomi, maka kuantifikasi ekonomi dapat menjadi suatu peralatan penting dalam meningkatkan apresiasi dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan itu sendiri.

Dalam mengestimasi nilai sumber daya alam dan lingkungan manfaat serta biaya, satuan moneter digunakan sebagai patokan perhitungan yang dianggap sesuai. Pengukuran terhadap keuntungan dan kerugian bertujuan untuk memperlihatkan bagaimana urgensi nilai dari sumber daya alam dan lingkungan. Meskipun

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

masih terdapat keragu-raguan bahwa nilai uang belum tentu absah untuk beberapa hal seperti nilai jiwa manusia misalnya, pada faktanya pilihan haruslah diambil dalam konteks kelangkaan sumber daya. Dengan demikian satuan moneter sebagai patokan pengukuran merupakan ukuran kepuasan untuk suatu aksi nyata. Mengingat ketidakhadiran pasar maka tidak berarti bahwa manfaat ekonomi tidak ada, oleh karena itu preferensi yang berkorelasi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat ini mau tidak mau harus menggunakan satuan moneter. Dengan demikian ketidakhadiran pasar membuat proses kuantifikasi ekonomi atas sumber daya alam dan lingkungan menjadi lebih rumit atau harus dilakukan melalui beberapa tahap yang tidak sederhana.

Terdapat beberapa argumentasi mengapa perhitungan moneter untuk peningkatan dan penurunan kualitas lingkungan perlu dilakukan. Argumentasi yang pertama ialah nilai satuan moneter dapat digunakan untuk menilai tingkat kepedulian individu terhadap lingkungan. Hal ini dapat dimaknai sebagai moneterisasi hasrat atau kesedian individu untuk membayar bagi kepentingan lingkungan, semisal untuk melihat beberapa hasrat untuk membayar pelestarian atau perbaikan kualitas lingkungan. Perhitungan ini secara langsung mengapresiasi bukan hanya fakta tentang preferensi lingkungan akan tetapi juga intensitas terhadap preferensi utamanya. Sebaliknya juga pada individu yang kehilangan manfaat lingkungan, maka permasalahannya dapat disebut sebagai hasrat untuk menerima kompensasi kerugian yang diderita. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penentuan perhitungan moneter

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

dapat menunjukkan keperdulian yang kuat terhadap aset sumber daya alam dan lingkungan. Argumentasi yang kedua adalah perhitungan moneter dari manfaat dan biaya lingkungan dapat menjadi pendukung untuk keberpihakan terhadap kualitas lingkungan. Misalnya suatu jenis spesies yang menghadapi masalah kelangkaan akibat pembangunan akan dinilai tinggi karena adanya ekspresi moneter yang menunjang hal tersebut. Argumentasi yang ketiga yaitu penghitungan moneter dapat digunakan sebagai dasar pembandingan secara kuantitatif terhadap beberapa alternatif pilihan dalam memutuskan suatu kebijakan tertentu dalam hal pemanfaatan dana.

Sumber daya hutan memiliki fungsi sebagai bahan baku materi dan energi, sebagai asimilator berbagai limbah dan pencemaran serta sebagai penyedia jasa lingkungan secara langsung seperti rekreasi, estetika, pendidikan, kesehatan, dan pendukung sistem kehidupan. Beberapa pakar bahkan menyakini bahwa fungsi hutan sesungguhnya jauh lebih banyak dan lebih penting daripada yang diketahui saat ini (Ridho *et al.* 2015). Untuk mempermudah dalam melakukan valuasi ekonomi dan kepentingan lainnya, Dixon dan Suherman (1990) dalam Ridho (2015) mengelompokkan beragam fungsi dan manfaat sumber daya hutan menjadi delapan kategori, yakni:

- 1) Manfaat untuk kepentingan konsumsi
- 2) Manfaat untuk rekreasi
- 3) Manfaat untuk fungsi lindung
- 4) Manfaat untuk mendukung terjadinya proses yang bersifat ekologis seperti siklus hara, pengaturan iklim

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

mikro dan makro, pembentukan formasi tanah, pendukung kehidupan global

- 5) Manfaat untuk menyimpan keanekaragaman hayati sebagai sumber genetik, perlindungan keanekaragaman spesies dan keanekaragaman ekosistem
- 6) Manfaat untuk pendidikan dan penelitian
- 7) Manfaat yang bersifat bukan konsumsi seperti manfaat budaya, sejarah, spiritual dan keagamaan, serta
- 8) Manfaat-manfaat yang mungkin dapat diperoleh di masa depan

Pembangunan ekonomi yang menguras sumber daya alam akan menyebabkan semakin menurunnya cadangan sumber daya alam. Jika kualitas dan kuantitas sumber daya alam semakin menurun dari tahun ke tahun, pencapaian cita-cita pembangunan nasional berkelanjutan yang diartikan sebagai pembangunan yang tidak meminta pengorbanan dari generasi yang akan datang, mungkin tidak akan dapat terealisasi jika pemikiran pengelolaan sumber daya alam tidak diubah ke arah manajemen sumber daya alam yang berkelanjutan. Banyak yang beranggapan bahwa produk berbasis sumber daya alam adalah sumber daya yang tidak terbarukan. Memang benar, sebagian dari produk berbasis sumber daya alam misalnya produk hasil pertambangan mineral, gas dan minyak bumi adalah sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Namun, selain produk hasil tambang, sejatinya sebagian besar produk berbasis sumber daya alam seperti hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan hasil hutan

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

adalah sumber daya terbarukan. Hutan sering kali dituding sebagai sumber daya alam yang dikhawatirkan kelestariannya sesungguhnya merupakan sumber daya terbarukan karena komponen utama penyusun hutan adalah sumber unsur hayati terutama pepohonan yang secara teknis memiliki kemampuan untuk mempertahankan kehidupannya.

Walaupun secara teoritis hutan adalah sumber daya terbarukan, tetapi eksploitasi berlebihan yang tidak bertanggung jawab tanpa mengaidahkan kelestarian akan mengakibatkan sumber daya hutan yang bermuara pada berkurangnya atau bahkan hilangnya fungsi hutan. Padahal fungsi lingkungan hutan sangat sulit disubstitusi dengan produk buatan manusia karena ekosistem hutan terbentuk dari interaksi yang kompleks dari unsur hayati, non hayati dan lingkungannya. Hal ini menyebabkan hutan memiliki multifungsi yang amat sangat penting bagi makhluk hidup. Dengan fungsi yang beranekaragam, sumber daya hutan dapat menyediakan berbagai kebutuhan dan keinginan makhluk hidup (manusia).

Mengingat pentingnya fungsi lingkungan bagi kehidupan manusia, alokasi pemanfaatan sumber daya alam yang optimal hendaknya menjadi perhatian yang serius dari penentu kebijakan dan publik. Optimasi pemanfaatan sumber daya alam absolut diperlukan mengingat semakin langkanya sumber daya hutan, meningkatnya pengetahuan tentang implikasi sosial-ekonomi dari praktik perusakan sumber daya alam serta semakin berkembangnya ide pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan. Oleh karena itu harus

dipastikan bahwa proses pembuatan kebijakan pembangunan harus lebih memperhatikan aspek kelestarian sumber daya alam dan lingkungan.

## **2.7 Kebijakan Tarif dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan**

Salah satu instrumen kebijakan yang sangat urgen dalam pengelolaan sumber daya alam dan hutan adalah instrumen fiskal. Tarif merupakan instrumen instrumen fiskal yang paling sering dipergunakan dan berpengaruh dalam menentukan kinerja pengelolaan hutan (Nurrochmat *et al.* 2015). Oleh karena itu, dalam upaya menjamin keberadaan kawasan hutan, keberlangsungan fungsi hutan, pemanfaatan hasil hutan yang optimal, pengendalian penggunaan kawasan hutan oleh sektor kehutanan sendiri maupun sektor-sektor lain, serta untuk menjamin pemenuhan kebutuhan peri kehidupan masyarakat dan kehidupan flora dan fauna, penyediaan udara bersih, air ataupun jasa lingkungan lainnya maka operasionalisasi kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan hutan perlu ditur dengan perangkat instrumen tarif kehutanan.

Pemberlakukan instrumen tarif kehutanan di Republik ini sebagian besar diwujudkan dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pengenaan PNBP kehutanan dari kegiatan pengelolaan hutan, pemanfaatan hasil hutan, maupun penggunaan kawasan hutan merupakan alah satu instrumen yang penting dalam upaya menjamin keberlangsungan fungsi hutan serta meningkatkan kontribusi penerimaan sektor kehutanan bagi pendapatan negara/daerah. Penerimaan

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

Negara Bukan Pajak merupakan penerimaan negara yang tidak berasal dari penerimaan pajak. PNBP diatur dengan peraturan pemerintah dan dipungut dari setiap kementerian maupun lembaga negara. Pungutan dari usaha di sektor kehutanan yang saat ini berlaku di Indonesia sebagian besar merupakan PNBP. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 PNBP yang Berlaku di Kementerian Kehutanan meliputi sebagai berikut :

- 1) Dana Reboisasi
- 2) Provisi Sumber Daya Hutan
- 3) Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam
- 4) Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman dengan Sistem Tebang Habis Permudaan Buatan
- 5) Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu
- 6) Iuran Izin Pemanfaatan Kawasan
- 7) Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil hutan Kayu Restorasi Ekosistem pada Hutan Produksi
- 8) Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi
- 9) Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat
- 10) Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Kemasyarakatan
- 11) Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Desa
- 12) Ganti Rugi Tegakan
- 13) Penggantian Nilai Tegakan

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

- 14) Transaksi kegiatan penyerapan dan atau penyimpanan karbon dari kawasan hutan
- 15) Hasil Silvopastural Sistem
- 16) Hasil Silvofishery Sistem
- 17) Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan
- 18) Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam
- 19) Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar
- 20) Denda Administratif bidang perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
- 21) Hasil Lelang Kayu Temuan, serta Hasil Lelang Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi Undang-Undang
- 22) Iuran Usaha Pemanfaatan Air dalam Kawasan Hutan Konservasi
- 23) Iuran Usaha Pemanfaatan Energi Air dalam Kawasan Hutan Konservasi
- 24) Pungutan Usaha Pemanfaatan Air dalam Kawasan Hutan Konservasi
- 25) Pungutan Usaha Pemanfaatan Energi Air dalam Kawasan Hutan Konservasi
- 26) Kegiatan Perizinan dibidang Pembenihan
- 27) Sertifikasi Benih
- 28) Iuran Pengumpulan Benih dan Anakan
- 29) Jasa Laboratorium
- 30) Produk Samping Hasil Penelitian
- 31) Jasa Perpustakaan
- 32) Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana yang terkait dengan tugas dan fungsi dan,
- 33) Jasa Lainnya

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*



## BAB III

# BALI DAN SOSIAL EKONOMI PENENTU HUTAN LESTARI

### 3.1 Selang Pandang Pulau Bali

Provinsi Bali merupakan salah satu dari 33 provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah sebesar 5.636,66 km<sup>2</sup> atau 0,29 persen dari luas wilayah Indonesia. Provinsi Bali terdiri atas satu pulau utama, yaitu Pulau Bali dan beberapa pulau kecil lainnya, seperti Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Serangan, dan Pulau Menjangan. Berdasarkan proyeksi penduduk dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, tahun 2020 penduduk Bali tercatat sebanyak 4.380.800 jiwa dimana penduduk berjenis kelamin pria sebanyak 2.206.200 jiwa dan wanita sebanyak 2.174.600 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 750.000 jiwa / km<sup>2</sup>.

Secara administratif, Provinsi Bali terbagi menjadi 8 kabupaten, 1 Kota, 57 kecamatan, 715 desa atau kelurahan, 1.453 *desa pekraman*, dan 4.361 *banjar pekraman*. Luas wilayah jika terbagi menurut kabupaten/kota, maka Kabupaten Buleleng memiliki wilayah terluas, yaitu 1.365,88 km<sup>2</sup>, diikuti Kabupaten Jembrana 841,80 km<sup>2</sup>, Karangasem 839,54 km<sup>2</sup>, Tabanan 839,33 km<sup>2</sup>, Bangli 520,81 km<sup>2</sup>, Badung 418,52 km<sup>2</sup>, Gianyar 368,00 km<sup>2</sup>, Klungkung 315,00 km<sup>2</sup>, dan terkecil adalah Kota Denpasar dengan luas wilayah 127,78 km<sup>2</sup>.

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

Bali merupakan pulau yang dikelilingi oleh laut dengan panjang garis pantai kurang lebih 470 km. Pulau Bali terdiri dari beberapa pulau, yakni pulau Bali sebagai pulau terbesar, pulau Nusa Penida, pulau Nusa Ceningan, pulau Serangan, dan pulau Menjangan, yang seluruhnya mempunyai luas 5.63,86 km<sup>2</sup> (0,29 persen) dari luas kepulauan Indonesia. Secara administratif pemerintah Provinsi Bali terdiri dari 8 (delapan) kabupaten dan 1 (satu) wilayah Kota. Pulau Bali terletak di sebelah utara berbatasan dengan Laut Bali, di sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, di sebelah barat berbatasan dengan Selat Bali, dan disebelah timur berbatasan dengan Selat Lombok.

Daerah Bali juga dapat digolongkan menjadi beberapa 3 bagian yang membujur dari daerah barat ke daerah timur, yaitu :

1. Bagian pesisir selatan, merupakan daerah dataran rendah yang sebagian besar persawahan dan perkebunan rakyat.
2. Bagian tengah, terdiri dari daerah dataran tinggi yang meliputi kabupaten Karangasem, Bangli, Buleleng, Gianyar dan Jembrana.

Bagian pesisir utara, boleh dikatakan hanya memiliki Buleleng yang merupakan dataran rendah dengan perkebunan rakyat dan persawahan. Secara geografis Provinsi Bali terletak pada posisi 8°03'40" sampai dengan 8°50'48" Lintang Selatan dan 114°25'53" sampai dengan 115°42'40" Bujur Timur. Daratan yang ada secara geologi tersusun dari batuan kuarter, kuarter bawah, poliosin dan miosin. Relief dan topografi Pulau Bali terbentuk dari bentangan di bagian tengah pulau yang memanjang dari barat ke timur. Rangkaian pegunungan tersebut terdiri atas dua gunung berapi, yaitu

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

Gunung Agung dan Gunung Batur dengan ketinggian masing-masing 3.140 m dan 1.717 m di atas permukaan laut. Di samping itu, terdapat beberapa pegunungan yang tidak berapi, antara lain Gunung Merbuk (1.386 m), Gunung Patas (1.414 m), dan Gunung Seraya (1.174 m). Bentangan pegunungan ini secara geografis membagi wilayah Bali menjadi dua bagian:

- (1) Bali Utara dengan dataran rendah yang sempit dan kurang landai
- (2) Bali Selatan dengan dataran rendah yang luas dan landai

Provinsi Bali memiliki empat buah danau yang merupakan aset pariwisata, yaitu Danau Beratan, Danau Buyan, Danau Tamblingan, dan Danau Batur. Iklim Bali merupakan iklim laut tropis yang dipengaruhi oleh angin musim yang membentuk dua musim, yakni musim kemarau dan musim penghujan yang diselingi oleh musim pancaroba.



Gambar 3.1 Peta Pulau Bali (Sumber : Bali.com)

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

Rata-rata suhu Bali berkisar antara 28° celcius sampai dengan 30° celcius, namun antar tempat di Bali terdapat variasi sesuai dengan ketinggian yang ada. Bentangan pegunungan membagi Pulau Bali menjadi dua bagian keadaan alam, yaitu bagian utara Bali dan bagian selatan Bali. Bagian selatan Bali cenderung memiliki curah hujan yang lebih besar dibandingkan dengan bagian utara. Kelembapan udara di Bali berkisar antara 90 persen dan pada musim hujan mencapai 100 persen, sedangkan pada musim kering mencapai 60 persen.

Jenis tanah di Bali sebagian besar didominasi oleh tanah regosol dan latasol. Hanya sebagian kecil yang terdiri atas tanah alluvial, mediteran, dan tanah andosol. Jenis tanah Alluvial sangat peka terhadap erosi, jenis tanah ini tersebar di bagian barat sampai Lokapaksa, Patemon, Ringdikit, dan Pempatan. Jenis tanah ini juga terdapat di sekitar Gunung Penyau, Gunung Pintu, Gunung Juwet, dan Gunung Seraya yang secara keseluruhan meliputi 44,90 persen dari luas Pulau Bali.

Jenis tanah regosol yang juga peka terhadap erosi terdapat di bagian timur Amlapura sampai dengan Culik. Jenis tanah ini juga terdapat di pantai Singaraja sampai dengan Seririt, Bubunan, Kekeeran di sekitar Danau Tamblingan, Buyan, dan Beratan, di sekitar kelompok hutan Batukaru serta bagian kecil berada di pantai selatan Desa Kusamba, Sanur, Benoa, dan Kuta. Jenis tanah ini mencapai 39,93 persen dari luas Pulau Bali. Jenis tanah andosol terdapat di sekitar Baturiti, Candi Kuning, Banyuatis, Gobleg, Pupuan, dan sebagian kelompok hutan Gunung Batukaru. Jenis mediteran yang kurang peka terhadap erosi terdapat di daerah Bukit Nusa

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

Penida dan kepulauannya, Bukit Kuta, dan Prapat Agung. Jenis tanah alluvial yang tidak peka terhadap erosi terdapat di dataran Negara, Sumber Kelampok, Manggis, dan Angantelu. Ketiga jenis tanah ini, yaitu andosol, mediteran, dan alluvial sekitar 15,49 persendari luas Pulau Bali.

Bali didukung oleh kawasan hutan yang terletak di daerah pegunungan yang membentang dari barat sampai ke timur Pulau Bali dengan luas kawasan hutan mencapai 22,54 persen dari luas Pulau Bali. Kawasan ini sangat penting karena berfungsi sebagai pelindung mata air, pencegah erosi dan banjir, atau juga dapat digunakan sebagai kawasan hidrologi. Untuk potensi air di samping air danau, kawasan ini dialiri sungai yang bersumber dari hutan, tetapi aliran air lebih banyak mengarah ke daerah selatan dibandingkan dengan ke daerah utara.

### **3.2 Kehutanan di Pulau Bali**

Kawasan Hutan Provinsi Bali yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Penunjukan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 433/Kpts-II/1999 pertanggal 15 Juni 1999 adalah seluas  $\pm$  130.686,01 Ha. Luas kawasan hutan ini mencakup 23.20 persen dari luas Provinsi Bali. Kawasan hutan ini terdiri dari Kawasan Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan kawasan Hutan Produksi. Namun kini daerah Pulau Bali yang luasnya sekitar 5.632 Km<sup>2</sup> atau sekitar 0.28 persen dari keseluruhan luas Wilayah Indonesia saat ini memiliki hutan tropis hanya seluas 1.251,49 Km<sup>2</sup> atau sekitar 22.22 persen dari keseluruhan luas wilayah Pulau Bali masih jauh dari kata ideal yakni 30 persen dari luas daerah. Luas

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

hutan sebesar 22,22 persen itu pun belum tentu utuh karena banyak hutan lindung terutama di Bali bagian barat kini telah dirabas warga dan diganti dengan tanaman produksi. Luas kawasan hutan Bali barat adalah 41.307,27 Ha atau sekitar 7,48 persen dari luas Pulau Bali atau setara dengan 31,61 persen dari total luasan kehutanan di Provinsi Bali yang selaras dengan 49,07 persen dari luas dataran Kabupaten Jembrana.

Provinsi Bali memiliki luas kawasan hutan seluas 130.686,01 Hektar are yang terdiri dari kawasan hutan daratan 127.271,01 Hektar are dan kawasan perairan 3.415,00 Hektar are. Kawasan ini meliputi berbagai fungsi yang berperan sangat penting sebagai penyangga kehidupan sehingga harus dikelola secara arif dengan mempertimbangkan keseimbangan ekologi, sosial dan ekonomi. Dari aspek ekologi, sektor kehutanan diharapkan dapat memberikan dukungan bagi terlaksananya pembangunan sektor lain secara berkelanjutan melalui penyediaan produk dan jasa ekologi. Dari aspek sosial, hutan mempunyai hubungan yang dinamis dengan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan sehingga dapat memanfaatkan tata nilai dan kelembagaan lokal. Pada sisi ekonomis, kehutanan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pemerintah dan masyarakat.

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*



Gambar 3.2 Kawasan Hutan Kintamani  
(Sumber : balipost.com)



Gambar 3.3 Kawasan Hutan Melaya  
(Sumber : balipost.com)

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

Untuk memenuhi harapan-harapan tersebut diatas, pengelolaan hutan di Provinsi Bali dihadapkan pada beberapa permasalahan yang menonjol dalam beberapa tahun terakhir seperti gangguan keamanan hutan berupa penebangan liar, kebakaran hutan dan perambahan hutan sehingga menyebabkan kawasan hutan di Provinsi Bali mengalami kerusakan. Disamping masalah gangguan keamanan hutan, masalah lainnya adalah terdapatnya lahan kritis di dalam kawasan hutan yang cukup luas berupa tanah kosong  $\pm 9.824$  Hektar are dan berupa kawasan dengan pertumbuhan pohon jarang dan semak-semak seluas  $\pm 44.201$  Hektar are.

Guna menanggulangi permasalahan tersebut telah ditetapkan kebijakan untuk mengoptimalkan pengelolaan hutan yang ada termasuk mencegah kerusakan hutan lebih lanjut melalui kegiatan-kegiatan reboisasi, peningkatan konservasi, pengamanan hutan dan pengembangan tanaman produktif. Pengamanan hutan yang telah, sedang dan terus akan dikembangkan adalah pembinaan, penyuluhan, penanggulangan kebakaran hutan, operasi gabungan maupun fungsional serta tindakan hukum.

Situasi hutan di Provinsi Bali mengalami tekanan yang cukup besar, yaitu akibat gangguan keamanan hutan dengan berkurangnya luasan hutan tutupan maupun bertambahnya lahan kritis kawasan hutan di Bali, dimana sangat mempengaruhi iklim makro di Bali dengan semakin panasnya cuaca secara umum, serta berkurangnya debit air di hulu akibat rusaknya hutan di Bali. Kerusakan ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya karena hutan dialih fungsikan menjadi areal

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

permukiman dan tegalan serta akibat kelalaian manusia sehingga terjadi kebakaran hutan. Dapat disebabkan pula oleh penebangan liar dan pencurian hasil hutan. Tabel 3.1 menggambarkan tentang tingkat kerusakan Hutan di Provinsi Bali dalam satu dasawarsa terakhir.

**Tabel 3.1 Kerusakan Lahan Hutan di Provinsi Bali**

Tahun	Kerusakan Hutan (ha)	Perkembangan (%)
2010	3.490	-
2011	3.573	2.37
2012	3.656	2.32
2013	3.739	3.74
2014	3.822	2.21
2015	3.905	2.17
2016	3.988	2.12
2017	4.071	2.08
2018	4.154	2.03
2019	4.237	1.99

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Bali, 2019 (Data diolah)

Data dari tabel 3.1 diatas menyiratkan bahwa tingkat kerusakan hutan di Provinsi Bali selama satu dasawarsa terakhir memiliki *trend* yang meningkat dengan nilai rata-rata sebesar 3.863 Hektar are atau secara prosentase sebesar 2.10 persen dalam 1 dasawarsa terakhir. Hal ini menunjukkan preseden yang kurang baik mengingat hamper setiap tahun terjadi peningkatan kerusakan hutan secara kuantitatif. Secara politis sumber

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

daya alam sudah sangat jelas bahwa ranah Negara sangat kuat dalam implikasi pengaturan dan pengurusan sumber daya alam hutan sangat terasa pengaruhnya, sehingga sangat terasa bahwa pengelolaan sumber daya alam hutan akan menjadi sangat jauh dari alam demokrasi dan keadilan bagi masyarakat (Dharmika, 2014). Pengelolaan hutan secara sentralistik sangat mendongkrak pendapatan Negara (Daerah), namun dilain pihak akan terjadi kerusakan lingkungan hutan yang sangat massif dan termarginalkannya system pengelolaan hutan yang berbasis kearifan ekologi.

Sebagai contoh dalam studi yang pernah dilakukan oleh Dharmika (2014) adanya politik sentralisasi pengelolaan hutan menyebabkan sebagian masyarakat di Kecamatan Pakutatatan Negara melakukan agenda-agenda tersendiri yang terkadang sangat keras dan brutal seperti mencuri kayu, mebakar hutan, mengkapling-kapling wilayah hutan, *ngawen* atau *diawen* hutan (seperti : menebang kayu kemudian tanahnya ditanami vanili, kopi, pisang dan lainnya). Gerakan ini tidak hanya dilakukan secara perseorangan tetapi berkelompok bahkan menggunakan fasilitas Desa Adat semisal dengan memukul kulkul, menggunakan pakaian adat. Belum ada langkah konkrit untuk mengamankan hutan aparat hanya mampu menangkap dan mengamankan kayunya, sementara hutan tetap saja di "perkosa" dan dibiarkan "begitu saja". Hal tersebut merupakan salah satu contoh kecil yang dapat dijadikan gambaran bahwa kerusakan hutan di Provinsi Bali sudah pada kategori mengkhawatirkan yang tentu berimplikasi pada semakin menyusutnya lahan Hutan.

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*



Gambar 3.4 Kawasan Hutan di daerah Batur, Kintamani Kabupaten Bangli. (Sumber : suarabali.com)

Luas kawasan hutan di Provinsi Bali adalah 130.686,01 hektar are yang tersebar di 8 (delapan) kabupaten dan kota, kecuali Kabupaten Gianyar yang tidak memiliki kawasan hutan. Luas hutan tersebut merupakan 23, 20 persen dari luas wilayah pulau Bali. Tabel 3.2 memvisualisasikan luas kawasan Hutan di Provinsi Bali Tahun 2018

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

**Tabel 3.2 Luas Kawasan Hutan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2018**

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (ha)	Luas hutan (ha)	Persentase Luas terhadap Luas Wilayah		
			Kabupaten (%)	Provinsi (%)	Hutan Provinsi (%)
Jembrana	84.180	42.156,27	50,08	7,48	32,26
Tabanan	83.933	9.969,15	11,88	1,77	7,63
Badung	41.852	1.779,87	4,25	0,32	1,36
Gianyar	36.800	-	-	-	-
Klungkung	31.500	1.048,50	3,33	0,19	0,80
Bangli	52.081	9.341,28	17,94	1,66	7,15
Karangasem	83.954	14.220,23	16,94	2,52	10,88
Buleleng	136.588	51.436,21	37,66	9,13	39,36
Denpasar	12.398	734,50	5,92	0,13	0,56
Provinsi Bali	563.286	130.686,01	-	23,20	100,00

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Bali, 2019

Kondisi hutan di Provinsi Bali mengalami tekanan yang cukup besar, yaitu akibat gangguan keamanan hutan dengan berkurangnya luasan hutan tutupan maupun bertambahnya lahan kritis kawasan hutan di Bali, dimana sangat mempengaruhi iklim makro di Bali dengan semakin panasnya cuaca secara umum, serta berkurangnya debit air di hulu akibat rusaknya hutan di Bali. Kerusakan ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya karena hutan dialih fungsikan menjadi areal permukiman dan tegalan serta akibat kelalaian manusia

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

sehingga terjadi kebakaran hutan. Dapat disebabkan pula oleh penebangan liar dan pencurian hasil hutan.



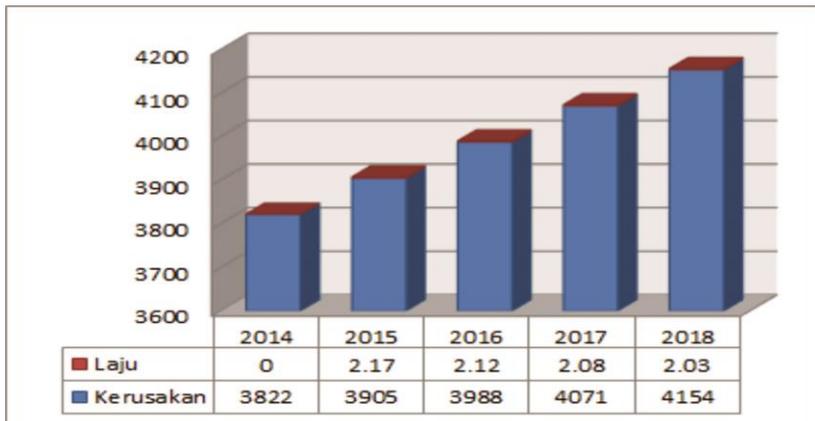
Gambar 3.5 Barang Bukti Hasil Pembalakan liar  
(Sumber : metroballi.com)

Pembangunan ekonomi suatu daerah pada hakekatnya adalah suatu rangkaian usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Indikator yang biasa digunakan untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pertumbuhan pendapatan per kapita masyarakat di wilayah tersebut. Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan juga ekonomi masyarakat, menjadi tekanan terhadap pemanfaatan sumberdaya alam semakin meningkat. Peningkatan laju pertumbuhan penduduk akan menuntut ketersediaan pemenuhan alat pemuas dari yang paling mendasar (*basic needs*) sampai

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

yang bersifat eksklusif (*superior*). Peningkatan kebutuhan ini menjadikan manusia dengan berbagai peran dan kapasitas yang dimilikinya memanfaatkan potensi sumber daya alam dan lingkungan sebagai strategi praktis dalam memenuhi kebutuhannya. Motivasi dan teknologi yang dipergunakan dalam eksploitasi sumber daya alam ini akan menjadi kunci seberapa besar tekanan terhadap sumberdaya alam dan lingkungan akan terjadi. Termasuk disini adalah peningkatan terhadap pemanfaatan lahan hutan sebagai tempat membuka lahan pertanian baru serta hasil-hasil hutan sehingga penduduk merupakan aktor utama terhadap keberadaan hutan yang wajib untuk dilestarikan. Diagram 1.1 merangkum data kerusakan Hutan di Provinsi Bali dalam 5 Tahun terakhir.

**Gambar 3.6**  
**Kerusakan Hutan Di Provinsi Bali 2014-2018**



Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Bali, 2019 (Data diolah)

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

Diagram diatas menarasikan dalam 5 tahun terakhir telah terjadi peningkatan kerusakan hutan dengan tingkat rata-rata seluas 3.988 hektar are atau sekitar 5.33 persen dalam 5 tahun terakhir. Hal tersebut terjadi karena maraknya alih fungsi lahan menjadi areal pemukiman dan tegalan serta akibat dari kelalaian manusia sehingga terjadi kebakaran hutan serta dapat disebabkan oleh penebangan liar serta pencurian hasil hutan.



Gambar 3.7 Kekeringan Hutan di Taman Nasional Bali Barat.(Sumber : radarbali.jawapost.com)

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*



Gambar 3.8 Kekeringan Hutan yang meluas di Kawasan Hutan Bali Barat. (Sumber : radarbali.com)



Gambar 3.9 Kebakaran hutan di lereng bukit abang Karangasem. (Sumber : balipost.com)

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*



Gambar 3.10 Hutan Mangrove di Kota Denpasar  
(Sumber : TribunBali.com)

Sebagai potret riil yang terjadi hingga saat ini sekitar 31 persen kondisi kawasan hutan Bali Barat telah mengalami kerusakan yaitu seluas 11.461,95 Ha dari luas wilayah operasi Kabupaten Jembrana dengan rincian yakni : 1) hutan produksi : 2.408,10 Ha atau sekitar (28,31 %), 2) hutan lindung : 8.914,14 Ha atau sekitar (80,45 %). Kerusakan yang sama juga terjadi di wilayah Bali selatan, kerusakan hutan mangrove pun sangat nyata. Pulau Bali memiliki hutan mangrove seluas 3.005,9 Ha dan 1.373, 5 Ha berada di Taman Hutan Rakyat Ngurah Rai (Prapat Benoa). Kondisi hutan mangrove di wilayah ini juga *setali tiga uang* . Banyak penyebab yang mengakibatkan kerusakan hutan mangrove seperti alih fungsi lahan

menjadi tambak, pertokoan, pemukiman, perkantoran, hotel, rumah sakit, jalan raya, pembangkit listrik, perluasan pelabuhan Benoa, perluasan Bandara Ngurah Rai, sebagai lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan lain sebagainya.

### **3.3 Kearifan Ekologi Hindu di Pulau Bali**

Pengetahuan *krama* hindu Bali tentang lingkungan alam semesta amatlah sangat sistematis, *holistic*. Manusia meruapaka bagian parsial dari lingkungan tersebut oleh karena itu mereka cenderung mengarah kepada ekosentrisme. Lingkungan alam semesta merupakan suatu harmonia yang di kreasi dan diatur oleh *Brahma*. Planet-planet disebut sebagai *Brahmanda* sebagaimana yangb termaktub dalam kitab Brahmanda Purana (Gonda, 1953). Manusia wajib dan senantiasa menjaga keselarasan alam dengan terlebih dahulu memahami hokum-huku yang dimilikinya. Keselarasan alam semesta akan memberikan kesejahteraan kepada umat manusia (Dharmika, 2014).

Dalam konteks Hubungan Manusia (*Krama*) Hindu dengan hutan, *krama* Bali mengajak umatnya untuk menghormati Gunung (Hutan) sebagai penghormatan tertinggi kepada Dewa Siwa. Kepala Dewa Siwa dengan rambutNya yang tebal dimaknai oleh umat sebagai hutan lebat di gunung atau pegunungan. Oleh karena itulah gunung dan hutan hulunya bumi yang sangat disakralkan yang diwujudkan dengan mendirikan tempat suci di puncak-puncak gunung karena dimaknai akan memberikan kesejahteraan kepada umat manusia.

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

Dalam teks-teks sastra agama ada berbagai macam sebutan populer tentang hutan seperti : *Wana Kertih, Maha Wana, Tapa Wana, Sri Wana, Alas Angker, Alas Kekeran, Alas Harum, Alas Rasmini, Kalpataru, Banaspati, Hulu Kayu, Kutuhalas* maupun *Abian*. Konsep – konsep tersebut merupakan penghormatan maupun kecintaan karma Hindu Bali terhadap hutan. Lontar *Manawa Swarga* menyebutkan bahwa pada zaman kerajaan sudah dikenal adanya sanksi bagi mereka yang menebang pohon secara sembarangan. Manusia diumpamakan sebagai *manik* sedangkan alam sebagai *cecupu*, perumpaan ini mengandung interpretasi bahwa manusia hidup ditengah-tengah alam dan alamlah yang memberikan kehidupan kepada manusia, seandainya manusia mengambil makanan tanpa batas maka yang terjadi alam ini akan hancur. Dalam konteks ini, lebih lanjut dikembangkan wawasan lingkungan yang lebih dekat dengan kehidupan manusia, hutan, gunung, danau, pantai, laut, sungai sangat mendapat perhatian karena diketahui dan dirasakan tidak saja memberikan kesejahteraan tetapi juga memberikan kesucian pikiran. Di tempat tersebutlah kemudian didirikan tempat suci dengan rangkaian aktifitas ritual.

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*



Gambar 3.11 Ritualisme. (Sumber : inews.id)

*Kahyangan* didirikan di tempat-tempat yang telah terpilih berdasar kitab suci Weda, yang selanjutnya dikembangkan pengetahuan kelingkungan yang lebih erat dengan kehidupan manusia. Sebagai contoh gunung, danau, laut, sungai maupun hutan sangat mendapat perhatian, karena diketahui dan dirasakan tidak saja memberikan kerahayuan tetapi juga kesucian pikiran. Pura adalah wadah yang memotivasi kesucian agar manusia selalu berbuat suci di dunia karena melalui jalan kesucianlah manusia bisa mendapatkan keheningan dan kesehatan badan, maka pura dinyatakan sebagai kawasan yang lebih suci daripada kawasan lain. Pura *Kahyangan Jagat* dan *Sad Kahyangan* terletak di arah

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

matahari terbit, gunung atau laut. Pemilihan tempat seperti itu wajib diimplementasikan sebagai tempat untuk melakukan proses penyucian diri. Gunung sebagai *lingga acala* Sang Hyang Siwa, tidak hanya suci, tetapi juga dinyatakan sebagai asalnya kerahayuan. Gunung, dari mana air mengalir, dari mana kesuburan itu datang memang sangat menentukan kesejahteraan dan kemakmuran hidup makhluk hidup. Maka di kaki gunung itulah manusia membangun peradabannya. Gunung secara simbolik diwujudkan sebagai padmasana yang suci dan penuh makna yang dijadikan *stana* Sang Hyang Siwa.



Gambar 3.12 Pura Pucak Sari. (Sumber : pulaubali.id)

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*



Gambar 3.13 Pura Sabang Daat. (Sumber : [baliexpress.jawapost.com](http://baliexpress.jawapost.com))



Gambar 3.14 Pura Mekori. (Sumber : [wordpress.com](http://wordpress.com))

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

Pada masa megalithikum keyakinan terhadap gunung dan hutan telah diimplementasikan oleh masyarakat yang hidup di masa itu, baik berdasarkan keyakinan maupun atas dasar rasionalitas berpikir. Berdasarkan keyakinan, bahwa gunung adalah tempat bersemayamnya roh kakek dan nenek moyang. Para arwah kakek-nenek moyang masyarakat tersebut bersemayam di puncak gunung dan oleh karena itu gunung dianggap sebagai tempat yang suci dan wajib hukumnya disucikan melalui aktifitas spiritual, seperti upacara, meditasi, semadi dan perilaku-prilaku lainnya yang mencirikan adanya aktifitas atau usaha untuk menyucikan tempat itu (Dharmika, 2020). Secara rasional para penganut keyakinan yang hidup di masa megalithikum akan menaruh perhatian yang besar akan terpeliharanya kesuburan flora, fauna yang ada di alam semesta ini. Mereka mengharapkan kesuburan senantiasa terpelihara sehingga dapat memberi kesejahteraan pada kehidupan di dunia ini. Terpeliharanya tumbuh-tumbuhan, sungai yang bening, air pancuran yang jernih akan memberikan kesuburan pada masyarakat. Alam yang terpeliharadengan baik dengan usaha yang benar-benar jernih akan memeberikan kesejahteraan kepada mereka sekalian. Makanan yang berlimpah ruah, tumbuhan yang terpelihara, binatang yang hidup sehat akan memberikan kesehatan kepada penduduk dan anak cucu mereka, inilah urgensitas makna dari pemeliharaan yang bener-benar berarti bagi kehidupan.

Demikian banyak jenis flora fauna yang ada di hutan yang tergabung dalam ekosistem hutan gunung yang tentunya juga termasuk manusia sebagai elemen

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

inti. Manusia tanpa hutan adalah suatu keniscayaan. Perlu disadari bahwa dalam daur materi dan jaringan transformasi energi utama dan pertama adalah matahari. Energi matahari hanya dapat disintesis dalam bentuk kehidupan oleh tumbuhan berdaun hijau. Makhluk hidup lainnya adalah sebagai produsen sekunder, tersier dan seterusnya. Dalam konteks ini tumbuh-tumbuhan adalah produsen utama, dia mampu hidup tanpa bantuan makhluk lainnya bahkan dia juga dapat hidup tanpa bantuan manusia tetapi sebaliknya manusia tidak mampu hidup tanpa tumbuh-tumbuhan.

Ajaran dalam Kitab Suci Weda (Yayur Weda XVI, Sloka 17) melalui upakara *Wana Kertih* : *Sembah kehadapan Sang Hyang Rudra yang merupakan pengawal hutan belantara, tanam-tanaman dan tubuh-tumbuhan yang berkhasiat obat, Sang Hyang Siwa menyantap racun dan memberi minuman para Dewa dengan cara yang sama, tanam-tanaman menyerap karbondioksida dan memancarkan zat asam. Maka dari itu mereka dipuja sebagai Para Rudra yang dijelmakan.*

Demikian vitalnya fungsi hutan bagi *krama* Bali. Diciptakanlah nilai, norma, hukum maupun aturan yang termuat dalam berbagai kearifan lokal ekologi, teks prasasti, ritual, cerita rakyat untuk menjaga kelestarian hutan. Menurut studi yang perlah dilakukan oleh Semadi (2008) bahwa dalam prasasti kuno seperti prasasti *Buwahan* (1103 Saka) adal larangan memotong kayu larangan tanpa izin seperti kayu kemiri, boddhi, beringin. Dalam prasasti 355 *Buwahan* tahun Saka 947 disebutkan Raja Marakata mengizinkan penduduk Desa *Buwahan* Kuno untuk membuka atau membeli hutan yang

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

berbatasan dengan desanya untuk menambah tempat mengembalakan ternaknya dan memenuhi kebutuhan lainnya seluas 1100 x 900 *depa*.

Larangan pembukaan lahan tanpa tujuan yang jelas juga dapat ditemukan dalam prasasti 633 *Bulian* Tahun 1103 Saka. Dalam prasasti *Penataran Besakih A* yang berangka tahun 1366 Saka atau sekitar Tahun 1444 masehi dimuat permakluman raja kepada seluruh rakyat Bali terutamanya para pejabat seperti *Hulupati*, *Adipati* dan pejabat lainnya untuk menjaga kawasan hutan lindung disekitar Pura Besakih. Kajian yang dilakukan Atmaja (2008) menemukan fakta bahwa kearifan ekologi terselubung mistik dapat dijumpai pada pengelolaan hutan Kera di Sangeh Badung, Alas Kedaton Tabanan, Alas Kayu Selem Buleleng, Alas Makori Tabanan, Alas Jurit Tabanan, Hutan Desa adat Tenganan Pegringsingan Karangasem (Dharmika, 2014).

Pengetahuan lingkungan karma Bali kuno, khususnya hutan lebih dikongkretkan diantaranya penunjukkan kawasan hutan Bali barat seluas 20.600 hektar are tahun 1917 sebagai Taman Perlindungan Alam dan Cagar Alam Sangeh pada Tahun 1919. Pada Tahun 1924 hutan-hutan di Bali sudah ditetapkan sebagai hutan tutupan atau pada era saat ini dikenal dengan istilah kawasan hutan. Studi ilmiah yang dilakukan oleh Silanawa (2009) menyebutkan bahwa tahun 1938 ketika semua Raja di Bali jatuh kepada kolonialisme Belanda, namun terkait hal untuk menyelamatkan Bali, 8 (Delapan) kerajaan di Bali membentuk suatu *Paruman Agung*. Salah satu butir kesepakatannya tertuang mellalui keputusan Nomor 1 Tanggal 30 September 1939 tentang *Pasubaya*

berikut : *Kerajaan yang sedikit penghasilannya dapat menerima sumbangan dari kerajaan yang kaya.* Nilai kearifan ekologi seperti *awig-awig sekeha* dijadikan peraturan perlindungan, *awig-awig sekeha* Kopi menjadi peraturan penertiban perabasan Kopi. Seluruh kawasan Hutan pada tahun 1938 artinya sudah mempunyai kekuatan hukum.

### **3.4 Local Genius**

Kearifan lokal merupakan suatu bentuk kearifan lingkungan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat di suatu wilayah (Suhartini,2009), sehingga kearifan lokal merujuk pada lokalitas dan komunitas tertentu. Kearifan lokal merupakan tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan tempatnya hidup secara arif. Maka dari itu kearifan lokal tidaklah sama pada tempat waktu yang berbeda dan suku yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh tantangan alam dan kebutuhan hidupnya yang berbeda – beda, sehingga pengalamannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memunculkan berbagai sistem pengetahuan baik yang berhubungan dengan lingkungan maupun sosial.

Sebagai salah satu bentuk perilaku manusia, kearifan lokal bukanlah suatu hal yang statis melainkan berubah sejalan dengan waktu, tergantung dari tatanan dan ikatan sosial budaya yang ada dalam masyarakat. Kearifan lokal tidak hanya berhenti pada etika, tetapi sampai pada norma dan tindakan serta tingkah laku, sehingga kearifan lokal dapat menjadi suatu religi yang mempedomani manusia dalam bersikap, bertindak, baik

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

dalam konteks kehidupan sehari-hari maupun menentukan peradaban manusia yang lebih jauh.

Kearifan tradisional dalam pengelolaan di suatu komunitas dapat mengalami erosi, penyebabnya dapat beranekaragam, antara lain menurut Sukerada (2008) adalah :

- 1) Terjadi proses desakralisasi alam oleh invasi dan dominasi ilmu pengetahuan dan teknologi modern
- 2) Alam tidak lagi bersifat sacral tetapi bernilai ekonomis tinggi
- 3) Dominasi filsafat dan etika barat yang bersumber dari Aristoteles dan diperkuat oleh paradigma ilmu pengetahuan yang telah menguburkan dalam – dalam etika masyarakat adat
- 4) Hilangnya keanekaragaman hayati
- 5) Hilangnya hak-hak masyarakat adat, termasuk hak untuk hidup dan bertahan sesuai dengan identitas dan keunikan tradisi budayanya serta hak untuk menentukan diri sendiri

Dari pandangan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kearifan lokal adalah hasil sebuah proses yang lama dan telah menjadi budaya pada suatu entitas dimana di dalamnya terdapat etika dan norma yang mendasari anggotanya bertindak di lingkungannya. Oleh karena itu, kearifan lokal penting untuk dilestarikan dalam suatu masyarakat guna menjaga keseimbangan dengan lingkungannya dan sekaligus dapat melestarikan lingkungannya.

Salah satu contoh kearifan lokal dalam menjaga kelestarian hutan yang ada di Bali adalah salah satu

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

contoh tradisi yang sampai saat ini masih dipegang teguh oleh masyarakat adat di Desa Tenganan Pagringsingan selain taat terhadap *awig-awig* juga taat terhadap mitos yang diwarisi secara turun temurun yang tertuang dalam cerita rakyat / *Tudung* atau *Lelipi Selahan Bukit* yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Mitos *lelipi selahan bukit* telah mejadi semacam panutan dalam memperlakukan hutan yang ada di sekeliling mereka. Dalam usaha menyesuaikan diri dengan lingkungan alamnya, masyarakat terikat oleh kaidah-kaidah yang berlaku dalam pemahaman mereka sebagaimana tercermin dalam lambang-lambang tang mereka beri makna tertentu. Lambang-lambang seperti *lelipi* itu menunjukkan rasa hormat penuh getaran ketakutan terhadap dasar eksistensinya sendiri. Lambang-lambang itu merupakan jendela-jendela yang mampu membuka pandangan terhadap dunia, dewa-dewa pun merupakan lambang, karena lewat seekor *lelipi* yang mengangkat manusia keluar badannya sendiri, dewa-dewa itu seolah-olah dihadirkan di tengah-tengah umat manusia (Subrata, *et al.* 2017).

Adanya keyakinan seekor *lelipi* yang menjaga kelestarian hutan di Desa Tenganan Pagringsingan tumbuh atas dasar kesadaran mereka tentang kedudukan dan fungsi hutan, dimana mereka sadar bahwa manusia lahir, hutan merupakan sumber kehidupan yang mencukupi kebutuhan hidup mereka. Mengenai mitos lelepi selahan bukit dapat di deskripsikan sebagai berikut (Tjok. Raka Dherana dalam Subrata, *et al.* 2017) :

*"Di Masa terdahulu, Bendesa adat Tenganan memiliki sebuah ladang yang ditanamami berbagai buah-*

HUTAN LESTARI  
Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya

*buahan. Ladang tersebut dikerjakan oleh seorang penggarap yang bernama I Tudung. Pada suatu ketika diladang milik Bendesa adat tersebut hasil yang ada di ladang dicuri. Mengetahui hal tersebut I Tudung merasa malu kepada Bendesa karena ia berpikir jangan-jangan nanti malah I Tudung yang dicurigai mencuri hasil olahan yang ada di ladang tersebut. Hal itu membuat I Tudung meutar otak agar tidak dicurigai, kemudian I Tudung pergi untuk bertapa di suatu tempat, yang mana tempat tersebut sekarang dinamakan Pura Nagasulung. Dalam pertapaannya I Tudung memohon kepada Sang Hyang Widhi Wasa agar dianugerahi rupa yang menakutkan sehingga orang tidak berani mencuri. Permohonan I Tudung tersebut dikabulkan ia dianugerahi rupa ular yang sangat besar. Pada suatu ketika anak Bendesa membawakan I Tudung nasi seperti yang biasa ia lakukan sehari-hari namun ternyata anak Bendesa tersebut tidak menemukan I Tudung di ladang. Diceritakan bahwa anak Bendesa tersebut mencari dan memanggil nama I Tudung berkali-kali hingga pada suatu ketika muncullah seekor ular besar, mengetahui hal itu anak Bendesa tersebut kemudian berlari pulang dan menceritakan apa yang ia alami di ladangnya. Begitu mendengar cerita sang anak, maka Bendesa segera bergegas menuju ladang miliknya, sesampainya di ladang Bendesa memanggil-manggil nama I Tudung dan benar saja yang muncul adalah seekor ular besar. Ular tersebut yang tak lain adalah I Tudung kemudian menjelaskan apa yang terjadi dengan sebenarnya dan saat itulah merupakan saat akhir/terakhir kalinya I Tudung berbicara sebagai manusia. Sejak saat itu, maka ular besar I Tudung itu*

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

*selain diberi tugas menjaga ladang juga bertugas menjaga wilayah Desa Tenganan. Masyarakat Desa Tenganan sangat percaya pada ular besar ini dan di desa tersebut di kenal dengan nama Lelipi Selahan Bukit”.*

Adanya kepercayaan yang telah terlembaga dan berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat tersebut sangat berpengaruh terhadap kelestarian hutan di desa Adat Tenganan Pagringsingan. Kepercayaan tersebut telah mampu menata aktualisasi interaksi antara manusia dan lingkungan alam, termasuk juga menata tindakan-tindakan masyarakat adat di dalam mengelola hutan serta sumber daya yang terkandung didalamnya. Mitos yang bersifat kearifan lokal tentang *Lelipi Selahan Bukit* di Desa Adat Tenganan telah berfungsi dan berpengaruh dalam memberikan arah, pijakan maupun pedoman untuk bertingkah laku terhadap alam dan lingkungan. Kenyakinan tersebut juga telah menyadarkan masyarakat Desa Tenganan tentang adanya kekuatan gaib di luar mereka yang berwujud *lelipi* yang menjaga hutan dan sumber-sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*



Gambar 3.15 Kawasan Hutan yang masih Lestari di Desa Tenganan Pangringsingan (Sumber : balihbalihan.com)

### **3.5 Wana Kertih**

Dalam tataran filosofi Hindu, prinsip perlindungan hutan dapat dilihat pada sejumlah pustaka suci. Upacara *Wana Kertih* adalah merupakan bagian dari *Sad Kertih*, yang bermakna menjaga keharmonisan hidup manusia dengan Tuhan, keharmonisan hidup antara sesama umat manusia dan menjaga keharmonisan umat manusia dengan lingkungannya.

Dalam tataran filosofi Hindu, prinsip perlindungan hutan dapat dilihat pada sejumlah pustaka suci. Prinsip ini terangkum dalam *Sad Kertih* yang tertuang dalam *Kitab Purana* utamanya mengenai *Wana Kertih* yaitu upaya untuk melestarikan hutan. *Sad Kertih* merupakan enam konsep dalam melestarikan lingkungan yang terdiri dari upacara untuk menyucikan atma (*Atma Kertih*), upacara melestarikan samudera (*Samudra Kertih*),

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

upacara melestarikan hutan (*Wana Kertih*), upacara menjaga kelestarian danau (*Danau Kertih*), upacara melestarikan keharmonisan hubungan sosial yang dinamis dan produktif berdasarkan kebenaran (*Jagat Kertih*) dan *Jana Kertih* yakni upaya untuk menjaga kualitas individu.

Di hutan umumnya di bangun pura *Alas Angker* (hutan lindung) untuk menjaga kelestarian hutan secara niskala, di hutan juga ada upacara *pakelem* ke hutan atau ke gunung. Hutan dalam lontar *Bhuwana Kosa VIII*, 2-3 dikatakan sebagai sumber penyucian alam dimana patra (tumbuh-tumbuhan) dan pertiwi (tanah) merupakan pelebur dari segala hal yang kotor di dunia ini. Pustaka suci *Regveda III.51.5* misalnya menyebutkan: "*Indraa ya dyaava osadhir uta aapah. Rayim raksanti jiyaro vanani*" yang artinya tanpa terlindungi sumber-sumber alam tersebut manusia tidak akan pernah mendapatkan kehidupan yang aman damai dan sejahtera. Selanjutnya dalam kitab Pancawati sebagaimana yang dikutip oleh I Ketut Wiana dijabarkan mengenai tiga fungsi hutan untuk membangun hutan lestari (*wana asri*) yakni:

- 1) *Maha wana* adalah hutan belantara sebagai sumber kehidupan manusia dan pelindung berbagai sumber hayati didalamnya. Maha wana juga sebagai waduk alami yang akan menyimpan dan mengalirkan air sepanjang tahun. Air dalam ajaran Hindu seperti dinyatakan dalam Bhagawadgita 14 bahwa makanan berasal dari air atau hujan. Munculnya hujan dari yadnya dan yadnya itu adalah karma. Dari ajaran Bhagawadgita itu dapat kita ambil maknanya marilah kita berkarma nyata untuk memelihara hutan yang kita

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

miliki ini. Karena tanpa hutan yang lestari kita akan mengalami krisis air ini sama dengan krisis kehidupan. Ini mengajarkan kita agar kita mengetahui fungsi penting dari hutan dan berusaha untuk menjaganya.

- 2) *Tapa wana* merupakan fungsi hutan sebagai sarana dalam spiritual yang menggemakan ajaran spiritual dimana di hutan para pertapa mendirikan asram dan memanjat doa serta mengajarkan ajaran-ajaran suci ke dalam setiap hati umat manusia. Disini tersirat ajaran bahwa manusia harus menjaga tingkat kesucian dari hutan hingga orang tidak dengan seenaknya menebang pohon yang terdapat di hutan.
- 3) *Sri wana* adalah hutan sebagai sarana ekonomi masyarakat karena dari hutanlah sebagian hasil bumi dapat dihasilkan, dengan merusak hutan berarti merusak salah satu penunjang ekonomi masyarakat.

Ketiga konsep ini sama dengan pola pikir modern dimana orang modern juga memiliki pemikiran bahwa hutan merupakan paru-paru dunia yang menjaga keseimbangan alam dan tempat menyimpan air yang menjadi sumber air tanah, hutan juga dapat menjadi tempat rekreasi untuk menenangkan diri setelah jenuh menjalani rutinitas yang hanya menghasilkan stress dan ketegangan jiwa dan hutan pula yang menjadi tempat penghasil komoditi yang bisa meningkatkan tarap ekonomi masyarakat. Hindu memiliki memiliki konsep yang luar biasa tentang hutan.

Hutan memiliki peran yang sangat strategis bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Penting karena hutan memiliki beberapa fungsi untuk menyangga keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

mahluk hidup yang ada didalamnya. Di Bali hutan selain memiliki fungsi umum seperti yang sudah diketahui bersama juga memiliki fungsi sosial-agama dan budaya karena hutan sangat berkorelasi dengan kehidupan ritual keagamaan *krama* Bali di bawah naungan desa adat. Dengan fungsinya yang sangat urgen bagi kehidupan masyarakat Bali secara khusus sudah sepatutnyalah hutan di jaga kelestariannya dan dilindungi dengan instrumen hukum baik hukum negara maupun hukum yang dibuat oleh desa adat.



Gambar 3.16 Kegiatan Upakara *Wana Kertih* di Kabupaten Karangasem. (Sumber : balikini.net)

### **3.6 *Tri Hita Karana***

Di Bali pada khususnya bahasan seputar penyelamatan lingkungan ternyata sudah diwariskan sejak jaman dahulu. Ini terbukti dari adanya ritual khusus pada hari Raya *Tumpek Wariga* setiap 6 (enam) bulan

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

sekali yang bertujuan untuk peringatan pada tumbuh-tumbuhan yang secara tidak langsung merupakan pengejawantahan terhadap kelestarian lingkungan. Selain itu melalui konsep *Tri Hita Karana* juga menjadi pedoman mengenai konsep hubungan antara manusia, alam serta Tuhan, sehingga di Bali unsur alam atau penyelamatan lingkungan ini sudah digariskan sejak dahulu hingga sekarang *Tri Hita Karana* berasal dari kata *Tri* yang berarti tiga, *Hita* yang berarti kebahagiaan dan *Karana* yang berarti penyebab, dengan demikian *Tri Hita Karana* berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan.

Konsep kosmologi *Tri Hita Karana* merupakan falsafah hidup tangguh. Falsafah tersebut memiliki konsep yang dapat melestarikan keanekaragaman budaya dan lingkungan dalam era globalisasi. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) adalah bagaimana memperbaiki kerusakan lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

Agama Hindu telah berkembang sejak lama di Bali memiliki konsep yang dikenal dengan ajaran *Tri Hita Karana*. *Tri Hita Karana* berasal dari bahasa sansekerta, yaitu dari kata *tri*, *hita* dan *karana* yang masing – masing berarti tiga, sejahtera dan sebab. *Tri Hita Karana* ini diaktualisasikan kedalam tiga unsur :

- 1) Unsur *Parahyangan* yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Unsur *Pawongan* yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesama manusia

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

- 3) Unsur *Palemahan* yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam ciptaan dan makhluk hidup lainya (Jelantik dalam Sirtha, 2008)

Dalam konteks penelitian ini, ajaran *Tri Hita Karana* sangat relevan dikaitkan dengan indikator makro sosial ekonomi karena mengandung pesan agar manusia dalam membangun dan mengelola sumber daya alam serta lingkungannya secara arif dan bijaksana untuk menjaga kelestariannya. Menurut Sirtha (2008), alam merupakan anugrah Tuhan yang dapat memberikan sumber kehidupan dan penghidupan bagi manusia. Oleh karena itu, alam haruslah di jaga dan dijaga kelestariannya agar dapat dimanfaatkan bukan saja oleh generasi masa kini melainkan juga oleh generasi berikutnya. Dari pandangan tersebut dapat ditarik kesimpulan, *Tri Hita Karana* sebagai kearifan lokal budaya Bali telah menjadi suatu pengetahuan yang menghubungkan manusia dengan lingkungan dan sosialnya.

Kawasan Hutan yang ada di Pulau Dewata Bali merupakan kawasan yang dilindungi oleh *awig-awig* desa adat termasuk yang ada di dalamnya merupakan bagian dari implementasi ajaran *Tri Hita Karana*, yakni tiga penyebab kebahagiaan yang dalam *awig-awig* desa disebut dengan *sukerta tata parahyangan, sukerta tata pawongan lan sukerta tata palemahan*. *Sukerta tata parahyangan* memiliki arti sebuah hubungan yang harmonis antara manusia dan Tuhan, dalam hal ini manusia diharapkan memiliki kedekatan spritual dengan Tuhan, setiap aktifitas berdasarkan pada semangat pengabdian kepada Tuhan. Manusia menyadari jati dirinya sebagai atman yang harus dikaitkan selalu

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

dengan sumbernya itu. Hutan sebagai ciptaan Tuhan dihormati dan dilindungi oleh masyarakat Hindu desa adat. Perlindungan terhadap hutan merupakan bukti riil bhakti kepada Tuhan.

*Sukerta tata pawongan* memiliki makna sebagai konsep korelasi yang harmonis antara manusia dengan sesama manusia, sebagai sesama makhluk yang memiliki hak dan kewajiban yang sama, dalam hubungan ini diharapkan muncul ikatan persaudaraan di antara manusia yang bersifat universal terbebas dari unsur suku, ras, agama, antar adat istiadat dan antar golongan. Lingkungan yang baik khususnya hutan yang tetap lestari dan berfungsi sesuai manfaatnya akan memberikan implikasi yang baik pula bagi kehidupan manusia di sekitarnya.

*Sukerta tata palemahan* diartikan sebagai konsep hubungan manusia dengan alam, yang mana dalam konsep ini manusia diharapkan memiliki tanggung jawab untuk mengelola alam natural. Manusia tidak hanya memandang lingkungan sebagai sesuatu yang dapat dimanfaatkan secara maksimal dan juga harus dijaga kelestariannya secara berkelanjutan. Terkait dengan perlindungan hutan dalam *awig-awig* dengan dasar implementasi ajaran *Tri Hita Karana*, *sukerta tata palemahan* ini yang menjadi dasar hutan di atur dalam *awig-awig* desa adat. Terdapatnya pengaturan *Tri Hita Karana* dalam *awig-awig* sebagai salah satu produk hukum desa adat di Bali memiliki tujuan hukum untuk mencapai ketertiban dan keseimbangan antara lahir dan bathin (Subrata, *et al.* 2017).

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*



## BAB IV

# INDIKATOR SOSIAL EKONOMI PENENTU HUTAN LESTARI

### 4.1 Prolog

Sumber daya alam dan lingkungan tidak dapat dilepaskan peranannya sebagai sumber kehidupan serta sumber pendapatan bagi proses pembangunan pada suatu daerah. Pembangunan ekonomi pada hakekatnya merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Indikator yang digunakan untuk mengetahui kondisi perekonomian adalah Produk Domestik Regional Bruto dan pertumbuhan pendapatan per kapita masyarakat di wilayah tersebut. Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan ekonomi masyarakat akan menjadi tekanan terhadap pemanfaatan sumberdaya alam, terlebih dengan adanya pemberian otonomi kepada daerah dalam konteks pengelolaan sumber daya alam dapat menjadi sebuah harapan sekaligus ancaman. Isu lingkungan hidup pernah disentil dalam konferensi *United Nation Framework Convention on Climate Change* di Nusa Dua, Bali tahun 2007 mengenai kerusakan lingkungan yang terjadi akibat dari industrialisasi yang berorientasi terhadap pertumbuhan

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

ekonomi dan mengabaikan aspek lingkungan sehingga mengakibatkan iklim dunia menjadi berubah seperti sekarang ini, atau yang disebut dengan *global warming*.

Di Bali seputar penyelamatan lingkungan sudah diwariskan sejak jaman dahulu. Ini terbukti dari adanya ritual khusus pada hari Raya *Tumpek Wariga* setiap *enem sasih* yakni memberi penghormatan pada tumbuh-tumbuhan yang secara langsung merupakan pengejawantahan terhadap kelestarian lingkungan sebagai wujud dari falsafah *Tri Hita Karana* yang juga menjadi pedoman mengenai konsep hubungan antara manusia, alam, serta Tuhan. Hal ini dirasa belum cukup mengingat fakta dilapangan kondisi hutan di Provinsi Bali mengalami tekanan akibat gangguan keamanan hutan dengan berkurangnya luas hutan maupun bertambahnya lahan kritis kawasan hutan, hal ini diperparah pula dengan adanya rencana Reklamasi teluk Benoa oleh Pemerintah, ini justru menjadi antithesis bagi *local genius* wangsa Bali yang nantinya akan memperparah kelestarian hutan di Pulau Dewata.

Prinsip kelestarian hutan mengacu kepada sepuluh kriteria yang detail dan cakupan yang sangat luas yang juga meliputi isu tenurial, hubungan komunitas, hak-hak pekerja, penilaian dampak lingkungan, penyusunan rencana kerja dan konservasi hutan alam. Prinsip ini dikembangkan oleh *Forest Stewardship Council (FSC)* sebuah grup lingkungan yang berbasis di California semenjak tahun 1990 (Overdevest, 2010).

**Tabel 4.1**  
**Sepuluh Prinsip Pengelolaan Hutan Lestari FSC**

<b>Prinsip</b>	<b>Kriteria</b>
1	Pemenuhan terhadap hukum, undang-undang dan perjanjian internasional yang berlaku
2	Sistem tenurial lahan dan hak guna yang jelas dan tidak bertentangan
3	Pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat
4	Pemeliharaan kesejahteraan sosial dan ekonomi pekerja hutan dan komunitas lokal
5	Penggunaan sumber daya hutan dan pembagian manfaat yang adil
6	Pengurangan dampak lingkungan dari kegiatan pembalakan hutan
7	Perencanaan pengelolaan yang tepat dan berkesinambungan
8	Sistem pengawasan yang tepat untuk menilaikondisi hutan
9	Pemeliharaan hutan dengan konservasi yang tinggi
10	Pengembangan hutan tanaman harus mampu meminimalkan tekanan terhadap konservasi dan restorasi hutan alam

Sumber : Maryudi, 2016

Sistem tata laksana organisasi FSC didasarkan atas konsep tripartite dengan format tiga kamar yaitu lingkungan, ekonomi dan sosial dengan sistem voting yang setara antar kamar dan berwakilkan yang seimbang antara negara maju dan negara berkembang.

Sejalan dengan hal tersebut dilakukan suatu kajian penelitian untuk menganalisis pengaruh produk domestik regional bruto, jumlah penduduk dan otonomi daerah

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

terhadap kelestarian hutan dengan menggunakan pendekatan analisis *ordinary least square* serta menggunakan pendekatan deskriptif untuk menguraikan keterkaitan variabel tersebut. Penelitian ini menemukan fakta bahwa produk domestik regional bruto, jumlah penduduk dan otonomi daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kelestarian hutan. Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kelestarian hutan, sedangkan otonomi daerah tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kelestarian hutan di Provinsi Bali selama periode analisis.

Produk Domestik Regional Bruto merupakan variabel yang memiliki pengaruh dominan terhadap Kelestarian hutan di Provinsi Bali. Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat karakteristik, dan kerentanannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya. Pemanfaatan hutan dan kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi pokoknya, yaitu fungsi konservasi, lindung, dan produksi. Untuk menjaga keberlangsungan fungsi pokok hutan dan kondisi hutan, dilakukan juga upaya rehabilitasi serta reklamasi hutan dan lahan, yang bertujuan selain mengembalikan kualitas hutan juga meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga peran serta masyarakat merupakan inti keberhasilannya. Sebagai salah satu pilar pembangunan, maka hutan harus dijaga kelestariannya agar sumber daya alam hutan dapat

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

menjadi *core* pembangunan. Melalui ini diharapkan dapat memberikan input yang relevan terhadap pelestarian hutan mengingat begitu pentingnya hutan dalam segala aspek kehidupan, terlebih hutan bagi masyarakat Bali merupakan tempat yang sakral. Dalam tabel 4.1 menjelaskan tentang hasil estimasi olahan data atas penentu kelestarian hutan di Provinsi Bali.

**Tabel 4.2**  
**Hasil Uji Regresi *Ordinary Least Square* dengan Model *Semilog* Variabel Kelestarian Hutan dengan masing-masing Variabel Bebas**

<b>Variabel Bebas</b>	<b>Koefisien Regresi</b>	<b>Signifikansi</b>
PDRB	3.434	0.001
Jumlah Penduduk	6.745	0.000
Otonomi Daerah	0.021	0.605
Konstanta	5.901	
F-Hitung	184.153	
Signifikansi	0.00000	
R <sup>2</sup>	0.9700	

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Interpretasinya sebagai berikut :

$\hat{\beta}_0 = 5.901$  Secara statistik menunjukkan bahwa rata-rata kelestarian hutan sebesar 5,901

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

persen dengan syarat variabel lain dalam hal ini Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk dan Otonomi Daerah diasumsikan sama dengan nol (0).

$\hat{\beta}_1 = 3.434$  Menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan nyata antara variabel Produk Domestik Regional Bruto terhadap Kelestarian Hutan di Provinsi Bali sebesar 3,434 yang artinya setiap kenaikan Produk Domestik Regional Bruto sebesar satu jutaan Rupiah maka akan menyebabkan Kelestarian Hutan di Provinsi Bali akan meningkat sebesar 3,434 persen, dengan syarat variabel lain diasumsikan konstan.

$\hat{\beta}_2 = 6.745$  Menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan nyata antara variabel Jumlah penduduk terhadap Kelestarian Hutan di Provinsi Bali sebesar 6,745 yang artinya setiap penambahan penduduk sebesar satu satuan jiwa maka akan menyebabkan Kelestarian Hutan di Provinsi Bali akan meningkat sebesar 6,745 persen dengan syarat variabel lain diasumsikan konstan.

$\hat{\beta}_3 = 0,021$  Menunjukkan bahwa Kelestarian Hutan periode setelah otonomi daerah lebih tinggi daripada periode sebelum otonomi daerah sebesar 0.021 persen dengan syarat variabel lain diasumsikan konstan.

Dari tabel 4.2 juga terlihat bahwa penaksiran dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square*

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

menunjukkan bahwa Nilai  $R^2$  *Goodness of Fit* atau Koefisien determinasi diperoleh angka sebesar 0.970 yang artinya 97,00 persen variasi (naik turunnya) dari kelestarian hutan di Provinsi Bali dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh variasi Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk dan Otonomi Daerah sedangkan sisanya sebesar 3,00 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak di masukkan ke dalam model kajian.

Dalam Tabel 4.2 dapat dijelaskan bahwa secara simultan variabel Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk dan Otonomi Daerah berpengaruh Terhadap Kelestarian Hutan di Provinsi Bali Tahun 1993 – 2019, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi atau nilai probabilitas yang lebih kecil dari taraf nyata 5 persen. Secara parsial variabel Produk Domestik Regional Bruto dan Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Kelestarian Hutan di Provinsi Bali selama periode analisis yakni Tahun 1993- 2019 dengan nilai signifikansinya yang lebih kecil dari taraf nyata sebesar 5 persen. Variabel otonomi daerah tidak berpengaruh terhadap Kelestarian hutan di Provinsi Bali Tahun 1993-2019 dengan nilai signifikansinya lebih besar dari taraf nyata sebesar 5 persen dengan tingkat keyakinan sebesar 95 persen.

#### **4.2 Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Kelestarian Hutan di Provinsi Bali Tahun 1993-2019**

Nilai estimasi koefisien Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)  $\hat{\beta}_1 = 3.434$  memiliki arti bahwa jika pendapatan domestik regional bruto (PDRB) mengalami peningkatan sebesar satuan ribu Rupiah, maka

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

kelestarian hutan di Provinsi Bali akan mengalami peningkatan sebesar 3,434 persen dengan asumsi variabel bebas yang lainnya adalah konstan. Begitu pula sebaliknya, jika pendapatan domestik regional bruto (PDRB) mengalami penurunan sebesar satu ribuan Rupiah, maka kelestarian hutan di Provinsi Bali akan mengalami penurunan sebesar 3,434 persen dengan asumsi variabel bebas yang lainnya adalah konstan.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini mengenai pengaruh pendapatan regional daerah terhadap keajegan hutan sesuai dengan teori yang mengemukakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pendapatan regional daerah terhadap keajegan hutan Provinsi Bali. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Panto (2003) ini menunjukkan bahwa Hutan dengan fungsinya yang beragam baik dari segi ekonomi maupun dari segi lingkungan memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembangunan. Sejalan dengan digulirkannya desentralisasi wilayah yang memberikan wewenang kepada daerah untuk mengurus rumah tangga sendiri dan bagi sektor kehutanan tentunya memberikan dampak tersendiri karena di satu sisi hutan sebagai modal daerah harus dimanfaatkan dalam menopang pendapatan daerah.

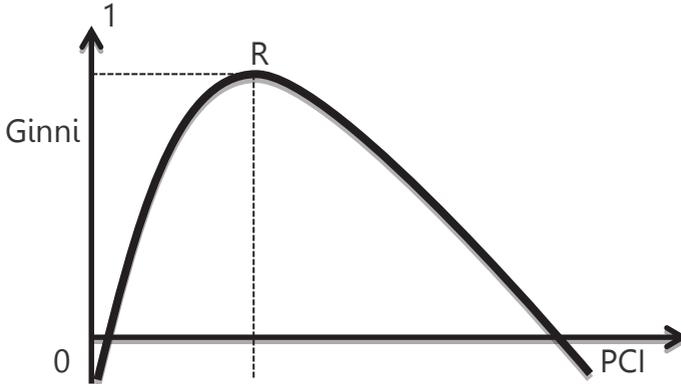
*Spirit* reformasi, pembangunan kehutanan yang berkelanjutan dan berkeadilan tidak mungkin tercapai apabila paradigma kehutanan yang lama masih dijadikan acuan. Paradigma kehutanan yang lama tersebut adalah perusahaan hutan hanya memberikan keuntungan yang besar bagi pengusaha, tidak dapat mengangkat ekonomi

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

masyarakat dan daerah serta memiliki dampak lingkungan yang tinggi. Oleh karena itu diperlukan perubahan paradigma secara mendasar yaitu pergeseran orientasi dari pengelolaan kayu menjadi pengelolaan sumber daya pengelolaan sentralistik menjadi desentralistik, serta pengelolaan hutan di masa depan lebih mempertimbangkan keseimbangan antara aspek ekonomi, ekologi dan sosial masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan. Adanya paradigma baru dalam pengelolaan hutan diharapkan dapat menjaga dan mempertahankan kelestarian hutan dan tentunya dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pemerintah khususnya perolehan sumber Pendapatan Asli Daerah.

Sejalan dengan analisis Simon Kuznets tentang pengaruh kelestarian lingkungan hidup terhadap pertumbuhan ekonomi ini secara teoritis diungkapkan dengan munculnya teori *Environmental Kuznets Curve* (EKC). Teori *Environmental Kuznets Curve* menyatakan bahwa untuk kasus di negara sedang berkembang seiring dengan perjalanan waktu, teknologi dapat merusak kelestarian alam dan lingkungan, sebaliknya untuk negara maju seiring dengan perjalanan waktu dalam kemajuan teknologi, maka kelestarian lingkungan hidup semakin bisa dijamin keberadaannya. Berdasarkan pada penemuannya tersebut, bentuk kurva *Environmental Kuznets Curve* adalah huruf U terbalik (Munasinghe dalam Gupito, 2012).

**Gambar 4.1 Hipotesis U terbalik Kuznets**



Gambar 4.1 diatas menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan akan semakin meningkat yang ditunjukkan dengan semakin tingginya nilai *ginni coefficient*. Pada masa-masa awal pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan semakin bertambahnya nilai dari pendapatan perkapita (PCI). Tingkat kesenjangan kesejahteraan masyarakat di suatu negara akan semakin menurun (distribusi pendapatan membaik) seiring dengan peningkatan pendapatan perkapita warganya setelah memasuki periode titik balik di puncak grafik Kuznets (R). Hal itu terjadi karena ketika kondisi perekonomian suatu negara terus-menerus bertumbuh maka pada suatu masa cepat atau lambat berdasarkan teori *trickle down effect* maka akumulasi kesejahteraan yang dipungut oleh negara melalui pajak progresif dan mekanisme lain akan menetes pada golongan masyarakat yang kurang mampu. Kondisi inilah yang diilustrasikan oleh Kuznets melalui postulatnya yang

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

dikenal luas sebagai *inverted U hypothesis*. Di negara-negara maju yang telah melewati periode titik balik ginni, tetesan kesejahteraan kepada kelompok marginal pada umumnya disalurkan melalui berbagai skema tunjangan seperti tunjangan pengangguran, tunjangan anak, tunjangan kesehatan, tunjangan pendidikan dan lain sebagainya maupun dalam bentuk pemberian subsidi kesejahteraan lainnya.

Hal yang tepat untuk mengurangi ketimpangan antara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi terhadap kualitas lingkungan hidup, yaitu dengan melakukan pembangunan ekonomi berwawasan lingkungan serta menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Pembangunan ekonomi berwawasan lingkungan adalah pembangunan berkelanjutan dibidang ekonomi yang tidak hanya berorientasi hasil untuk saat ini tetapi juga berorientasi pada masa depan dengan titik fokus pada keberlangsungan pelestarian lingkungan, dapat diketahui bahwa parameter keberhasilan sebuah pembangunan adalah keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pembangunan berkesinambungan yang ditandai dengan tidak terjadinya kerusakan sosial dan kerusakan alam (Gupito, 2012). Oleh karena itu, pembangunan ekonomi berwawasan lingkungan merupakan suatu jalan keluar dari permasalahan tersebut yang umumnya diterapkan pada negara-negara berkembang.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

tertentu (biasanya per tahun). Di Indonesia, perhitungan nilai PDRB yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) adalah PDB dengan pendekatan nilai tambah. Nilai PDRB suatu negara tersebut sebenarnya sama dengan nilai tambah yang diciptakan oleh semua sektor kegiatan ekonomi (lapangan usaha) di negara tersebut. PDRB sangat berguna dalam sistem perekonomian negara. Angka Produk Domestik Regional Bruto digunakan sebagai:

- 1) Indikator untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah;
- 2) Bahan analisa tingkat kemakmuran masyarakat dan tingkat perubahan barang dan jasa;
- 3) Bahan analisa produktivitas secara sektoral;
- 4) Alat kontrol dalam menentukan kebijakan pembangunan.

Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh signifikan terhadap kelestarian hutan di Provinsi Bali dan memiliki hubungan yang positif. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali yang ditunjukkan dengan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto ternyata diimbangi pula terhadap pelestarian lingkungan dan pelestarian hutan. Oleh sebab itu, seharusnya masing-masing daerah berupaya menyeimbangkan antara perkembangan Produk Domestik Regional Bruto serta aspek lingkungan sehingga pembangunan berkelanjutan dapat tercapai.

Konsep pembangunan berwawasan lingkungan yang dicanangkan sejak Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 telah memberikan porsi bagi kelestarian lingkungan termasuk di dalamnya adalah hutan dalam

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

pembangunan nasional. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup diarahkan kepada peningkatan kesejahteraan rakyat melalui konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan sumber daya alam dengan menerapkan teknologi yang ramah lingkungan. Hutan sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*renewable resources*) akan mampu memberi manfaat secara berkesinambungan apabila dikelola dengan baik (*Sustainable Yield Principle*).

Semua Negara di dunia telah sepakat bahwa untuk mengukur kesejahteraan ekonomi suatu bangsa, indikator yang digunakan adalah nilai produk nasional bruto per kapita. (Suparmoko, 2002). Semakin tinggi Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita maka semakin makmur bangsa yang bersangkutan. Lebih tepatnya apabila yang digunakan sebagai indikator kemakmuran masyarakat adalah PNB atau PDRB netto yaitu setelah penyusutan output yang di produksi oleh manusia diperhitungkan. Namun demikian perkembangan yang terakhir dalam konsepsi penyusunan neraca untuk mendapatkan indikator kemakmuran perlu dikalkulasi penyusutan sumber daya alam dan menurunnya mutu lingkungan. Apabila sumber daya atau hasil hutan diambil untuk kepentingan produksi, maka nilainya harus dikurangkan dengan penyusutan sumber daya alam dan dikurangkan juga dari nilai pendapatan konvensional. Dengan demikian maka dapat terjadi nilai pendapatan regional yang lebih kecil nilainya daripada sebelum dikurangkan nilai penyusutan sumber daya alam tersebut.

Ditegaskan bahwa pertumbuhan maupun pembangunan ekonomi merupakan prasyarat bagi

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

adanya peningkatan kesejahteraan suatu bangsa ataupun daerah. Namun pertumbuhan atau pembangunan ekonomi tanpa dibarengi dengan pelestarian hutan dan lingkungan akan menyebabkan daerah yang bersangkutan akan mengalami kemacetan pertumbuhan kelak dikemudian hari. Dengan kata lain pertimbangan yang mengkorelasikan kebijakan pertumbuhan maupun pembangunan perekonomian dengan memasukkan wawasan lingkungan akan dapat menjamin adanya pola pembangunan yang berkelanjutan, untuk itu salah satu upaya dengan memasukkan konsep neraca sumber daya alam dan lingkungan baik ditingkat nasional, maupun di tingkat daerah multak dilakukan sebagai komitmen bersama yang akan mempengaruhi komponen pendapatan (PDRB) terhadap tingkat kelestarian hutan.

Keberhasilan pembangunan berwawasan lingkungan memerlukan adanya kebijakan yang *enabling policy* (Dodik, *et al.* 2015) yang terkait erat dengan pemikiran pembangunan yang dianut. Didasari atau tidak, sejak era desentralisasi pemikiran pembangunan Negara Indonesia telah bergeser dari adil dan merata pada masa pemerintahan yang tersentralisasi menjadi adil dalam ketidakmelaratan pada masa pemerintahan yang terdesentralisasi. Untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan terutama yang terkait dengan kelestarian hutan beberapa kebijakan yang mendorong adanya insentif fiskal bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alamnya (hutan) dengan baik dan lestari (Nurfitriani *et al.* 2015) seperti : Dana alokasi khusus konservasi yang lebih terarah dan terukur, hal ini merupakan insentif kebijakan atau dapat

dikatakan sebagai penghargaan bagi daerah yang memperhatikan kelestarian sumber daya alamnya.

#### **4.3 Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Kelestarian Hutan di Provinsi Bali Tahun 1993-2019**

Nilai estimasi koefisien Jumlah Penduduk  $\hat{\beta}_2 = 6.745$  memiliki arti bahwa jika Jumlah penduduk mengalami peningkatan sebesar satu juta jiwa, maka kelestarian hutan di Provinsi Bali akan mengalami peningkatan sebesar 6,745 persen dengan asumsi variabel bebas yang lainnya adalah konstan. Begitu pula sebaliknya, jika terjadi penurunan kuantitas penduduk, maka kelestarian hutan di Provinsi Bali akan mengalami penurunan sebesar 6,745 persen dengan asumsi variabel bebas yang lainnya adalah konstan.

Dinamika antara pertumbuhan penduduk dan deforestasi bukanlah isu yang baru. Beberapa studi menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk adalah penyebab deforestasi di Indonesia (Romijn et al., 2013; Margono et al., 2012; Fraser, 1998). Hal ini masuk akal mengingat jumlah penduduk Indonesia mencapai hampir 250 juta jiwa pada tahun 2013 dengan laju pertumbuhan yang tinggi, yaitu sebesar 1,7 persen per tahun (BPS, 2018). Padahal, Indonesia adalah negara yang mempunyai luas tutupan hutan terbesar ketiga di dunia setelah Brazil dan Republik Demokratik Kongo (Contreras & Fay, 2005).

Pertumbuhan penduduk yang pesat menyebabkan kebutuhan akan lahan baru, baik untuk tempat tinggal maupun untuk kegiatan ekonomi, meningkat dan

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

kawasan hutan pun menjadi target utama. Namun, anggapan bahwa populasi adalah penyebab utama berkurangnya tutupan hutan tidak sepenuhnya benar. Banyak aspek lain di balik tingginya pertumbuhan penduduk yang memiliki andil terhadap deforestasi di Indonesia (Sunderlin & Resosudarmo, 1999) yang perlu dikaji lebih jauh. Serangkaian kerusakan alam yang terjadi di Indonesia, termasuk akhir-akhir ini adalah kebakaran hutan. Hal ini menyebabkan jumlah tutupan hutan berkurang pesat, sudah saatnya masyarakat lebih terlibat dalam pengelolaan kehutanan yang bersifat lestari. Upaya ini, selain dapat meningkatkan kapasitas adaptif masyarakat, juga dapat mempromosikan ekonomi rendah karbon.

Lingkungan sebagai sumber daya mempertemukan berbagai kepentingan di dalamnya, antara lain kepentingan masyarakat, pengusaha, dan pemerintah. Benturan kepentingan antara berbagai pihak sering berakibat kondisi lingkungan harus menjadi korban. Pada akhirnya, kondisi lingkungan yang dikorbankan akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di sekitar. Pengelolaan lingkungan selain berusaha melakukan tindakan preventif, yakni mencegah meluasnya kerusakan lingkungan juga melakukan tindakan represif, yaitu bertindak secara nyata untuk menghadapi kondisi lingkungan yang terlanjur rusak. Kondisi lingkungan yang demikian jika dimungkinkan perlu diperbaiki agar dapat bermanfaat kembali bagi kesejahteraan masyarakat banyak.

Undang-undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

merumuskan bahwa lingkungan merupakan kesatuan ruang yang semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dalam definisi ini terlihat semakin jelas bahwa manusia memiliki andil yang besar di dalam mempengaruhi kebelangsungan dan dinamika lingkungan. Lingkungan meliputi keadaan baik yang disebut makhluk hidup maupun benda, termasuk pula keadaan-keadaan yang mempengaruhi keberadaan makhluk hidup dan benda. Keadaan - keadaan yang kemudian juga disebut hukum alam memang akan mengalami keadaan homeostasis (keseimbangan) apabila pengaruh manusia dalam batas kewajaran, namun apabila campur tangan manusia telah melampaui batas kemampuan salah satu atau lebih komponen lingkungan untuk memperbaiki dirinya, maka akan terjadi ketidakseimbangan atau ketidakharmonisan antara komponen lingkungan.

Lingkungan juga menjadi sumber kesenangan, karena dapat dijadikan sebagai obyek pemuasan kebutuhan manusia. Tuntutan kebutuhan manusia dengan pemanfaatan sumberdaya alam cenderung tidak berpihak pada kelestarian lingkungan. Revolusi *industry* 4.0 menjadi tantangan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dimana industri 4.0 di sektor lingkungan keberpihakan kepada daya dukung lingkungan yaitu pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), keberlanjutan ekologis, pendidikan lingkungan, konservasi dan produk ramah lingkungan. Dengan demikian pertumbuhan penduduk

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

diikuti dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat di suatu wilayah tidak melebihi dari daya dukung lingkungan dan keberpihakan kepada kelestarian lingkungan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Hari Lingkungan Hidup se\_Dunia tahun 2019 yang jatuh pada tanggal 5 Juni dengan tema yaitu Biru langitku, Hijau Bumiku menyampaikan bahwa berdasarkan data organisasi kesehatan dunia *World Health Organization* (WHO) bahwa polusi udara mengalami peningkatan yang berasal dari kendaraan bermotor, industri, pertanian dan pembakaran sampah, lahan tercatat setiap tahunnya tujuh (7) juta orang meninggal karena polusi udara. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka menekan dampak polusi udara menargetkan penanaman pohon seluas 207.000 hektar pada tahun 2019. Hal ini dilaksanakan agar kualitas lingkungan hidup dapat terjaga dan penduduk Indonesia dapat berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan dengan menjaga dan terlibat dalam keberlanjutan kelestarian lingkungan hidup.

Kualitas lingkungan akan terpelihara dengan baik jika manusia mengelola daya dukung pada batas di antara minimum dan optimum. Pengelolaan daya dukung di bawah minimum merupakan kondisi di mana sumber daya tidak dipergunakan dengan baik, sedangkan apabila mendekati ataupun melampaui daya dukung maksimum akan timbul resiko bagi lingkungan, seperti terjadinya pencemaran.

Daya dukung suatu lingkungan akan berfungsi secara optimal apabila tidak menghadapi tekanan

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

penduduk terhadap lingkungan atau dengan kata lain kepadatan penduduk seimbang dengan sumber daya yang tersedia pada lingkungan. Keadaan tersebut memang jarang dapat ditemukan di negara-negara berkembang. Kenyataan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang secara umum adalah lingkungan perkotaan dihadapkan pada tekanan penduduk yang besar sementara di pedesaan sumber daya tidak difungsikan secara optimal.

Penduduk merupakan aktor utama terhadap kelestarian lingkungan. Selaras dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Krisna dkk (2018) manusia hidup berdampingan dengan alam semesta termasuk hutan. Kebanyakan yang terjadi manusia merambah hutan untuk areal permukiman sehingga mengancam kelestarian hutan. Akan tetapi di Provinsi Bali kecenderungannya berbeda dengan diluar Pulau Bali, penduduk hidup berdampingan dengan hutan serta senantiasa ikut melestarikan hutan. Banyak penduduk di Provinsi Bali memiliki tempat tinggal dekat dengan hutan akan tetapi mereka tidak merusak hutan, namun berupaya menjaga kelestarian hutan sehingga dapat mencapai keseimbangan lingkungan.

Dalam kaitan dengan budaya masyarakat Bali dikenal dengan istilah *Tri Hita Karana* yang didalamnya terdapat hubungan antara manusia, alam atau lingkungan. Bagi masyarakat Hindu keseimbangan antara manusia dengan alam diwujudkan dengan usaha manusia dalam melaksanakan tindakan yang religius yakni melakukan ritual persembahan yang diaturnya kepada *Dewa* yang bersemayam. Penelitian ini juga mendukung terhadap

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

studi yang pernah dilakukan oleh Sunderlin & Resosudarmo, (2014) bahwasanya Pertumbuhan penduduk yang pesat menyebabkan kebutuhan akan lahan baru, baik untuk tempat tinggal maupun untuk kegiatan ekonomi, meningkat dan kawasan hutan pun menjadi target utama. Namun, anggapan bahwa populasi adalah penyebab utama berkurangnya tutupan hutan tidak sepenuhnya benar. Banyak aspek lain di balik tingginya pertumbuhan penduduk yang memiliki andil terhadap deforestasi yang perlu dikaji lebih jauh.

Hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup memang ada dua aliran yang berkembang. Aliran yang pertama melihat bahwa manusia memiliki keunggulan sehingga dapat memanfaatkan alam secara maksimal untuk memenuhi kebutuhannya. Aliran yang kedua melihat bahwa manusia sebenarnya merupakan bagian dari lingkungan, sehingga perlu berusaha hidup selaras dengan lingkungan. Aliran yang pertama memang menghasilkan manusia-manusia yang berprinsip ekonomis tinggi, tetapi mengabaikan keberlanjutan lingkungan. Berdasarkan pandangan pertama inilah eksplorasi alam secara sewenang-wenang terus berkembang. Aliran yang kedua yang diharapkan dapat tumbuh sebagai penyelemat guna terwujudnya idealisme pembangunan berwawasan lingkungan dan lingkungan sebagai sumber daya mempertemukan berbagai kepentingan di dalamnya, antara lain kepentingan keberlanjutan lingkungan untuk kebutuhan masyarakat.

Lumrah dinyatakan bahwa kehidupan masyarakat terdapat nilai-nilai sosial yang dipergunakan sebagai landasan untuk membangun kiat yang efektif dalam

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

upaya konservasi lingkungan. Kultur semacam itu pada umumnya tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat tradisional dimana ketergantungan anggotanya pada lingkungan alam masih sangat kuat. Kehidupannya masih cukup homogen dan pengaruh dunia luar relatif masih terbatas. Dalam kondisi semacam itu nilai-nilai sosial yang unik terpelihara dengan baik dan tidak terlalu sukar untuk di sosialisasikan. Selain itu, kehidupan yang demikian sering kali juga diketemukan pengetahuan yang rinci tentang ekosistem, hewan dan tumbuhan. Pengetahuan itu disosialisasikan melalui sistem sosial yang berlaku sehingga dapat terdokumentasi dan terpelihara dengan baik.

Dalam mengimplementasikan pengetahuan tersebut, masyarakat juga mengembangkan metode-metode tertentu. Metode-metode yang dikembangkan dapat berupa perlindungan yang ketat terhadap sumber-sumber alam ataupun usaha mengganti dan menanam kembali setiap kali terjadi kerusakan. Bersamaan dengan itu, dibangun pula pantangan-pantangan yang berkaitan dengan usaha untuk menjaga kelestarian alam (hutan) yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat. Pantangan-pantangan tersebut seringkali dikorelasikan dengan kekuatan gaib dan disosialisasikan dalam bentuk simbol-simbol tertentu melalui upacara yang harus diikuti oleh segenap elemen masyarakat (Usman, 2010). Tumbuh-tumbuhan, hewan dari jenis tertentu yang tergolong langka di daerah tertentu (misalnya Bali) tidak boleh ditebang atau disembelih, kecuali untuk kepentingan ritual tertentu dan itupun harus dilakukan melalui upacara-upacara tertentu di bawah pimpinan

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

tetua adat. Selain itu pula diciptakan pula sangsi-sangsi yang dikaitkan dengan kekuatan gaib. Setiap pelanggaran terhadap pamali tidak hanya dianggap mengganggu usaha melestarikan hutan maupun lingkungan tetapi juga diyakini akan mendatangkan kutukan. Kutukan tersebut boleh jadi hanya akan ditanggung oleh orang yang melanggarnya namun juga mungkin harus diterima pula oleh semua anggota masyarakat.

Di Bali terkenal dengan sebutan Pulau Seribu Pura yang sangat beraneka ragam budayanya sebagai tradisi yang dijalankan oleh masyarakatnya. Dengan ditetapkannya Bali sebagai kawasan wisata, maka objek yang ada ditumbuhkembangkan, kebanyakan objek yang ada di Bali merupakan usaha reproduksi kebudayaan serta objek - objek alam yang masih dilestarikan serta berkorelasi dengan aktifitas ritual umat di Bali. Aktifitas ritual menunjukkan bahwa masyarakat Hindu Bali memiliki sistem pengetahuan untuk mengimplementasikan pemahaman terhadap gejala-gejala alam termasuk gejala alam yang terkait dengan pengelolaan sumber daya hutan. Lingkungan hutan yang meliputi aspek-aspek flora, fauna, cuaca, iklim, air, tanah serta aspek lainnya baik yang bersifat nyata maupun abstrak mempunyai korelasi dengan masyarakat Hindu Bali. Kedekatan hubungan antara masyarakat khususnya masyarakat hutan dengan lingkungan hutan menyadarkan bahwa hutan memiliki energi yang bersifat baik maupun buruk (Murtijo, 2005). Pengetahuan masyarakat desa hutan menyebutkan bahwa hutan akan mewujudkan sifat-sifat baiknya kepada manusia jikalau

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

manusia memperlakukan hutan secara bijaksana begitu pula sebaliknya. Pandangan ini berpangkal pada keharmonisan alam semesta yang menganggap bahwa lingkungan hutan dengan keseluruhan isi alam semesta sebenarnya hidup saling berkorelasi dan bergantung dengan yang lain atau satu sama lain.

Hutan adalah saudara kita dan kecintaan kita terhadap saudara kita yang satu ini perlu untuk dihidupkan kembali dan kita benahi lebih serius karena sebenarnya kita adalah orang yang berhutang kepada hutan karena tanpa pamrih hutan telah memberikan oksigen, menjaga sumber air, menunjang kebutuhan dan mencegah terjadinya bencana alam. Selain itu dari hutan kita juga dapat belajar banyak, memberikan banyak persoalan kepada kita, mengajak kita untuk berpikir dan akhirnya telah membentuk kebudayaan manusia (Dharmika, 2014).

Agama Hindu dalam menginterpretasikan korelasi kausalitas antara manusia dengan lingkungan hidup pada dasarnya berpijak pada Kitab Suci Veda dan kerangka dasar agama Hindu yaitu *Tattwa*, *Susila* dan *Acara*. Ajaran *tattwa* memberikan petunjuk filosofis yang mendalam mengenai pokok-pokok keyakinan dan mengenai konsepsi kehutanan. Ajaran *Susila* merupakan kerangka untuk berperilaku yang baik sesuai dengan dharma serta ajaran *Acara* adalah kerangka untuk menghubungkan diri dengan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* dalam bentuk persembahan suci yang tulus dan ikhlas serta yang menjadi dasar hukum dari yadnya adalah *Dewa Rna*, *Rsi Rna* dan *Pitra Rna*. Siapapun dia serta dimanapun berada ia yang waras tujuan hidupnya adalah mencapai

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

kebahagiaan lahir-bathin material-spiritual. Orang-orang suci Hindu merumuskan tujuan hidup dengan *Moksartham Jagadhita Ya Ca Iti Dharma*. Lebih rinci dibagi atas empat tujuan hidup yang disebut dengan *Catur Purusa Artha (Dharma, Artha, Kama, Moksa)* dan dirumuskan pula ada tiga pilar penyebab kebahagiaan yakni *Tri Hita Karana (Parhyangan, Pawongan, Palemahan)* yang mana konsepsi ini terimplementasi dalam struktur tata ruang Provinsi Bali yang menjadi asas pembangunan daerah Provinsi Bali.

Untuk mengejawantahkan tujuan idiil tersebut, Agama Hindu mengajarkan empat (4) jalan hidup yang disebut *Catur Marga* yang terdiri atas *Jnana* (berpikir bijaksana), *Karma* (bekerja menurut *swadharma*), *Bhakti* (penuh kasih sayang) dan *Yoga* (hidup disiplin). Perlu disadari bahwa beban lingkungan dalam menunjang pembangunan akan semakin berat dank eras. Ketidakharmonisan alam tampak semakin nyata dan akan semakin cepat mencapai titik *irreversible*, bila masyarakat tidak semakin ramah dan buta terhadap lingkungan. Bila titik ketidakharmonisan itu telah mencapai klimaks jelas daya produksi alam tidak akan dapat dipulihkan maka yang terjadi adalah kesengsaraan. Untuk dapat memelihara kelestarian lingkungan perlu ditumbuhkan kesadaran masyarakat, manusia harus sadar dan tidak lagi berkehendak untuk menaklukan alam dan sekitarnya. Pemanfaatan sumber daya alam harus didasarkan atas kebijakan memelihara keselarasan, keharmonisan, keseresaian dan keseimbangan.

Agama Hindu sejak zaman Weda telah mengajarkan pelestarian alam. Manusia boleh menguasai

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

alam, boleh mengatur, menempati serta menikmati dengan syarat bhakti. Bhakti adalah welas asih yang diwujudkan dalam bentuk yadnya. Mengusahakan agar lingkungan menjadi harmonis jelas adalah dharma, kewajiban dan kebutuhan umat Hindu. Dalam *Atharwa Weda XII:1* disebutkan :

*Satyam brhad rtam naram diksa tapo brahma yajnya  
prthirviam dharayanti*

Artinya :

*Satya, rta, diksa, tapa, brahma* dan yadnya inilah yang menegakkan bumi

Begitu pula dalam mantra *Tri Sandya* disebutkan :  
*Om bhur bhvah swah*

*Om Narayana evedam sarwam yad bhutam yasca  
bahwyam*

*Mahadewa sarvaprani hitam karah*

Artinya :

*Om* adalah bumi, langit dan udara

*Narayana* adalah semuanya ini, yang telah ada dan yang akan ada

*Mahadewa* memberi anugerah keselamatan kepada semua makhluk

Dengan demikian merusak, mencemari alam dan lingkungan itu sama artinya dengan menghina Tuhan. Dalam *lontar Agastya Parwa* dan *Arjuna Wiwaha* dijelaskan bahwa ada tiga perbuatan yang menyebabkan seseorang dapat mencapai kebahagiaan. Ketiga perbuatan itu adalah *Tapa, Yadnya* dan *Kirti*. *Tapa* berarti

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

hidup terkendali dan berpegang teguh pada kebenaran, *Yadnya* artinya mengorbankan sifat-sifat mementingkan diri sendiri dan *Kirti* berarti melakukan kerja nyata untuk menciptakan keharmonisan hubungan antara Tuhan, manusia dan alam. Sehubungan dengan hal tersebut ada enam *kirti* yang harus dilaksanakan dalam pelestarian alam semesta yaitu 1) *Jagat kirti* (Kelestarian bumi), 2) Samudera *kirti* (pelestarian laut), 3) *Danu kirti* (pelestarian danau), 4) *Jana kirti* (pelestarian antar sesama manusia), 5) *Atma kirti* (Sadar diri) dan 6) *Wana kirti* (Kelestarian hutan).

Disamping konsepsi agama Hindu tentang tujuan hidup, pelestarian alam lingkungan (hutan) yang tertuang dalam berbagai teks sastra agama, ritual-ritual yang secara spesifik berkorelasi dengan pelestarian alam pun dilakukan seperti ritual *Bhuta yadnya* yang dimaksudkan untuk mengharmoniskan dan menyucikan alam semesta untuk mencapai bhutahita atau *Jagadhita*. Menurut agama Hindu unsur dasar yang membangun alam disebut *Panca Maha Bhuta* (*Pertiwi, apah, teja, bayu dan akasa*). *Panca Maha Bhuta* dibentuk oleh unsur halus yang disebut *Panca Tan Mantra* yang terdiri atas *gandha* (bau), *rasa* (rasa), *sparsa* (sinar), *rupa* (rupa), *sabda* (suara). Unsur-unsur yang merupakan objek indria ini diharapkan berada dalam suatu struktur yang *somya*.

Ajaran inilah yang merupakan landasan kecintaan lingkungan alam dalam masyarakat Hindu. Alam pulau Bali ternyata dapat dijadikan tempat yang hamper sempurna dalam mewujudkan ajaran tersebut. Konsep *segara-giri atau pasir ukir, Padma bhuwana* sampai pada *Tri Hita Karana, Tri Mandala, Tri Angga* dan sebagainya

mengalir dari mata air ajaran agama Hindu tersebut, inilah argumentasi yang melandasi di Bali bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap kelestarian Hutan.

#### **4.4 Otonomi Daerah Tidak Berpengaruh Terhadap Kelestarian Hutan di Provinsi Bali Tahun 1993-2019**

Nilai estimasi koefisien Otonomi Daerah  $Di = 0.021$  memiliki arti bahwa Menunjukkan bahwa Kelestarian Hutan periode setelah diberlakukan kebijakan otonomi daerah lebih tinggi daripada periode sebelum otonomi daerah sebesar 0.021 persen dengan syarat variabel lain diasumsikan konstan. Uji statistik menunjukkan bahwa secara parsial variabel otonomi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kelestarian hutan di Provinsi Bali Tahun 1993-2019. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan nilai t statistik (0,524) yang lebih kecil dari t tabel (2,069).

Dewasa ini perkembangan kebijakan kehutanan sedang mengalami pasang surut akibat tekanan dari dalam maupun luar negeri. Banyak permasalahan tentang kehutanan yang telah memicu berkembangnya isu ini. Karena permasalahan kehutanan bukan hanya tentang perambahan hutan maupun konversi lahan tetapi juga banyak unsur lain seperti konflik sosial, ekonomi, bahkan politik. Strategi nasional untuk pengelolaan hutan sampai saat ini belum menemui visi dan misi yang jelas akibat penataan ruang yang tidak kunjung selesai sehingga menimbulkan konflik dan permasalahan yang berkepanjangan. Sudah cukup banyak kebijakan yang ditelurkan oleh pemerintah pusat untuk menangani isu-

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

isu ini namun semua itu belum cukup memadai untuk menyelesaikannya. Unsur politik memiliki peranan kuat dalam memutuskan kebijakan dalam menentukan arah pengelolaan hutan di Indonesia. Terutama yang paling berpengaruh saat ini adalah keputusan pemerintah untuk melaksanakan sistem otonomi daerah yang melakukan desentralisasi berbagai fungsi pemerintahan, termasuk di dalamnya berbagai aspek dan peraturan pengelolaan hutan, kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten. Namun, pembagian wewenang dalam implementasi kebijakan otonomi daerah terhadap pengelolaan hutan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten tidak jelas dan cenderung diperebutkan.

Kebebasan yang dianut sistem desentralisasi tertuang dalam pembagian kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kebijakan sentralistik telah dirubah menjadi desentralistik yang bersifat *bottom-up*, dimana desentralisasi memberikan harapan dan kesempatan baru terhadap pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi kawasan hutan mereka untuk dikelola dan juga dapat menentukan arah pengelolaan hutan sendiri sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya. Pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi lokal mereka sendiri dalam rangka membangun daerah yang mandiri dan berkompeten dalam membantu pembangunan sistem kehutanan nasional. Selain itu pembangunan infrastruktur di daerah yang sulit terjangkau akan lebih mudah terakomodir melalui desentralisasi ini karena cakupan pengelolaannya yang relatif lebih sempit dibanding skala nasional.

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

Para *stakeholders* tingkat daerah memiliki peran lebih dalam hal perancangan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kebijakan. Dengan makin dekatnya jarak antara proses pengambilan kebijakan dengan sumberdaya dan masyarakat serta *stakeholders* lainnya maka komunikasi antar *stakeholders* akan lebih terjalin lebih baik dan intensif, selain itu juga diharapkan bisa lebih mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari, adil dan demokratis serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Kebijakan desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola sumberdaya hutan dan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat setempat dalam memperoleh akses dan manfaat dari sumberdaya hutan yang ada.

Namun dalam perjalanannya, dampak desentralisasi kebijakan kehutanan di era otonomi daerah umumnya belum menunjukkan hasil seperti yang diharapkan. Pemberian wewenang kepada pemerintah daerah telah mengakibatkan munculnya stigma dan pergeseran pola pikir dimana meningkatkan pendapatan daerah merupakan prioritas utama ketika mereka diberi tanggung jawab yang besar untuk mengelola daerah mereka sendiri tetapi tanpa bantuan dana yang cukup dari pemerintah pusat untuk membiayai kegiatan mereka. Di satu sisi, ketidakjelasan definisi kewenangan administratif dan pemahaman yang belum sama antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten terhadap desentralisasi cenderung masih menjadi batu sandungan pelaksanaan pembangunan kehutanan daerah. Di sisi lain, kewenangan bagi Kepala Daerah apakah Walikota

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

atau Bupati untuk mengeluarkan izin pengelolaan hutan kepada pihak swasta telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya daerah meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Namun demikian, seiring hal tersebut timbul suatu kekhawatiran akan semakin luasnya hutan yang terdegradasi akibat pemanfaatan hutan yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian karena hanya mementingkan manfaat ekonominya saja. Walaupun masyarakat setempat adalah sasaran utama dalam upaya pemberdayaan di era otonomi daerah, pada kenyataannya masyarakat setempat belum memperoleh manfaat yang wajar dan berkesinambungan.

Tumpang tindih kebijakan tentang pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah telah menyebabkan melemahnya kekuasaan Menteri Kehutanan sebagai orang nomor satu di sektor kehutanan di Republik Indonesia terhadap pengambilan dan penerapan kebijakan yang dilakukan oleh bupati sebagai pemimpin daerah. Perbedaan perspektif dalam menafsirkan kebijakan juga kerap kali terjadi dan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan akibat tidak adanya solusi yang ditawarkan pemerintah pusat sebagai pemegang mutlak kekuasaan sumber daya alam yang dimiliki negara. Begitu banyaknya izin kelola hutan yang dikeluarkan oleh Walikota atau Bupati dan juga pemerintah tingkat desa sehingga menyebabkan eksploitasi terhadap kawasan hutan yang berlebihan melalui pembalakan dan konversi lahan untuk perkebunan, pertambangan dll. Penyalahgunaan fungsi hutan pun merebak luas akibat tidak adanya panduan yang jelas dari Kementrian Kehutanan. Pemerintah lokal

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

mulai dari tingkat desa hingga kabupaten berlomba-lomba untuk memanfaatkan hutan sebagai sumber pendapatannya.

Pengelolaan hutan yang dilakukan pemerintah daerah yang cenderung hanya mengeksploitasi manfaat hutan dari segi ekonomi saja telah menyebabkan termarginalkannya aspek ekologi dan sosial hutan yang tidak kalah pentingnya. Bentuk pengelolaan yang seperti ini sangat rentan terhadap kerusakan sumber daya hutan apabila tidak ada skema pengelolaan baru yang lebih bersahabat terhadap keberlangsungan fungsi hutan. Dalam jangka panjang kerusakan fungsi ekologis hutan akan berdampak buruk terhadap keseimbangan ekosistem. Dan fungsi hutan sebagai pengatur tata air, penyimpanan karbon, penyeimbang siklus hara akan terganggu. Selain itu berbedanya kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing *stakeholders* memicu terjadinya gejolak yang tidak sehat dalam perjalanan pengelolaan hutan di suatu daerah. Pembalakan hutan besar-besaran berkedok izin legal pun banyak terjadi akibat ketidakseimbangan pembagian peran dalam penentuan kebijakan antara pemerintah dengan masyarakat. Pengelolaan sumber daya yang semestinya dilakukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat namun hanya dinikmati oleh segelintir pemegang kekuasaan, sehingga lagi-lagi masyarakat sebagai aktor sekaligus obyek dari penerapan desentralisasi terpinggirkan haknya.

Dalam hal ini pemerintah tidak boleh hanya berdiam diri. Harus segera dilakukan evaluasi dan pembenahan terhadap kebijakan desentralisasi

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

pengelolaan hutan. Peraturan yang tertuang di dalam undang-undang harus segera direvisi agar tidak terjadi tumpang tindih antar *stakeholders* dan juga pembagian wewenang yang adil antara pemerintah pusat dan daerah. Arah pengelolaan hutan yang seragam perlu segera dibentuk agar tercapai suatu konsep pengelolaan yang komprehensif meskipun nantinya dalam pelaksanaan di lapangan akan terjadi perbedaan mengikuti karakteristik khas yang dimiliki masing-masing daerahserta adanya pembenahan di semua jenjang birokrasi pemerintahan hingga masyarakat harus dilakukan secara terbuka untuk menjamin kebebasan berdemokrasi. Selain itu evaluasi juga perlu dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan tiap *stakeholders* agar tercapai pengelolaan hutan yang lestari serta tercapainya masyarakat yang sejahtera.

Pengelolaan sumber daya hutan harus bergantung pada tiga pilar yaitu ekonomi, ekologi dan sosial. Oleh karena itu pelaksanaan tata kelola hutan yang ideal tidak cukup dilandasi dengan pembangunan aspek ekonomi dan ekologi saja, tetapi aspek sosial budaya di tingkat lokal juga perlu diperhatikan agar tercapai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan yang lestari dan berkelanjutan. Langkah riil dan konkrit harus segera dilakukan oleh pemerintah juga *stakeholders* lainnya untuk menangani permasalahan ini.

Desentralisasi kehutanan sebagai kebijakan prioritas pemerintah mengalami perubahan dalam beberapa tahun terakhir. Penguatan desentralisasi menjadi salah satu kebijakan prioritas pengurusan kehutanan menjadi salah satu kebijakan pendukung dari

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

lima kebijakan prioritas kehutanan yang antara lain mencakup penanganan pencurian kayu dan perdagangan kayu ilegal, revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan, rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan, pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan dan pemantapan kawasan hutan.

Mencermati visi, misi, sasaran dan kebijakan prioritas Pemerintah utamanya yang bersentuhan dengan Tugas Pokok dan Fungsi dalam bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan perkembangannya yang terkait dengan otonomi daerah, dapat disampaikan empat hal berikut:

- 1) Sampai saat ini, program kehutanan nasionalnya (*national forestry program*) belum selesai disusun dan masih dalam proses sosialisasi dan diskusi. Padahal program kehutanan nasional tersebut menjadi pedoman dan acuan bagi pemerintah-pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi pengelolaan hutan.
- 2) Target desentralisasi, pelimpahan wewenang dan tanggung jawab secara bertahap kepada pemerintah daerah telah ditetapkan dalam PP 34/2002 maupun PP 6/2007. Namun demikian, pedoman, kriteria dan standar penyelenggaraan kehutanan masih belum selesai disusun. Terlambatnya penyusunan pedoman tersebut menghambat penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis oleh instansi kehutanan di daerah.
- 3) Sekalipun merupakan cerminan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi, visi dan misi Kementerian

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

Kehutanan yang sering berubah-ubah akan berdampak buruk terhadap pemahaman individu di lingkungan kerjanya dan menciptakan suasana yang kontraproduktif terhadap pencapaian visi dan misi itu sendiri.

- 4) Berubahnya arah kebijakan desentralisasi kehutanan yang sebelumnya merupakan kebijakan prioritas menyisakan pertanyaan tentang sejauh mana komitmen pemerintah pusat terhadap pelaksanaan otonomi pengelolaan sumberdaya hutan. Hal ini mengingat target desentralisasi kehutanan periode sebelumnya belum sepenuhnya terealisasi dan pembelajaran dari pengalaman tersebut belum dievaluasi.

Harapan terwujudnya hutan lestari melalui kebijakan pengelolaan hutan yang mengedepankan keseimbangan fungsi ekologi, ekonomi dan sosial budaya yang diikat dengan peraturan perundang-undangan dari mulai UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diperbarui dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan diperbarui kembali melalui UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang melahirkan kebijakan desentralisasi sektor kehutanan dalam kenyataannya belumlah terbukti (Sudiyono, 2015)

#### **4.5 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Merupakan Determinan Yang Paling Berpengaruh Terhadap Kelestarian Hutan di Provinsi Bali Tahun 1993-2019**

Dari hasil perhitungan nilai *standardized of coefficient beta* dapat diketahui bahwasannya variabel Produk Domestik Regional Bruto merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling besar terhadap kelestarian hutan di Provinsi Bali Tahun 1993-2019, dengan nilai *standardized of coefficient beta* sebesar 9,029. Nilai *standardized of coefficient beta* dari masing-masing variabel bebas dapat dilihat dalam tabel 4.2 Berikut :

**Tabel 4.3**  
**Hasil Perhitungan Nilai *Standardized of Coefficient Beta***

<b>Variabel</b>	<b><i>Standardized of Coefficient Beta</i></b>
PDRB	9,029
Jumlah Penduduk	1,786
Otonomi Daerah	0,04

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Produk Domestik Regional Bruto berdasarkan hasil analisis berpengaruh positif dan signifikan serta juga merupakan variabel yang berpengaruh dominan terhadap kelestarian hutan di Provinsi Bali serta memiliki hubungan yang positif. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali yang ditunjukkan dengan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto ternyata diimbangi pula

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

terhadap pelestarian lingkungan dan pelestarian hutan. Oleh sebab itu, seharusnya masing-masing daerah berupaya menyeimbangkan antara perkembangan Produk Domestik Regional Bruto serta aspek lingkungan sehingga pembangunan berkelanjutan dapat tercapai.

Spirit reformasi, pembangunan kehutanan yang berkelanjutan dan berkeadilan tidak mungkin tercapai apabila paradigma kehutanan yang lama masih dijadikan acuan. Paradigma kehutanan yang lama tersebut adalah pengusahaan hutan hanya memberikan keuntungan yang besar bagi pengusaha, tidak dapat mengangkat ekonomi masyarakat dan daerah serta memiliki dampak lingkungan yang tinggi. Oleh karena itu diperlukan perubahan paradigma secara mendasar yaitu pergeseran orientasi dari pengelolaan kayu menjadi pengelolaan sumber daya pengelolaan sentralistik menjadi desentralistik, serta pengelolaan hutan di masa depan lebih mempertimbangkan keseimbangan antara aspek ekonomi, ekologi dan sosial masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan. Adanya paradigma baru dalam pengelolaan hutan diharapkan dapat menjaga dan mempertahankan kelestarian hutan dan tentunya dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pemerintah khususnya perolehan sumber Pendapatan Asli Daerah.

Sejalan dengan analisis Simon Kuznets tentang pengaruh kelestarian lingkungan hidup terhadap pertumbuhan ekonomi ini secara teoritis diungkapkan dengan munculnya teori *Environmental Kuznets Curve* (EKC). Teori *Environmental Kuznets Curve* menyatakan bahwa untuk kasus di negara sedang berkembang seiring

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

dengan perjalanan waktu, teknologi dapat merusak kelestarian alam dan lingkungan, sebaliknya untuk negara maju seiring dengan perjalanan waktu dalam kemajuan teknologi, maka kelestarian lingkungan hidup semakin bisa dijamin keberadaannya. Berdasarkan pada penemuannya tersebut, bentuk kurva *Environmental Kuznets Curve* adalah huruf U terbalik (Munasinghe dalam Gupito, 2012).

Sejak dimulainya otonomi daerah yang secara efektif dimulai pada 1 Januari 2001, sudah memasuki tahun ke delapan belah. Dalam pelaksanaannya diharapkan berbagai tantangan yang cukup berat salah satunya adalah bagaimana kemampuan daerah dalam mempersiapkan berbagai infrastruktur pembangunan daerah, sehingga daerah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara meningkatkan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah.

Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan sistem pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam sektor Kehutanan dengan tujuan terciptanya *equilibrium* antara aspek sumber daya alam sebagai modal pertumbuhan ekonomi melalui kontribusi sektor pertanian, pertambangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto dengan aspek perlindungan terhadap kelestarian dan fungsi lingkungan hidup sebagai penopang kehidupan secara luas.

*Equilibrium* antara aspek sumber daya alam sebagai *capital* pertumbuhan maupun pembangunan ekonomi melalui kontribusi *sector agriculture* tersebut

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

untuk menjamin keberlanjutan pembangunan (*sustainable development*). Untuk itu tiga pilar pembangunan yang harus diperhatikan secara seimbang yaitu : saling menguntungkan secara ekonomi (*economically profitable*), diterima secara sosial (*socially acceptable*) dan ramah lingkungan (*environmentally sound*). Prinsip tersebut harus dijabarkan dalam bentuk instrumen kebijakan dan peraturan perundangan lingkungan yang dapat mendorong investasi pembangunan jangka menengah di seluruh sektor dan bidang terkait dengan sasaran pembangunan sumber daya alam dengan optimalisasi pembangunan berwawasan lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk memelihara dan melestarikan pengelolaan sumber daya hutan yang ada di Provinsi Bali.

Setiap tindakan yang diarahkan kepada kelestarian penggunaan sumber daya alam dapat diinterpretasikan sebagai suatu tindakan konservasi (Suparmoko, 2016). Tindakan tersebut bersifat konservasi sampai suatu penggunaan maksimum yang lestari dapat dicapai. Hubungan antara tingkat penggunaan sumber daya hutan melalui penerimaan marjinal dan biaya marjinal yang digunakan untuk meningkatkan pendapatan maupun pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produk domestik regional bruto dapat terdiferensiasi tergantung dari macam input dan macam output yang dipengaruhinya.

Dalam korelasi independensi dalam tingkat penggunaan lewat penerimaan pada umumnya penggunaan sumber daya hutan tidak memiliki korelasi dalam penerimaan untuk semua jenjang tingkatan

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

(Suparmoko, 2016). Dalam hal terkait dengan biaya produksi bahwasannya dapat diasumsikan bahwa perubahan harga akan memperkuat atau memperlemah komplementaris melalui biaya sepanjang periode perencanaan. Apabila dianggap bahwa saling ketergantungan tingkat penggunaan sumber daya alam lewat penerimaan dan biaya tidak terpengaruh oleh perubahan harga input maupun output, maka suatu kenaikan dalam harga produk yang diharapkan terjadi dalam periode perencanaan yang akan datang dan tidak diketahui kapan berakhirnya atau kenaikan dalam harga produk yang diharapkan akan semakin tinggi dengan berkembangnya waktu, hal ini akan mendorong perencana untuk menggeser penggunaan sumber daya ke masa yang akan datang.

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*



## BAB V

# EPILOG

### 1.1 Refleksi

Sumber daya alam merupakan unsur lingkungan hidup manusia yang sangat penting. Manusia hidup dan berkembang dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada disekitarnya atau lingkungan yang meliputi tanah, air, udara, flora, fauna, mikroorganisme, mineral dan energi. Sumber daya alam dan lingkungan tidak dapat dilepaskan peranannya sebagai sumber kehidupan serta sumber pendapatan bagi proses pembangunan pada suatu negara. Bahkan lebih dari tiga dekade yang lalu, sejak isu lingkungan hidup untuk pertama kali secara resmi menjadi perhatian dunia dalam konferensi internasional yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Stockholm, Swedia pada tahun 1972 hingga yang terakhir adalah UNFCCC (*United Nation Framework Convention on Climate Change*) di Nusa Dua, Badung, Bali pada akhir tahun 2007.

Ada kesamaan konferensi tingkat tinggi dunia tersebut membahas mengenai kerusakan lingkungan yang terjadi akibat dari industrialisasi yang berorientasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan aspek lingkungan sehingga mengakibatkan iklim dunia menjadi berubah seperti sekarang ini, atau yang disebut dengan pemanasan global (*global warming*).

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*



Gambar 5.1 Upaya Konservasi Hutan Bakau di Bali dengan Menggandeng Mega Bintang Sepak Bola Cristiano Ronaldo (Sumber : viva.co.id)

Di Bali pada khususnya bahasan seputar penyelamatan lingkungan ternyata sudah diwariskan sejak jaman dahulu. Ini terbukti dari adanya ritual khusus pada hari Raya *Tumpek Wariga* setiap 6 (enam) bulan sekali yang bertujuan untuk peringatan pada tumbuh-tumbuhan yang secara tidak langsung merupakan pengejawantahan terhadap kelestarian lingkungan. Selain itu melalui konsep *Tri Hita Karana* juga menjadi pedoman mengenai konsep hubungan antara manusia, alam serta Tuhan, sehingga di Bali unsur alam atau penyelamatan lingkungan ini sudah digariskan sejak dahulu hingga sekarang *Tri Hita Karana* berasal dari kata *Tri* yang berarti

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

tiga, *Hita* yang berarti kebahagiaan dan *Karana* yang berarti penyebab, dengan demikian *Tri Hita Karana* berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan.

Konsep kosmologi *Tri Hita Karana* merupakan falsafah hidup tangguh. Falsafah tersebut memiliki konsep yang dapat melestarikan keanekaragaman budaya dan lingkungan dalam era globalisasi. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kerusakan lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Untuk sebagian orang, pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana mencari jalan untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang, tanpa menghabiskan modal alam. Pembangunan di bidang ekonomi yang berhasil akan berarti meningkatkan kemampuan masyarakat untuk melindungi lingkungannya.

Hutan berfungsi sebagai tempat suci, penyangga kehidupan, pengatur tata air, pencegah banjir, pengendali erosi, pencegah intrusi air laut, pemelihara kesuburan tanah dan sumber air bagi kehidupan makhluk hidup. Hutan juga memberikan persoalan kepada manusia, mengajarkan, mengajak manusia untuk berpikir dan melalui interaksi manusia dengan lingkungan hutan, kemudian memunculkan berbagai kepercayaan, pengetahuan, keanekaragaman sosial budaya, karya sastra, seni, berbagai macam jenis sandang pangan yang menyebabkan manusia menjadi sejahtera hidupnya (Dharmika, 2020).

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

Dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya hutan diperlukan pendekatan kolaboratif antara semua pihak pada sebuah kawasan hutan yang terlibat dalam kegiatan pengelolaannya. Implementasi pendekatan kolaboratif dalam pengelolaan hutan dapat diharapkan akan memberikan beberapa dampak positif diantaranya :

- 1) Program pembangunan hutan lebih aplikatif sesuai dengan kondisi fisik hutan, konteks sosial, ekonomi, budaya masyarakat sekitar sehingga memenuhi fungsi kelestarian hutan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
- 2) Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab diantara semua pihak terkait dalam merencanakan dan mengimplementasikan program, sehingga pelaksanaan program pembangunan hutan dapat berjalan dengan efektif dan berkelanjutan.
- 3) Adanya peran bagi semua pihak yang berkepentingan untuk ikut terlibat dalam proses pembangunan hutan, khususnya dalam hal pengambilan dan pertanggung jawaban keputusan.
- 4) Implementasi program kehutanan menjadi lebih objektif dan fleksibel berdasarkan keadaan setempat.
- 5) Adanya transparansi dan keterbukaan informasi.

Kelima dampak positif diterapkannya pendekatan kolaboratif dalam pengelolaan hutan tersebut hanya akan terjadi bila pada implementasinya para pihak terkait senantiasa menjunjung tinggi dan mengamalkan prinsip-prinsip kolaborasi. Prinsip-prinsip kolaborasi yang perlu

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

diamalkan dalam pembangunan hutan adalah (Siagian, 2015) :

- 1) Keterlibatan pihak terkait, adanya keterlibatan semua pihak yang terlibat baik individu maupun kelompok.
- 2) Kesetaraan dan kemitraan yang pada dasarnya semua pihak mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta memiliki hak untuk menggunakan prakarsa tersebut dalam setiap proses pembangunan hutan guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang masing-masing pihak.
- 3) Transparansi, semua pihak wajib menumbuhkan kembangkan komunikasi terbuka yang kondusif sehingga menimbulkan dialog yang produktif.
- 4) Kesetaraan kewenangan, berbagai pihak yang terlibat harus mampu menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi dalam pengelolaan hutan.
- 5) Kesetaraan tanggung jawab, berbagai pihak memiliki tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses pembangunan hutan karena dengan adanya kesetaraan kewenangan akan menjadi lebih baik.

Aspek penting dalam pendekatan kolaboratif di sektor kehutanan adalah mempertimbangkan sisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Dominasi struktural maupun arogansi individualpelaksana program, mengandaikan bahwa masyarakat lokal tidak perlu dilibatkan, mengetahui dan mencampuri kebijakan struktural pemerintah. Aspek kebudayaan masyarakat

lokal tidak dipertimbangkan, sebagai faktor yang urgen dalam mengimplementasikan pendekatan kolaborasi dan sikap menyepelekan kekayaan kultural masyarakat ini juga akan berdampak pada kualitas penerimaan masyarakat terhadap pendekatan kolaboratif yang diperkenalkan.

Cita –cita ideal mebangung hutan lestari sehingga hutan yang masih utuh, atau hutan yang telah digarap memberikan manfaat, tidak dapat dikerjakan oleh pemerintah sendiri, melainkan mesti mengikut sertakan berbagai pihak yang berkompeten di bidangnya. Pendekatan kolaborasi atau program bersama masyarakat di sektor kehutanan, pada awal tahun 1980 an pemerintah Indonesia melalui Departemen Kehutanan memperkenalkan sebuah program bernama Pola Kemitraan Model Inti-Plasma yang mengikutsertakan para petani dan perusahaan perkebunan (Haba, 2015).

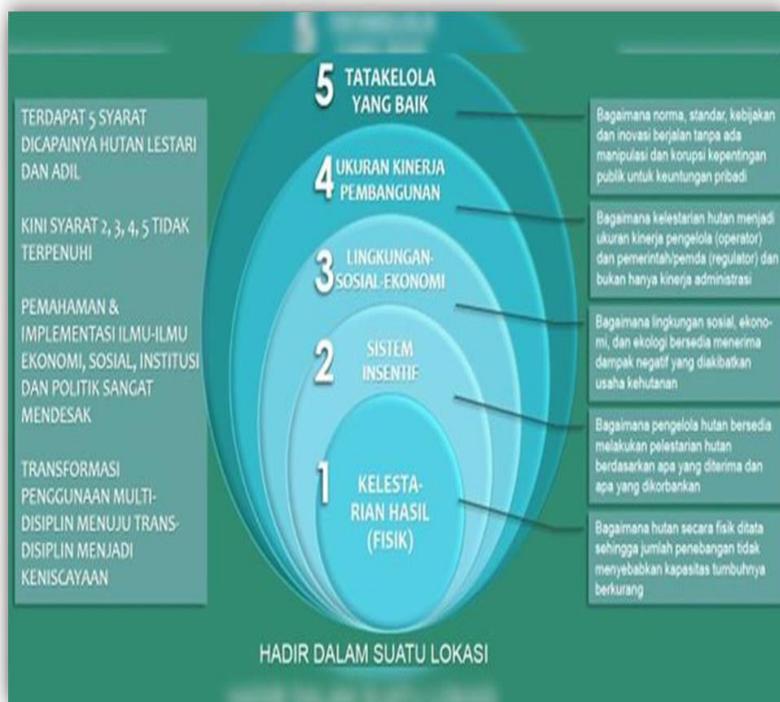
## **1.2 Yang Patut Dilakukan**

Untuk masa mendatang, pengelolaan sumber daya hutan saja tidaklah cukup mengingat problematika yang berkaitan dengan lingkungan hidup juga perlu dirancang secara terstruktur dalam setiap rencana pembangunan hutan. Pengelolaan sumber daya hutan, walaupun telah memerhatikan keanekaragaman hayati dan kepentingan rakyat setempat, masih dikembangkan dengan titik berat untuk memenuhi fungsi ekonomi.

Sesuai dengan kodratnya, peranan pohon yang paling utama adalah menjaga ekosistem permukaan planet bumi. Oleh karena itu dengan semakin banyaknya jumlah penduduk serta teknologi fungsi lindung akan

HUTAN LESTARI  
Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya

menjadi lebih urgen dibandingkan dengan fungsi ekonomi yang diharapkan dari hutan. Dengan paradigma baru tersebut tidaklah mustahil bahwa fungsi ekonomi hutan bisa saja berubah menjadi *side product* sedangkan hasil primer yang diharapkan dari hutan adalah fungsi perlindungan (Simon, 2008). Untuk mengimplementasikan konsep pengelolaan ekosistem hutan, masih banyak elemen-elemen ilmu kehutanan dan lingkungan yang harus digali kembali.



Gambar 5.2 Tata Kelola Hutan Lestari  
(Sumber : Kartodihadrjo, 2018)

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Pengelolaan sumber daya alam dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan tidak hanya mempertimbangkan manfaat kekayaan alam itu dalam sesaat dengan keuntungan yang sebesar-besarnya tetapi yang diperlukan adalah pengelolaan yang tepat demi kelestarian pembangunan jangka panjang yaitu dengan cara menginternalisasikan eksternalitas negatif yang disebabkan oleh pembangunan ekonomi, maka perlu dilakukan tindakan-tindakan antara lain :

- 1) Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi tidak hanya terfokus pada eksploitasi sumber daya hutan (hutan alam) akan tetapi perlu mengembangkan sumber daya alternatif atau mencari sumber daya pengganti sehingga sumber daya alam yang terbatas jumlahnya dapat disubstitusikan dengan sumber daya alam jenis yang lain seperti perlunya dikembangkan pola Hutan Tanaman Industri (HTI) dan pengembangan hutan rakyat.
- 2) Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat karakteristik, dan kerentanannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya. Pemanfaatan hutan dan kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi pokoknya, yaitu fungsi konservasi, lindung, dan produksi. Untuk menjaga keberlangsungan fungsi pokok hutan dan kondisi hutan, dilakukan juga upaya rehabilitasi serta reklamasi hutan dan lahan, yang bertujuan selain mengembalikan kualitas hutan juga meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga peran serta masyarakat merupakan inti keberhasilannya.

- 3) Dalam pengurusan hutan secara lestari diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas bercirikan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasari dengan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu perlu dilaksanakan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta penyuluhan kehutanan yang berkesinambungan dengan wajib memperhatikan kearifan tradisional serta kondisi sosial budaya masyarakat.
- 4) Perlu adanya penegakan hukum dan aturan-aturan dalam bidang kehutanan sehingga tujuan dari hukum dan aturan-aturan tersebut dapat melindungi dan menjaga kelestarian hutan agar dapat berfungsi dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara lestari.
- 5) Perlu adanya sosialisasi dan pemahaman menyeluruh kepada tiap-tiap daerah untuk

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

menggunakan pendekatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Hijau dalam merencanakan pembangunan sebagai acuan dalam mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan aspek lingkungan didalamnya, atau dengan kata lain penyeimbangan proses pembangunan ekonomi menuju pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2007. *Bhagawadgita. Bali : Pemerintah Provinsi Bali*
- Anonim . 2007. *Srasamuccaya. Bali : Pemerintah Provinsi Bali*
- Arief, S., 1993. *Pemikiran pembangunan dan kebijaksanaan ekonomi.* Lembaga Riset Pembangunan.
- Anwar, D., 2002. Analisis Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kelestarian Hutan. *Yayasan Sugianto. Jakarta.*
- Alam, S., 2007. *Hajawa. Peranan sumberdaya hutan dalam perekonomian dan dampak pemungutan rente hutan terhadap kelestarian hutan di Kabupaten Gowa.*
- Atmaja, N.B., 2008. Kearifan Lokal: Mendekatkan Kesenjangan Antara Teks Ideal dan Teks Sosial Melalui Pikiran Menyintesis dan Multiperspektif. In *Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Terkait Jubilium Emas (50 th) Fakultas Sastra Universitas Udayana. Masyarakat Tenganan Pegringsingan: Sebuah Kajian Linguistik Kebudayaan.* Disertasi Pada Program Studi S3 Linguistik Program Pascasarjana Universitas Udayana.
- Barr, C. M., Resosudarmo, I. A. P., Dermawan, A., McCarthy, J., Moeliono, M., & Setiono, B. (Eds.). 2006. *Decentralization of forest administration in Indonesia: Implications for forest*

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

- Blowers, A. (Ed.). 2013. *Planning for a sustainable environment*. Routledge.
- Badrudin, R., 2011. Effect of fiscal decentralization on capital expenditure, growth, and welfare. *Economic Journal of Emerging Markets*, 3(3), pp.211-223.
- Badrudin, R., 2017. *Ekonomika Otonomi Daerah. Yogyakarta : UPP STIM YKPN*
- Bali, B. P. S. (2018). *Bali Dalam Angka. Denpasar: Badan Pusat Statistik Propinsi Bali.*
- Cheek, M. and Haba, P., 2016. *Inversodicraea Engl. resurrected and I. pepehabai sp. nov.*(Podostemaceae), a submontane forest species from the Republic of Guinea. *Kew bulletin*, 71(4), p.55. *sustainability, economic development, and community livelihoods*. CIFOR.
- Dewi, D.K., Syahrin, A., Arifin, S. and Tarigan, P., 2014. Izin Lingkungan dalam Kaitannya dengan Penegakan Administrasi Lingkungan dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Uupplh). *USU Law Journal*, 2(1), pp.124-138.
- Dinas Kehutanan. 2017. *Statistik Kehutanan Provinsi Bali. Denpasar*
- Dinas Kehutanan. 2018. *Statistik Kehutanan Provinsi Bali. Denpasar*
- Dinas Kehutanan. 2019. *Statistik Kehutanan Provinsi Bali. Denpasar*
- Dharmika, I.B. 2014 . *Politik Sentralisasi Kehutanan Dalam Keanekaragaman Kearifan Ekologi Hindu. Denpasar : Universitas Hindu Indonesia.*

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

- Dharmika, I.B. 2020. *Paradoks Bali : Agama, Budaya dan Kekerasan Hutan*. Badung: Sarwa Tattwa Pustaka.
- Farid, A., 2003. Fisherfolk oppose park management and The Nature Conservancy. In *WALHI-Indonesian Forum for Environment*.
- Food and Agruculture Organization. 2011. *State of the Worlds Forests*. Food and Agriculture Organization (FAO). United Nations, Rome.
- Fraser, B.J., 1998. Classroom environment instruments: Development, validity and applications. *Learning environments research*, 1(1), pp.7-34.
- Gelgel. I.P., 2013. Revitalisasi dan Transformasi Kearifan Lokal Masyarakat Bali Dalam Pembangunan Hukum. *Denpasar : Universitas Hindu Indonesia*
- Gonda, J., 1953. *Reflections on the Numerals "one" and "two" in Ancient Indo-European Languages*. A. Oosthoek.
- Glueck, C.J., Wang, P., Fontaine, R.N., Sieve-Smith, L., Tracy, T. and Moore, S.K., 1999. Plasminogen activator inhibitor activity: an independent risk factor for the high miscarriage rate during pregnancy in women with polycystic ovary syndrome. *Metabolism*, 48(12), pp.1589-1595.
- Gustafsson, L., Baker, S.C., Bauhus, J., Beese, W.J., Brodie, A., Kouki, J., Lindenmayer, D.B., Löhmus, A., Pastur, G.M., Messier, C. and Neyland, M., 2012. Retention forestry to maintain multifunctional forests: a world perspective. *BioScience*, 62(7), pp.633-645.
- Gupito, K. R., & KODOATIE, J. M. 2012. *Keterkaitan PDRB Perkapita Dari Sektor Industri, Transportasi, Pertanian dan Kehutanan Terhadap Kualitas Lingkungan Diukur*

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

*Dari Emisi Co<sub>2</sub> (Studi kasus di: 30 Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2010)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).

- Haba, Jhon. 2015. *Pengelolaan hutan Secara Kolaboratif : Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur*. Yayasan Pusataka Obor Indonesia. Jakarta
- Hadi, S.P., 2002. Dimensi Hukum Pembangunan Berkelanjutan. *Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang*.
- Hosonuma, N., Herold, M., De Sy, V., De Fries, R. S., Brockhaus, M., Verchot, L., ... & Romijn, E. (2012). An assessment of deforestation and forest degradation drivers in developing countries. *Environmental Research Letters*, 7(4), 044009.
- Indonesia, P.R. and Indonesia, P.R., 1990. Undang Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang: Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. *Jakarta: Dephut*.
- Indonesia, P.R., 1992. Undang Undang No. 4 Tahun 1992 Tentang: Perumahan dan Pemukiman. *Lembaran Negara RI Tahun*, (23).
- Indonesia, P., 1999. *Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah*. Bagian Proyek Peningkatan Publikasi Pemerintah, Direktorat Publikasi, Ditjen PPG, Deppen RI.
- Indonesia, P.R. and Nusantara, W., 1997. Undang Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang: Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Sekretariat Negara, Jakarta*.
- Indonesia, R., 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang. *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

- Indonesia, P.R., 2013. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000.
- Indonesia, R., U.U.,No. 32. tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Jusnianto.2007. Dampak Kebijakan Pembangunan Kehutanan Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin di Kalimantan Timur : Suatu Pendekatan Model Sistem Neraca Sosial Ekonomi. *Jurnal Manajemen Agribisnis*. Vol. 3 No. 1 Maret 2007 : 37-44
- Liu, J., 2014. Forest Sustainability in C hina and Implications for a Telecoupled World. *Asia & the Pacific Policy Studies*, 1(1), pp.230-250.
- Litvack, J., Ahmad, J. and Bird, R., 1998. *Rethinking decentralization in developing countries*. The World Bank.
- Marwa, J., 2010. Penilaian Ekonomi Sumberdaya Hutan dan Lingkungan. *Fakultas Kehutanan Universitas Negeri Papua. Buku Ajar. Manokwari (Tidak diterbitkan). Lampiran, 1.*
- Mantra, I.B. 2000. Demografi Umum. *Yogyakarta : Pustaka Pelajar*
- Margono, B.A., Turubanova, S., Zhuravleva, I., Potapov, P., Tyukavina, A., Baccini, A., Goetz, S. and Hansen, M.C., 2012. Mapping and monitoring deforestation and forest degradation in Sumatra (Indonesia) using Landsat time series data sets from 1990 to 2010. *Environmental Research Letters*, 7(3), p.034010.
- Maryudi, Ahamad. 2016. *Rejim Politik Kehutanan Internasional*. Yogyakarta. UGM Press

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

- Murtijo, N., A 2005. *Antropologi Kehutanan, Wana Aksara, Banten.*
- Norton, M.M. and Fisher, T.R., 2000. The effects of forest on stream water quality in two coastal plain watersheds of the Chesapeake Bay. *Ecological Engineering*, 14(4), pp.337-362.
- Nurrochmat, D. R., Darusman, D., & Ekayani, M. 2016. Kebijakan Pembangunan Kehutanan dan Lingkungan. Bogor Agricultural University (IPB).
- Nurrochmat, D. and Purwandari, H., 2006. *Politik desentralisasi pemerintahan desa.* Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan, IPB bekerjasama dengan Kemitraan bagi Pembangunan Tata Pemerintahan di Indonesia.
- Nurfatriani, F., Darusman, D., Nurrochmat, D.R. and Yustika, A.E., 2015. Analisis pemangku kepentingan dalam transformasi kebijakan fiskal hijau. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 12(2), pp.105-124.
- Overdeest, C. 2010. *Comparing Forest Certification Schemes : the case of Ratcheting Standards in the Forest Sector.* Socio-Economic Review, 8, 47-76
- Panto, Amin. 2003. Kontribusi Pengelolaan Hutan Terhadap PAD Sulteng dalam OTODA. Forest Watch Indonesia
- Rianse, U. and Abdi, 2010. *Agroforestri: solusi sosial dan ekonomi pengelolaan sumber daya hutan.* Alfabeta.
- Ramli, S.H., 2001. Establishing civilian supremacy in Indonesia: Problems and prospects.
- Reksohadiprodjo, S., 1985. Produksi tanaman hijauan makanan ternak tropik. *BPFE, Yogyakarta*

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

- Salim, E. and Afriyenis, W., 2020. Development and Improvement Strategies Interest in Visiting Twin Lake Attraction in West Sumatra. *Journal of Applied Business Administration*, , 4(1), pp.58-64.
- Sahide, M.A.K., Burns, S., Wibowo, A., Nurrochmat, D.R. and Giessen, L., 2015. Towards state hegemony over agricultural certification: From voluntary private to mandatory state regimes on palm oil in Indonesia. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 21(3), pp.162-171.
- Sanjaya, K. 2020. *Mudah Memahami Mikro Ekonomi Suatu Pengantar*. Bandung : CV Sadari Press.
- Sanjaya, P. K. A., Nuratama, I. P., & Diputra, G. I. S. (2020). SOCIAL ECONOMY INDICATOR ON CONSTRUCTING FOREST SUSTAINABILITY IN BALI. *Научный вестник Южного института менеджмента*, (2).
- Sanjaya, K. 2019. *Ekonomika Uang : Based on Empirical Research*. Bandung: Penerbit Sadari Press.
- Sanjaya, K. 2018. *Metode Mudah Memahami Pengantar Ekonomi Makro*. Denpasar: Penerbit Dharmastuti.
- Sanjaya, P. K. A., Wimba, I. G. A., & Kawiana, I. G. P. 2019. Analisis Beberapa Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penanaman Modal Asing di Provinsi Bali : Analisis Partial Adjustment Model.. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(2), 131-138.
- Sanjaya, P. K. A., Wulandari, N. L. A. A., Sumadi, N. K., & Sugianingrat, I. A. W. (2019, July). Accelerating Regional Economic Development through Tourism: The development of "Alas Kedaton" as a spiritual tourism destination. In *International Conference on*

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

- Innovation in Research (ICIIR 2018)–Section: Economics and Management Science*. Atlantis Press.
- Sanjaya, P. K. A. 2018. Etika Bisnis dan Entrepreneurship dalam Pembangunan Ekonomi Bali: dalam Perspektif Hindu. *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan*, 18(1), 93-101.
- Sanjaya, P. K. A., Dewi, M. H. U., Martini, N. P., & Dewi, I. A. S. D. 2018. Ulun Danu Beratan Development as a Spiritual Tourism Attraction: Strategy for Accelerating Regional Economic Development. *Proceeding Book*, 75.
- Sikor, T., Stahl, J., Enters, T., Ribot, J. C., Singh, N., Sunderlin, W. D., & Wollenberg, L. 2010. REDD-plus, forest people's rights and nested climate governance. *Global Environmental Change*, 20(3), 423.
- Simon, H., 2008. Pengelolaan hutan bersama rakyat (Cooperative forest management). *Pustaka Pelajar, Yogyakarta*.
- Siagian, Hayaruddin. 2015. *Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan : Pengelolaan Hutan di Kabupaten Katingan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
- Statistik, B. P. 2018. Bali dalam angka 2018. *Badan Pusat Statistik Press, Denpasar*.
- Statistik, B.P., Estimasi proporsi penduduk umur 65+ menurut provinsi tahun 2010-2020 (dalam%). c2011 [cited 2011 Jan 14].
- Statistik, B.P., 2019. Data dan Informasi kemiskinan kabupaten/kota tahun 2018. *Jakarta: Badan Pusat Statistik*.

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

- Statistik, B.P., 2016. Indeks Pembangunan Manusia 2015. *Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik.*
- Subandi, M. M. 2016. Ekonomi Pembangunan.
- Suhartini. 2009. *Kajian Kearifan Lokal Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan.* Fakultas MIPA Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sukerada, K. 2013. Penerapan *Tri Hita Karana* Terhadap Kawasan Agrowisata Buyan dan Tamblingan di Desa Pancasari Sukasada Buleleng. *Jurnal Manajemen Agribisnis.* Vol. 1 No. 2 Oktober 2013 : 43-52
- Sukardi, S. 2017. Analisis Pendapatan Masyarakat Desa untuk Kelestarian Hutan Lindung (Studi Hutan Desa Pattaneteang Kabupaten Bantaeng). *Jurnal Hutan dan Masyarakat, 9*(1), 44-53.
- Sunderlin, W. D., Larson, A. M., Duchelle, A. E., Resosudarmo, I. A. P., Huynh, T. B., Awono, A., & Dokken, T. 2014. How are REDD+ proponents addressing tenure problems? Evidence from Brazil, Cameroon, Tanzania, Indonesia, and Vietnam. *World Development, 55*, 37-52.
- Sunderlin, W. and Resosudarmo, I.A.P., 1999. The effect of population and migration on forest cover in Indonesia. *The Journal of Environment & Development, 8*(2), pp.152-169.
- Suparmoko, M., 2002. *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah.* Andi.
- Suparmoko, M. 2014. Ekonomi sumber daya alam dan lingkungan.
- Suparmoko, M. 2016. Ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. *Tanggerang : Universitas Terbuka*

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

- Subrata,W., Wibawa,P. dkk. 2017. *Hutan Dalam Lindungan Hukum Desa Adat di Bali*. Denpasar. PS Hukum Agama Hindu UNHI.
- Sirtha, I. N. 2008. *Aspek hukum dalam konflik adat di Bali*. Udayana University Press.
- Suprpta, D.N., 2012. Potential of microbial antagonists as biocontrol agents against plant fungal pathogens. *J ISSAAS*, 18(2), pp.1-8.
- Utama, M.S., Integrasi antara Aspek Lingkungan dan Ekonomi Dalam Perhitungan PDRB Hijau pada Sektor Kehutanan di Kabupaten Karangasem Provinsi Bali.. *Bumi Lestari Journal of Environment*, 9(2), pp.129-137.
- Usman, Rianse., & Abdi. 2010. Agroforestri : Solusi Sosial dan Ekonomi Pengelolaan Sumber Daya Hutan. *Bandung : Alfabeta*.
- Waluyo, J., 2007. Dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi Dan ketimpangan pendapatan antardaerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(1), pp.1-21.
- World Wide Fund for Nature (WWF).2004. *About Forest Landscape Restoration : Half theForestareGone*.URL:[www.panda.org/about\\_wwf/what\\_we\\_do/restoration/restore\\_forest.cfm](http://www.panda.org/about_wwf/what_we_do/restoration/restore_forest.cfm).

## GLOSARIUM

### A

**Alam** dalam artian luas memiliki makna yang setara dengan dunia alam, dunia fisik, atau dunia materi) mengacu kepada fenomena dunia fisik dan juga kehidupan secara umum.

**Autotrophic** adalah organisme yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan makanannya sendiri. Organisme yang tergolong autotrof hanya membutuhkan karbondioksida dan senyawa nitrogen anorganik sederhana guna menghasilkan makanannya tersebut.

**Akuntabilitas** adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif Kehakiman) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan.

**Abian** adalah Tanah Kosong / Persawahan/ Kebun/ Hutan.

**Awig-Awig** merupakan peraturan yang mengikat masyarakat adat dalam istilah Bali.

### B

**Bendesa** adalah sebutan untuk tetua adat dalam kebudayaan atau tradisi Bali.

**Biosfer** adalah lapisan dimana tempat makhluk hidup itu tumbuh atau menjadi habitat bagi makhluk hidup baik manusia, flora dan fauna serta mikroorganisme lainnya.

**Banjar Pekraman** Bagian dalam struktur pemerintahan adat lokal di Bali.

**Brahmanda** merupakan benda bulat berbentuk telur ciptaan Brahma.

## C

**Civil Society** adalah masyarakat yang berperadaban.

**Catur Purusa Artha** terdiri dari tiga kata yaitu catur yang berarti empat, purusa yang berarti hidup dan artha yang berarti tujuan, jadi **Catur purusa artha** artinya empat tujuan hidup sebagai manusia.

## D

**Desentralisasi** adalah penyerahan Kekuasaan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

**Dekonsentrasi** adalah sebuah kegiatan penyerahan berbagai urusan dari pemerintahan pusat kepada badan-badan lain

**Demand** adalah suatu proses dalam meminta sesuatu atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu.

**Devisa** merupakan pendapatan negara dari sektor luar negeri.

**Demografi** adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia.

**Dana Alokasi Umum** merupakan salah satu transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

**Dana Alokasi Khusus** dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

**Desa Pekraman** adalah sebutan untuk ruang lingkup wilayah secara adat di Bali.

## E

**Energi** daya atau kemampuan untuk melakukan kerja

**Ekosistem** suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya

**Ekologi** ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungannya dan yang lainnya.

**Elastisitas** adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variabel lainnya.

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

**Erosi** peristiwa pengikisan padatan (sedimen, tanah, batuan, dan partikel lainnya) akibat transportasi angin, air atau es, karakteristik hujan, creep pada tanah dan material lain di bawah pengaruh gravitasi, atau oleh makhluk hidup semisal hewan yang membuat liang.

**Environmental Kuznets Curve** adalah kurva yang menerangkan tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kerusakan lingkungan hidup.

**Eksplorasi** yang berarti politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap sesuatu subyek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan.

**Equilibrium** merupakan suatu keadaan keseimbangan dalam konsep ilmu ekonomi.

## F

**Flora** secara umum adalah segala jenis tumbuhan serta tanaman yang ada di muka bumi.

**Fauna** secara umum adalah segala jenis hewan yang ada di muka bumi.

**Fisiografi** adalah satu cabang ilmu Geografi yang mempelajari suatu wilayah daerah atau negara berdasarkan segi fisiknya, seperti dari segi garis lintang dan garis bujur, posisi dengan daerah lain, batuan yang ada dalam bumi, relief permukaan bumi, serta kaitannya dengan laut.

**Fiskal** merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan perekonomian suatu negara.

## G

**Geomorfologi** merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang bentuk alam dan proses yang membentuknya.

**Good Governance** adalah suatu peyelegaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha.

## H

**Hidrologi** adalah cabang ilmu Geografi yang mempelajari pergerakan, distribusi, dan kualitas air di seluruh Bumi, termasuk siklus hidrologi dan sumber daya air.

**Heterotrophic** organisme yang tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, Organisme ini masih bergantung pada organisme lain untuk bisa mendapatkan makanannya.

## I

**Income** adalah pendapatan yang diterima individu, masyarakat atau pelaku ekonomi lainnya.

**Indefferen** merupakan kenetralan seseorang terhadap suatu hal, seseorang, maupun suatu aksi.

## K

**Kahyangan** adalah tempat suci atau yang disucikan.

**Konservasi** adalah pelestarian atau perlindungan. Secara harfiah, konservasi berasal dari bahasa Inggris, conservation yang artinya pelestarian atau perlindungan.

**Kosmologi** adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur dan sejarah alam semesta berskala besar.

**Kulkul** alat komunikasi tradisional masyarakat Bali, berupa alat bunyian yang umumnya terbuat dari kayu atau bambu, dan benda peninggalan para leluhur.

**Krama** adalah sebutan untuk individu dalam tatanan struktur kemasyarakatan adat di Bali.

## L

**Local Genius** merupakan konsep ini digunakan dalam kaitan suatu penjelasan tentang reaksi-reaksi setempat ketika kebudayaan asing masuk.

**Lelipi** adalah bahasa Bali dari hewan melata ular.

## M

**Mikroorganisme** atau mikrob adalah organisme yang berukuran sangat kecil sehingga untuk mengamatinya diperlukan alat bantuan.

**Marginal Propensity to Consume** adalah hasrat mengkonsumsi rata-rata sebagai akibat adanya tambahan pendapatan yang diperoleh.

**Moneter** merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral terkait dalam menstabilkan perekonomian dari sisi peredaran uang dan tingkat suku bunga uang.

## N

**Ngawen** merupakan sebutan atau istilah yang berarti merambah hutan dengan melakukan kegiatan seperti menebang kayu kemudian tanahnya ditanami vanili, kopi, pisang dan lain sebagainya.

**Niskala** adalah a tidak berwujud, tidak berbeda, mujarad, abstrak.

## O

**Otonomi Daerah** adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Ordinary Least Square** merupakan metode kuantitatif dengan menggunakan kuadran terkecil dalam proses analisis data.

## **P**

**Plasma Nutfah** adalah substansi pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ utuh atau bagian dari tumbuhan atau hewan serta jasad renik.

**Produk Domestik Bruto** merupakan ukuran besarnya produksi atau output barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara selama periode waktu tertentu.

**Produk Domestik Regional Bruto** adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut. Menghitung PDRB bertujuan untuk membantu membuat kebijakan daerah atau perencanaan, evaluasi hasil pembangunan, memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah.

**Penduduk** merupakan kumpulan dari individu yang mendiami suatu wilayah tertentu.

**Pendapatan Asli Daerah** adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pekelem** bermakna memohon keselamatan, kesejahteraan, kedamaian jagatraya dengan segala isinya, baik di darat, laut dan udara.

**Parhyangan** berarti hal-hal yang berkaitan dengan dengan keagamaan dalam rangka memuja Ida Sang Hyang Widhi Wasa.

**Palemahan** adalah hubungan harmonis antara umat manusia dengan lingkungannya.

**Pawongan** adalah hubungan harmonis antara umat manusia dengan sesama.

**Panca Maha Bhuta** terdiri Panca berarti lima, Maha Bhuta berarti elemen besar atau elemen utama, kelima elemen ini merupakan penyusun utama makrokosmos atau semesta material atau bhuana agung dan mikrokosmos atau badan atau bhuana alit, Panca Mahabhuta sebagai penyusun alam semesta (Buana Agung) bersumber dari dua azas yang sangat sukma, gaib dan abadi yaitu Cetana dan Acetana yang juga disebut sebagai sebab mula terciptanya segala yang ada (causa prima).

## R

**Regres** adalah gerakan kembali ke keadaan sebelumnya atau bahkan lebih buruk dari keadaan sebelumnya.

**Return** adalah hasil dari suatu aktifitas atau pengembalian adalah tingkat keuntungan yang bisa dinikmati oleh para investor atas investasi yang ditanamkan.

**Reboisasi** adalah penanaman kembali hutan yang telah ditebang atau gundul.

## S

**Sustainable Development Goals** merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan.

**Supply** adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat dijual oleh penjual pada berbagai tingkat harga, dan pada waktu tertentu.

**Sentralistik** adalah pengaturan kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

**Silvikultur** adalah praktik pengendalian proses permudaan (penanaman), pertumbuhan, komposisi, kesehatan, dan kualitas suatu hutan demi mencapai aspek-aspek ekologi dan ekonomi yang diharapkan.

**Sekeha** merupakan sebutan atau istilah bagi kelompok dalam masyarakat Bali.

**Sad Kertih** adalah enam jenis upacara yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan alam beserta isinya atau enam konsep dalam melestarikan lingkungan, diantaranya Atma Kertih yaitu upaya untuk menyucikan atma, Samudra Kertih yaitu upaya untuk melestarikan samudra, Wana Kertih yaitu upaya untuk melestarikan hutan, padat), Apah (zat cair), Teja (api), Bayu (zat udara), Akasa (eter) yang semua saling berkaitan satu dengan yang lain. Agar terjadi sinergi yang baik maka berbagai kitab Hindu merumuskan dalam lontar-lontar Purana. Sad Kertih berasal dari akar kata yaitu Sad artinya enam

dan Kertih artinya keharmonisan alam, Danu Kertih yaitu upaya untuk menjaga kelestarian sumber air tawar di daratan, Jagat Kertih yaitu upaya untuk melestarikan keharmonisan hubungan sosial yang dinamis dan produktif berdasarkan kebenaran, dan Jana Kertih yakni upaya untuk menjaga kualitas individu.

## T

**Tri Hita Karana** adalah tiga penyebab kebahagiaan.

**Tri Mandala** adalah 3 (tiga) wilayah atau daerah yang dimiliki oleh setiap Pura dan antara mandala yang satu dengan mandala yang lain dibatasi oleh tembok atau pintu masuk yang khas.

**Tri Angga** atau Tri Loka adalah sebuah kearifan lokal mengenai konsep ruang yang dimiliki oleh masyarakat Bali.

**Tenurial** adalah merujuk pada kandungan atau hakikat dari hak dan jaminan atas hak.

**Tumpek Wariga** dirayakan pada hari Saniscara Kliwon Wuku Warigadian, tepat 25 hari sebelum Hari Raya Galungan. Hari suci ini juga sering disebut sebagai Tumpek Uduh, Tumpek Bubuh atau Tumpek Pengatag. Pada Hari ini umat Hindu memuja Ida Sang Hyang Widhi Wasa dalam manifestasinya sebagai Sang Hyang Sangkara, memohon anugerah untuk tumbuh-tumbuhan dapat berbuah dan tumbuh subur

**Tumpek Uye** juga disebut dengan Tumpek Uye adalah hari upacara dalam rangka memuja keagungan

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

Tuhan dengan cara melakukan pemeliharaan sebaik-baiknya atas ciptaan-Nya berupa binatang ternak (wewalungan) atau hewan peliharaan.

## U

**Urban Bias** merupakan model pembangunan yang dilaksanakan negara-negara Dunia Ketiga atau negara-negara berkembang, pada umumnya hanya menguntungkan masyarakat urban serta merugikan mereka yang tinggal di pedesaan.

**Utama** merupakan hal yang paling hakiki atau essensial.

## W

**Wana Kertih** merupakan bagian dari sad kertih merupakan upacara untuk memuliakan hutan maupun gunung.

**Wana Tapa** adalah upaya menjaga kesucian hutan suci dimana tempat para yogi membuat pusat pertapaan atau pesraman sebagai bagian dari kelestarian alam (hutan).

**Weda** merupakan kitab suci Agama Hindu.

## Y

**Yadnya** adalah berarti kurban suci yang dilaksanakan dengan tulus ikhlas dalam ajaran Agama Hindu.

**Yayur Weda** adalah salah satu bagian dari Kitab Suci Weda, memuat sastra suci yang terfokus pada ritual dan kurban suci. Wahyu Yajurveda dihimpun oleh Rsi Waisampayana.

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*



## Tentang Penulis



**Putu Krisna Adwitya Sanjaya** adalah *Assistant Professor* bidang Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata Universitas Hindu Indonesia (FEBP UNHI), Denpasar. Ia mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari

Universitas Udayana (2008), *Master of Science* dengan spesialisasi Moneter Keuangan dan Perbankan berpredikat *Cum laude* sekaligus menjadi lulusan terbaik di almamaternya pada tahun 2010. Pernah mengikuti workshop *quantitative & qualitative research method* (2019), *short course Enhancement of Basic Instructional Skills* (2019), *short course International Writing Scholl* (2018), penyusunan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (2016), *multivariate analysis training skills* (2015). Telah mempresentasikan makalah dalam beberapa konferensi nasional maupun internasional a.l...: (1) *The International Conference on Sustainability for Bussiness, Innovation, and Technology* (2020), (2) *International Conference Community, Ecology and Religion : Interdisciplinary and Civic Engagements Toward Sustainable Living* (2020), (3) Seminar Nasional Meningkatkan Mutu Riset Perguruan Tinggi (2019), (4)

HUTAN LESTARI  
*Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*

Seminar Unggulan Riset Nasional (2019), (5) Konferensi Nasional Hasil Penelitian Meningkatkan Mutu Penelitian dan Peringkat Perguruan Tinggi (2018), (6) Konferensi Nasional Agama, Adat, Seni dan Sejarah di Zaman Millennial (2018), (7) *Conference Indonesian Regional Science Assosiation* (2017), (8) *Conference Bali Hinduism, Traditional and Interreligious Studies* (2018), (9) *International Conference on Innovation in Research* (2018), (10) *Conference in Economics, Management and Accounting* (2018), (11) *International Conference on Possibilities and Probabilities In Higher Education of Asia* (2019). Beliau pernah mendapatkan beberapa penghargaan ilmiah (*award*) diantaranya : (1) *Best Paper award, Warmadewa University* (2018) ; (2) *Best Presenter Award, Bali* (2018) ; (3) *Penelitian & Pengabdian Award* dari Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Hindu Indonesia untuk kategori Dosen pemenang Hibah Riset Perguruan Tinggi (2016). Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Pusat Analisis Data Manajemen dan Akuntansi UNHI (2014-2018) dan saat ini mendapat amanah sebagai *managing editor* Jurnal Widya Manajemen FEBP serta Sekretaris UNHI *Press* Denpasar. Beberapa buku telah berhasil dipersembahkan oleh anak "blasteran" Birokrat-Akademisi kelahiran Singaraja ini diantaranya: (1) *Metode Mudah Memahami Pengantar Ekonomi Makro*, (2) *Bali dalam Narasi*, (3) *Ekonomika Uang : Based On Empirical Research*, (4) *Mudah Memahami Mikro Ekonomi Suatu Pengantar* serta (5) *Tata Kelola Manajemen & Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah*.

Sumber daya alam dan lingkungan tidak dapat dilepaskan perannya sebagai sumber kehidupan serta sumber pendapatan bagi proses pembangunan pada suatu daerah. Pembangunan ekonomi pada hakekatnya merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Indikator yang digunakan untuk mengetahui kondisi perekonomian adalah Produk Domestik Regional Bruto dan pertumbuhan pendapatan per kapita masyarakat di wilayah tersebut. Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan ekonomi masyarakat akan menjadi tekanan terhadap pemanfaatan sumberdaya alam, terlebih dengan adanya pemberian otonomi kepada daerah dalam konteks pengelolaan sumber daya alam dapat menjadi sebuah harapan sekaligus ancaman. Isu lingkungan hidup pernah disentil dalam konferensi *United Nation Framework Convention on Climate Change* di Nusa Dua, Bali tahun 2007 mengenai kerusakan lingkungan yang terjadi akibat dari industrialisasi yang berorientasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan aspek lingkungan sehingga mengakibatkan iklim dunia menjadi berubah seperti sekarang ini, atau yang disebut dengan *global warming*.

Di Bali seputar penyelamatan lingkungan sudah diwariskan sejak jaman dahulu. Ini terbukti dari adanya ritual khusus pada hari Raya *Tumpek Wariga* setiap *enem sasih* yakni memberi penghormatan pada tumbuh-tumbuhan yang secara langsung merupakan pengejawantahan terhadap kelestarian lingkungan sebagai wujud dari falsafah *Tri Hita Karana* yang juga menjadi pedoman mengenai konsep hubungan antara manusia, alam, serta Tuhan. Hal ini dirasa belum lah cukup mengingat fakta dilapangan kondisi hutan di Provinsi Bali mengalami tekanan mengalami distorsi yang cukup kuat akibat gangguan keamanan hutan dengan berkurangnya luas hutan maupun bertambahnya lahan kritis di kawasan hutan.

Buku ini disusun secara gamblang, lugas yang dirancang dengan kajian teori, studi empiris, *based on research study* dengan pendekatan ilmiah eminen. Sebagai buku referensi, buku ini sangat bermanfaat bagi para mahasiswa, akademisi maupun praktisi yang dengan sengaja ditulis menggunakan gaya bahasa yang ringan agar lebih mudah dipahami secara komprehensif.

ISBN 978-623-7963-21-9

